

Dr. Aji Deni, S.Pd., M.Si.
Bakri La Suhu, S.IP., M.Si.
Nurul Sintia Kahar

MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS

UNTUK PEMILU DI PULAU-PULAU TERPENCIL



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2025

Model Edukasi Pemilih Cerdas Untuk Pemilu di Pulau-Pulau Terpencil

Penulis:

Dr. Aji Deni, S.Pd., M.Si.

Bakri La Suhu, S.IP., M.Si.

Nurul Sintia Kahar

ISBN: 978-xxx

Tata Letak: Setia S Putra

Desain Sampul: Tim

Diterbitkan oleh:



Penerbit K-Media

Anggota IKAPI No.106/DIY/2018

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

WA +6281-802-556-554, Email: kmedia.cv@gmail.com

Cetakan 1, Desember 2025

Yogyakarta, Penerbit K-Media 2025

15,5 x 23 cm, xxviii, 228 hlm.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Sungguh, kami mengucapkan terima kasih untuk sebuah karya yang lahir dari proses penelitian adalah upaya yang jauh lebih rumit daripada sekadar menyusun daftar nama. Buku ini menggambarkan sebuah perjalanan anak muda yang bersama dan berkolaborasi dengan Dosen dalam Penelitian sederhana. Kami memahami benar bagaimana menimbang setiap jejak langkah, dan merangkul kontribusi yang tidak terhingga, baik yang tampak di permukaan maupun yang tersembunyi jauh di balik layar. Penerbitan buku *Model Edukasi Pemilih Cerdas Untuk Pemilu di Pulau-Pulau Terpencil* ini bukanlah pencapaian tunggal, melainkan kesadaran kolektif yang mengharuskan kita untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan mengakui bahwa setiap kata yang terukir, setiap analisis yang tersaji, adalah hasil dari jaringan dukungan yang awalnya rapuh namun berakhir baik.

Karya ini bermula dari sebuah kegelisahan kritis terhadap realitas demokrasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kita tahu, pulau-pulau terpencil seringkali menjadi anomali dalam narasi pemilu nasional karena jangkauan informasi yang sulit, akses pendidikan politik yang terbatas, dan tantangan geografis yang melipatgandakan biaya serta upaya. Ide untuk

merumuskan model edukasi pemilih cerdas di konteks yang begitu menantang ini adalah sebuah panggilan, dan dalam perjalanan menjawab panggilan itulah, rangkaian terima kasih ini harus dimulai. Pertama dan yang paling utama, apresiasi ini tertuju pada tim peneliti dan penulis. Dedikasi tidak bertepi dari Dr. Aji Deni, S.Pd., M.Si., yang dengan visi akademisnya telah memimpin dan mengarahkan kerangka berpikir buku ini, mengaitkan teori-teori mapan dengan realitas lapangan yang dinamis. Kemudian, kepada Bakri La Suhu, S.IP., M.Si., yang kejiannya dalam menangkap nuansa politik lokal dan pengalaman risetnya telah menjadi jembatan esensial antara konsep di atas kertas dengan implementasi praktis di tengah masyarakat. Dan tentu saja, kepada Nurul Sintia Kahar, Mahasiswa senior Program Studi Ilmu Politik yang mewakili semangat riset generasi muda, energi dan ketekunannya sebagai bagian dari anggota tim, terutama dalam menggali data dan menata bahan, telah memberikan perspektif segar dan vitalitas yang tak ternilai.

Buku ini tidak akan pernah ada tanpa mereka yang terlibat secara langsung, namun seringkali namanya tidak tercantum di sampul. Kepada bapak, ibu, saudara, dan saudari sekalian di wilayah sasaran riset yang dengan segala keterbatasan dan kesibukan hidup mereka, telah membuka pintu rumah, membagikan cerita, dan mencerahkan kami tentang cara mereka memandang

pemilu dan mengolah informasi politik. Kejujuran dan keterbukaan mereka adalah data yang paling berharga. Kejujuran dalam data telah mengukir wajah demokrasi dari riset suara statistik menjadi sebuah cermin realitas sosial. Kami berutang budi yang tidak terucapkan atas pelajaran kerendahan hati informan yang kami saksikan di lapangan.

Tidak lupa, barisan relawan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Angkatan 2024, khususnya yang terlibat dalam proses wawancara dan pengumpulan data. Mereka adalah mata dan telinga tim di lapangan, yang menjelajahi pelosok, melintasi batas-batas geografis dengan semangat kesukarelawanan yang tulus. Perannya dalam memvalidasi data dan menjadi fasilitator dialog adalah fondasi empiris yang memungkinkan model edukasi ini berdiri tegak. Sarwa Ngendre, Sitti Nur Inaya Taba, Sagir Bayu, Halfianto Yunus, Fitriadi Samiun telah mengorbankan waktunya menemani kami di Pulau Kolorai. Kepada Sabila Laipo dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UMMU dan Kawan-kawannya di Pulau Tolonuo juga turut memberi andil yang baik dalam riset ini.

Karya ilmiah, terutama yang berbasis riset, mustahil terbit tanpa *jaring pengaman institusional* yang memayunginya. Terima kasih kritis ditujukan kepada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU),

tempat di mana benih riset ini disemai. Khususnya kepada Rektor dan seluruh jajaran Lembaga Riset, Pengabdian, Publikasi dan HAKI (LRP2H), serta Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang telah memberikan dan menyediakan iklim akademik yang menuntut, mengkritisi, dan pada akhirnya, mendukung penuh upaya penerbitan ini. Dukungan anggaran, fasilitas, dan kepercayaan institusional adalah bentuk kontribusi tidak langsung yang paling hakiki, yang mengakui bahwa fungsi perguruan tinggi adalah menanggapi dan memecahkan masalah nyata masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Ucapan terima kasih yang paling mendalam kami sampaikan kepada lembaga pendanaan yang telah memercayakan dan mendukung penuh terlaksananya penelitian ini, yaitu melalui skema Penelitian Fundamental Reguler II-Hibah Riset Muhammadiyah Batch VIII Tahun 2024. Tanpa dukungan finansial yang krusial ini, mustahil bagi tim untuk menembus batas-batas geografis yang menantang di Pulau Maitara, Pulau Tolonuo, Pulau Kolorai yang terpencil guna menggali data primer, melakukan pemodelan edukasi, dan pada akhirnya mewujudkan temuan ini menjadi sebuah buku yang sederhana. Dukungan ini sebagai investasi kelembagaan yang visioner terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat, dan upaya

kolektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah terdepan Indonesia.

Secara tidak langsung, apresiasi juga mengalir kepada para *reviewer* dan kolega akademisi yang meluangkan waktu berharga untuk membaca draf awal, memberikan kritik tajam, dan saran konstruktif yang pedas namun mencerahkan. Proses revisi yang menyakitkan namun esensial inilah yang memastikan integritas metodologis dan kedalaman konseptual buku ini. Mereka adalah benteng terakhir yang menjaga kualitas akademik. Setelah semua proses riset dan penulisan selesai, buku ini harus bertransformasi dari sekumpulan manuskrip menjadi sebuah wujud fisik yang siap dibaca. Di sini, peran Penerbit K-Media di Yogyakarta menjadi sangat vital yang telah bersedia membantu menerbitkan naskah ini.

Penerbitan buku ini adalah sebuah afirmasi bahwa upaya pencerahan politik di wilayah manapun, sekecil apapun, adalah sebuah tugas mulia. Terima kasih ini adalah pengakuan atas sebuah kenyataan bahwa ilmu pengetahuan tidak bergerak sendiri; ia membutuhkan kerendahan hati akademisi, keberanian para responden, dan keikhlasan para pendukung. Kami menyadari bahwa *Model Edukasi Pemilih Cerdas* ini mungkin hanyalah setetes air di lautan masalah pemilu nasional, namun berkat kontribusi langsung dan tidak langsung dari semua pihak yang disebutkan, tetesan ini kini telah menjadi sebuah

wadah pengetahuan yang siap ditawarkan kepada khalayak. Semoga karya ini menjadi amal jariyah, menjadi sumbangsih nyata bagi perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya bagi saudara-saudari kita di pulau-pulau terpencil. Terima kasih yang paling tulus, yang melebihi kata-kata.

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Prof. Dr. Saiful Deni, S.Ag., M.Si

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillahirrabil 'alamin, washolatu wassalamu 'ala asrofil
anbiya'i wal mursalin, wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amma ba'du.*

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang istimewa ini. Sebuah momen di mana kita merayakan lahirnya sebuah karya ilmiah yang tidak hanya memperkaya khazanah pengetahuan, tetapi juga menjadi jembatan nyata antara teori dan realitas. Atas nama seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), saya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas terbitnya buku monograf yang luar biasa ini, yang merupakan hasil dari penelitian mendalam tentang tantangan demokrasi di wilayah kepulauan terpencil Maluku Utara.

Buku ini bukanlah sekadar tumpukan kertas berisi kata-kata, melainkan sebuah manifestasi dari komitmen kita sebagai institusi pendidikan tinggi untuk tidak hanya menjadi menara gading yang terisolasi, tetapi menjadi

lentera yang menerangi realitas sosial. Karya ini adalah bukti nyata bahwa penelitian ilmiah, ketika dilakukan dengan hati dan empati, mampu berbicara dengan bahasa yang lebih dari sekadar data statistik. Ia berbicara tentang harapan, perjuangan, dan impian masyarakat yang sering kali luput dari perhatian pusat kekuasaan.

Sebagai sebuah universitas, UMMU memiliki peran sentral dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini adalah perwujudan sempurna dari sinergi ketiga dharma tersebut. Di dalamnya terkandung semangat penelitian yang mendalam, yang berupaya memahami kompleksitas demokrasi di Maluku Utara. Melalui penelitian ini, kita belajar bahwa demokrasi di kepulauan memiliki dinamikanya sendiri, yang tidak bisa diseragamkan dengan model demokrasi di perkotaan. Ada faktor-faktor geografis, sosial, dan ekonomi yang membentuk cara pandang dan partisipasi politik masyarakat.

Lebih dari itu, buku ini juga merupakan wujud dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan menawarkan "Model Edukasi Pemilih Cerdas," buku ini memberikan kontribusi konkret, sebuah kerangka kerja yang praktis dan relevan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Ini adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan tidak berhenti di jurnal-jurnal ilmiah, tetapi harus mengalir dan bermanfaat bagi kehidupan nyata. Buku ini adalah panggilan bagi kita semua, untuk bergerak melampaui

kelas-kelas teori dan terlibat langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Penelitian yang melandasi buku ini telah membawa kita ke tiga pulau yang menjadi cermin bagi Maluku Utara secara keseluruhan: Pulau Tolonuo, Pulau Kolorai, dan Pulau Maitara. Kisah-kisah yang terekam di dalamnya adalah pelajaran berharga bagi kita. Kita melihat bagaimana keterbatasan infrastruktur, transportasi, dan ekonomi tidak hanya memengaruhi kesejahteraan, tetapi juga membentuk pola pikir politik masyarakat. Kita melihat bagaimana "politik uang" dan "identitas primordial" menjadi ancaman nyata yang menggerogoti esensi dari demokrasi itu sendiri.

Namun, buku ini tidak berhenti pada diagnosis masalah. Ia melangkah lebih jauh dengan menawarkan sebuah solusi yang inovatif dan kontekstual. Konsep "pemilih cerdas" yang didasarkan pada "partisipasi rasional" menjadi inti dari model yang diusulkan. Ini adalah pendekatan yang mengajak kita untuk tidak hanya meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga menumbuhkan kualitas partisipasi itu sendiri. Dengan menyajikan pilar-pilar edukasi yang jelas—mulai dari penyampaian informasi yang terstruktur, pendidikan kewarganegaraan, hingga pendekatan inklusif yang sensitif gender—buku ini memberikan peta jalan yang terperinci. Ini adalah kontribusi nyata untuk membangun

demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan di Maluku Utara.

Atas nama pimpinan universitas, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Kepada tim peneliti, para dosen Program Studi Ilmu Politik, dan seluruh relawan mahasiswa dari FISIP UMMU: dedikasi, kerja keras, dan semangat juang kalian adalah inspirasi bagi kita semua. Kepada seluruh informan di Pulau Maitara, Kolorai, dan Tolonuo: terima kasih atas kepercayaan dan keterbukaan Anda. Buku ini adalah suara Anda yang kami sampaikan. Kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah: terima kasih atas dukungan finansial dan kelembagaan yang tak ternilai. Dukungan ini adalah bukti komitmen kita bersama dalam memajukan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, saya berharap buku ini tidak hanya menjadi bacaan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk tindakan nyata. Semoga ilmu yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan, memicu diskusi-diskusi produktif, dan pada akhirnya membawa perubahan positif bagi masyarakat di Maluku Utara. Mari kita jadikan UMMU sebagai pusat keilmuan yang tidak hanya menghasilkan sarjana, tetapi juga agen-agen perubahan yang peduli terhadap realitas bangsanya.

*Nasrun Minallahi Wa Fathun Qarieb
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KATA PENGANTAR

Perjalanan sebuah buku, dari ide yang terlintas hingga menjadi sebuah karya utuh yang dapat dibaca, adalah sebuah proses panjang yang melibatkan banyak tangan, pikiran, dan hati. Buku ini, yang merupakan refleksi mendalam tentang tantangan demokrasi di wilayah kepulauan terpencil Maluku Utara, tidak akan pernah ada tanpa dukungan, kerja keras, dan dedikasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari terwujudnya penelitian dan penulisan ini.

Buku ini bermula dari sebuah pertanyaan sederhana: apakah demokrasi, sebagai sebuah sistem yang ideal, dapat benar-benar bekerja di wilayah yang terisolasi secara geografis dan terhimpit oleh keterbatasan struktural? Pertanyaan ini membawa kami pada sebuah ekspedisi intelektual dan fisik, menembus batas-batas kota, menyeberangi lautan, dan melintasi pulau-pulau yang jarang tersentuh oleh narasi pembangunan mainstream. Tujuan utama kami bukan sekadar mencari jawaban, melainkan menggali pemahaman yang lebih dalam, mendengarkan suara-suara yang sering kali

terabaikan, dan menawarkan solusi yang relevan dan kontekstual.

Dedikasi pertama dan yang paling utama, saya haturkan kepada seluruh relawan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Mereka adalah tulang punggung dari penelitian ini. Tanpa semangat juang, daya tahan, dan kerelaan mereka untuk menemani tim peneliti di lapangan, buku ini hanyalah sebuah konsep di atas kertas. Mereka adalah "mata dan telinga" kami di lapangan, yang dengan sabar mendengarkan keluh kesah, merekam cerita, dan mengamati dinamika sosial politik di Pulau Maitara, Pulau Kolorai, dan Pulau Tolonuo. Mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya menjadi asisten penelitian; mereka adalah duta-duta pengetahuan yang dengan gigih berinteraksi dengan masyarakat, membangun jembatan kepercayaan, dan memastikan setiap data yang kami peroleh adalah representasi otentik dari realitas yang ada. Terima kasih atas setiap tetes keringat, setiap jam yang dihabiskan di bawah terik matahari, dan setiap malam yang diisi dengan diskusi mendalam tentang temuan-temuan di lapangan. Pengalaman ini, saya harap, tidak hanya memperkaya wawasan akademis mereka, tetapi juga menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab sosial yang akan menjadi bekal berharga di masa depan.

Ucapan terima kasih selanjutnya, yang tidak kalah penting, saya sampaikan kepada seluruh informan di

Pulau Maitara, Pulau Kolorai, dan Pulau Tolonuo. Mereka adalah narasumber utama, pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membuka pintu rumah, hati, dan pikiran mereka untuk kami. Mereka dengan sukarela berbagi cerita tentang perjuangan hidup di bawah bayang-bayang keterbatasan, tentang dilema dalam memilih pemimpin, dan tentang harapan mereka akan masa depan yang lebih baik. Tanpa kejujuran dan keterbukaan mereka, buku ini hanya akan menjadi sekumpulan data yang hampa. Cerita-cerita mereka—tentang tantangan transportasi yang menghambat ekonomi, tentang dilema antara identitas dan kualitas calon pemimpin, dan tentang harapan akan pembangunan yang adil—adalah inti sari dari buku ini. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Semoga buku ini dapat menjadi media yang efektif untuk menyuarakan aspirasi mereka dan membawa perubahan yang mereka impikan.

Buku ini juga tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan finansial dan kelembagaan yang kuat. Untuk itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada Majelis Diktilitbang (Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Proyek Riset Muhammadiyah tahun 2024. Dukungan finansial yang diberikan telah memungkinkan kami untuk melakukan penelitian di lokasi yang sulit dijangkau, membiayai proses publikasi di artikel jurnal nasional Sinta 2, dan akhirnya menerbitkan

hasil penelitian ini dalam bentuk buku monograf sederhana. Dukungan ini bukan sekadar bantuan dana; ini adalah wujud nyata komitmen Muhammadiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan mencerahkan kehidupan bangsa, terutama di wilayah-wilayah perbatasan. Dukungan ini memotivasi kami untuk terus berkarya dan memastikan bahwa hasil penelitian kami tidak hanya berhenti di ruang-ruang akademik, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Lebih lanjut, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) atas dukungan moral dan fasilitas yang telah diberikan. Kampus adalah rumah bagi penelitian ini, tempat di mana ide-ide awal digodok dan rencana-rencana disusun. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik yang selalu menjadi partner diskusi yang berharga. Setiap perdebatan, setiap masukan kritis, dan setiap saran yang konstruktif telah membantu kami untuk menutupi celah-celah kekurangan analisis data dan memperkaya perspektif kami. Lingkungan akademik yang suportif dan kolaboratif inilah yang memungkinkan kami untuk menyempurnakan temuan di lapangan dan menyajikannya dalam sebuah narasi yang koheren.

Akhir kata, buku ini adalah sebuah awal, bukan akhir. Ini adalah panggilan untuk terus berdiskusi, berkolaborasi, dan beraksi. Semoga buku ini dapat

menginspirasi lebih banyak peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan dinamika demokrasi di wilayah kepulauan. Semoga juga dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam merumuskan model edukasi pemilih yang lebih cerdas, partisipatif, dan relevan, sehingga demokrasi di Maluku Utara, dan di seluruh kepulauan Indonesia, dapat menjadi cermin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

PRAKATA PENULIS

Aji Deni, Bakri La Suhu, Nurul Sintia Kahar

Di tengah luasnya samudra dan Kepulauan Maluku Utara, tersembunyi sebuah ironi mendalam: kekayaan alam yang melimpah tidak serta-merta sejalan dengan kesejahteraan dan partisipasi demokrasi yang substantif. Narasi ini bermula dari "Suara dari Jantung Kepulauan," sebuah jeritan yang mengabarkan kesulitan pembangunan yang membelenggu masyarakat di pelosok-pelosok terpencil. Bab pertama buku ini tidak sekadar menyajikan data statistik; ia menghadirkan potret nyata, merangkai kisah-kisah perjuangan yang personal dan universal. Di Pulau Tolonuo, kita dipertemukan dengan gambaran kehidupan yang diwarnai oleh keterbatasan—akses terhadap layanan dasar, infrastruktur yang rapuh, dan tantangan geografis yang menjadikan setiap aktivitas sebagai sebuah perjuangan. Sementara itu, Pulau Kolorai menunjukkan dilema yang berbeda: meskipun memiliki potensi, ia terhimpit oleh masalah transportasi yang kronis dan ekonomi yang statis, seolah terisolasi dari denyut nadi kemajuan. Kemudian, di Pulau Maitara, kita melihat sebuah kontradiksi yang menyakitkan: potensi alam yang begitu kaya, dari lautan hingga daratan, berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan masyarakatnya yang masih jauh dari ideal. Kisah-kisah ini

bukan hanya keluhan; ia adalah fondasi yang kokoh, landasan empiris yang menggugah kesadaran bahwa pembangunan yang adil dan merata masih menjadi mimpi di banyak wilayah kepulauan.

Transisi dari potret realitas sosial ke ranah politik terjadi di Bab II, yang memposisikan Maluku Utara sebagai "Cermin Demokrasi di Kepulauan." Di sinilah, buku ini mulai mengurai bagaimana kesulitan-kesulitan yang diceritakan sebelumnya membentuk dan memengaruhi cara masyarakat dalam berdemokrasi. Bab ini bukan sekadar mengamati, melainkan menelisik secara mendalam. Di Tolonuo, pilihan politik masyarakat terbelah antara rasionalitas—kandidat mana yang menawarkan program pembangunan yang paling realistis—dan identitas—siapa yang paling dekat secara budaya atau kekerabatan. Akses informasi dan logistik yang sulit memperparah ketegangan ini, membuat pemilih sering kali harus memilih berdasarkan keterbatasan informasi yang mereka miliki. Di Kolorai, dinamika politiknya semakin kompleks dengan kehadiran heterogenitas pemilih dan penetrasi media digital yang belum terkelola dengan baik. Informasi yang cepat menyebar, baik yang akurat maupun disinformasi, menjadi faktor penentu yang dapat memicu perpecahan. Sementara di Maitara, perdebatan politik sering kali tidak berfokus pada kualitas kandidat atau rekam jejak mereka, melainkan terperosok pada pusaran identitas primordial

yang mendalam. Dengan demikian, demokrasi di kepulauan menjadi sebuah cermin yang memantulkan kerentanan sosial, ekonomi, dan geografis, yang menjadikannya rentan terhadap praktik-praktik politik yang tidak sehat.

Pemahaman mendalam terhadap tantangan-tantangan ini kemudian mengantarkan kita pada titik balik, yaitu di Bab III. Setelah mengidentifikasi masalah, buku ini beralih ke perumusan solusi dengan memperkenalkan "Model Edukasi Pemilih Cerdas." Bagian ini menegaskan bahwa untuk memperbaiki demokrasi di kepulauan, kita tidak bisa hanya berfokus pada prosedur pemilu, melainkan harus memberdayakan para pemilih itu sendiri. Model ini dirancang sebagai jawaban atas ancaman-ancaman nyata terhadap demokrasi, seperti politik uang yang merusak integritas, korupsi yang menggerogoti sumber daya, dan ketimpangan yang muncul dari praktik otonomi daerah yang tidak efektif. Ini adalah jembatan dari diagnosis ke prognosis, sebuah peta jalan menuju perbaikan.

Untuk memastikan model ini memiliki landasan yang kuat, Bab IV menyediakan kerangka teoretis yang terperinci. Di sini, buku ini tidak hanya mendefinisikan "pemilih cerdas" dan "partisipasi rasional" secara normatif, tetapi juga mengupas tuntas asumsi-asumsi dasar dari Teori Pemilih Rasional. Penulis dengan cermat membedah teori ini, menunjukkan relevansinya sekaligus

mengkritiknya dan menyesuaikannya dengan realitas unik masyarakat kepulauan. Bab ini menekankan bahwa partisipasi rasional bukan berarti pemilih harus memiliki informasi sempurna, melainkan bagaimana mereka menggunakan informasi yang tersedia secara efektif untuk membuat pilihan yang paling menguntungkan bagi kepentingan kolektif. Dengan demikian, model ini tidak utopis; ia pragmatis dan grounded.

Setelah membangun landasan filosofis dan teoretis, buku ini mulai merincikan pilar-pilar operasional dari model tersebut. Bab V dan Bab VI menjadi panduan praktis tentang bagaimana mengimplementasikan model ini. Kunci utamanya adalah memusatkan pengalaman pemilih dan memastikan penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur. Hal ini tidak sekadar berarti menyebarkan informasi, tetapi menyajikannya dengan cara yang dapat diterima oleh audiens yang beragam. Bahasa harus sederhana, desain visual harus menarik dan mudah dipahami, dan yang terpenting, materi harus diuji terlebih dahulu dengan audiens target untuk memastikan efektivitas komunikasi. Ini adalah pendekatan yang menempatkan pemilih sebagai subjek, bukan objek, dari proses edukasi.

Pilar-pilar berikutnya menjadi lebih spesifik. Bab VII fokus pada edukasi hak dan proses pemilu—sebuah langkah mendasar untuk memastikan setiap warga negara memahami hak suaranya, cara registrasi, mekanisme

pemungutan suara, dan prosedur pengaduan. Ini adalah fondasi dari literasi pemilu. Kemudian, Bab VIII mengangkat pendidikan ke level yang lebih tinggi dengan membahas pendidikan kewarganegaraan dan literasi politik. Di sini, tujuannya adalah melampaui "cara mencoblos" dan menumbuhkan pemahaman kritis tentang sistem politik, peran lembaga negara, dan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, edukasi ini tidak hanya menciptakan pemilih yang kompeten, tetapi juga warga negara yang berdaya.

Kerangka model ini tidak akan lengkap tanpa pendekatan yang inklusif, dan inilah yang dibahas di Bab IX. Bab ini menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan sensitif gender untuk menjangkau kelompok rentan, perempuan, dan kelompok marjinal. Ini bukan sekadar kewajiban moral, melainkan prasyarat untuk demokrasi yang sejati. Strategi kolaborasi juga menjadi kunci, seperti yang dijelaskan di Bab X, yang mempromosikan sinergi antara pemerintah, LSM, dan media lokal, serta pemanfaatan teknologi digital dan pelatihan bagi petugas pemilu. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung, di mana setiap pihak memiliki peran dalam mewujudkan pemilih yang cerdas.

Akhirnya, buku ini mencapai puncaknya di Bab XI, sebuah bab penutup yang visioner. "Membangun Demokrasi Kepulauan yang Cerdas di Maluku Utara" menjadi sebuah sintesis yang menyatukan semua gagasan.

Bab ini merangkum dampak dan manfaat dari model edukasi ini—mulai dari peningkatan partisipasi, pengurangan konflik, hingga legitimasi hasil pemilu yang lebih kuat. Lebih dari sekadar hasil teknis, buku ini menegaskan bahwa demokrasi sejati di kepulauan hanya dapat terwujud jika setiap warga negara diberdayakan. Penulis mengakhiri karyanya dengan sebuah harapan, sebuah ajakan bagi kita semua untuk melihat demokrasi bukan hanya sebagai sebuah prosedur politik yang kaku, melainkan sebagai sebuah jalan yang terbuka lebar untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan masa depan yang lebih cerah bagi setiap warga, bahkan mereka yang tinggal di pulau-pulau paling terpencil.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA	ix
DAFTAR ISI	xxiv

BAB I. SUARA DARI JANTUNG KEPULAUAN: KELUHAN PEMBANGUNAN DI MALUKU UTARA.....	30
➤ Pulau Tolonuo: Perjuangan di Bawah Bayang-Bayang Keterbatasan	34
➤ Desa Kolorai: Terhimpit Masalah Transportasi dan Ekonomi.....	36
➤ Pulau Maitara: Dilema Antara Potensi dan Kesejahteraan	39
BAB II. POTRET DEMOKRASI YANG TERBELAH: POLITIK UANG, IDENTITAS, DAN AKSES INFORMASI DI MALUKU UTARA.....	44
➤ Pulau Tolonuo: Antara Rasionalitas, Identitas, dan Kendala Akses	44
➤ Pulau Kolorai: Heterogenitas Pemilih dan Pengaruh Media.....	47
➤ Pulau Maitara: Perpecahan Antara Kualitas dan Identitas.....	50

➤	Cermin Demokrasi di Kepulauan.....	52
BAB III.	MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS UNTUK PILKADA/PEMILU DI PULAU- PULAU TERPENCIL BERBASIS MEDIA DIGITAL	54
➤	Latar Belakang: Menemukan Solusi untuk Tantangan Demokrasi di Perbatasan.....	54
➤	Politik Uang dan Dinamika Demokrasi Lokal.....	65
➤	Korupsi, Otonomi Daerah, dan Demokrasi Kepulauan	67
➤	Ancaman terhadap Demokrasi dan Masa Depan Kepulauan	69
BAB IV.	KERANGKA MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS: PILAR-PILAR MENUJU PARTISIPASI RASIONAL	72
➤	Definisi Pemilih Cerdas dan Partisipasi Rasional.....	72
➤	Tiga Dimensi Utama Pemilih Cerdas	74
➤	Tantangan dalam Mewujudkan Pemilih Cerdas	76
➤	Peran Teknologi dalam Membangun Pemilih Cerdas.....	77
➤	Pemilih Cerdas: Memahami Hak, Proses, dan Isu Politik	80
➤	Partisipasi Rasional	82

➤ Dampak Positif pada Kualitas Demokrasi dan Legitimasi Hasil Pemilu.....	91
BAB V. KERANGKA MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS: PILAR-PILAR MENUJU PARTISIPASI RASIONAL.....	93
BAB VI. PUSATKAN PENGALAMAN PEMILIH.....	96
➤ Memahami Kemampuan, Sikap, dan Kecenderungan Pemilih di Kepulauan Terpencil.....	96
➤ Menyesuaikan Materi Edukasi Sesuai Kebutuhan dan Konteks Pemilih	100
BAB VII. PENYAMPAIAN INFORMASI YANG JELAS DAN TERSTRUKTUR.....	104
➤ Penyampaian Informasi yang Jelas dan Terstruktur.....	104
➤ Bahasa Sederhana dan Desain Visual yang Mudah Dipahami	108
➤ Uji Materi dengan Audiens untuk Efektivitas Komunikasi.....	110
BAB VIII. EDUKASI HAK DAN PROSES PEMILU....	113
➤ Edukasi Hak dan Proses Pemilu	113
➤ Informasi tentang Hak Suara, Cara Registrasi, dan Mekanisme Pemungutan Suara	113

BAB IX. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN LITERASI POLITIK.....	119
➤ Pendidikan Kewarganegaraan dan Literasi Politik	119
➤ Pemahaman Sistem Politik dan Peran Lembaga Negara	119
➤ Nilai Demokrasi, Kesetaraan, dan Tanggung Jawab Warga Negara.....	121
➤ Keterampilan Berpikir Kritis dan Analisis Informasi Politik	123
 BAB X. PENDEKATAN INKLUSIF DAN SENSITIF GENDER	 126
➤ Pendekatan Inklusif dan Sensitif Gender	126
➤ Mendorong Partisipasi Aktif Semua Lapisan Masyarakat	131
 BAB XI. STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS DI KEPULAUAN TERPENCIL.....	 134
➤ Kolaborasi Antara Pemerintah, LSM, dan Media Lokal	134
➤ Pemanfaatan Teknologi Digital dan Media Sosial yang Adaptif	136
➤ Program Pelatihan bagi Petugas Pemilu dan Fasilitator Edukasi.....	137
➤ Dampak dan Manfaat Edukasi Pemilih Cerdas di Kepulauan Terpencil.....	139

BAB XII. MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS UNTUK PEMILU DI PULAU-PULAU TERPENCIL	145
BAB XIII. MEMBANGUN DEMOKRASI KEPULAUAN YANG CERDAS DI MALUKU UTARA.....	164
BAB XIV. PENUTUP	176
DAFTAR PUSTAKA	187
BIODATA PENULIS	204

Prolog

DEMOKRASI KEPULAUAN POLITIK YANG TIMPANG

Konsep Demokrasi Kepulauan merujuk pada praktik dan tantangan demokrasi yang unik di negara-negara pulau kecil, terutama di wilayah Pasifik dan Karibia, meskipun istilah ini juga digunakan secara metaforis untuk merujuk pada kasus seperti Kyrgyzstan sebagai 'Pulau Demokrasi' di Asia Tengah (Levitin, 2004; Anderson, 2013; Laruelle, 2015). Secara harfiah, negara-negara pulau kecil (Small Island States/SIS) seringkali menunjukkan tingkat demokrasi yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang lainnya, sebuah fenomena yang memicu pertanyaan "Mengapa negara-negara pulau kecil berdemokrasi?" (Anckar, 2002). Analisis ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana sifat kepulauan dan keterisolasian, baik geografis maupun structural, telah menciptakan bentuk demokrasi yang, meskipun ada, seringkali timpang atau memiliki kelemahan struktural yang signifikan.

Paradoks Demokrasi di Negara-Negara Pulau Kecil (SIS)

Negara-negara pulau kecil telah lama menjadi subjek studi karena tingginya prevalensi rezim demokratis di antaranya, berlawanan dengan ekspektasi teoritis yang sering mengaitkan keberhasilan demokrasi dengan ukuran negara yang besar dan tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi (Anckar, 2002). Kekuatan demokrasi

di SIS, khususnya di Pasifik, dijelaskan sebagian melalui kekhasan masyarakat dan struktur politiknya.

Salah satu argumen kunci mengenai mengapa SIS berhasil berdemokrasi adalah ukuran mereka yang kecil. Skala yang kecil memfasilitasi bentuk-bentuk demokrasi langsung atau semi-langsung (Anckar, 2004). Selain itu, masyarakat SIS sering dicirikan oleh kohesi sosial dan praktik musyawarah tradisional yang, meskipun tidak selalu sepenuhnya egaliter, menyediakan dasar budaya untuk pengambilan keputusan kolektif (Corbett, 2015; Sykes, 2014). Contohnya, di Pulau-Pulau Pasifik, kepemimpinan dan politik sering kali terkait dengan identitas klan atau komunal, menciptakan bentuk demokrasi inter-klan yang inovatif, seperti di Papua Nugini (Sykes, 2014; Corbett, 2015).

Namun, sifat demokrasi ini tidak selalu linier atau Western-sentris. Ada perdebatan mengenai penafsiran narasi demokrasi di Pasifik, di mana praktik demokrasi seringkali diwarnai oleh konteks budaya lokal, menghasilkan "makna yang diperebutkan" (*contested meanings*) (Corbett, 2013; Corbett, 2015). Pengaruh kolonial yang membawa institusi Westminster juga memainkan peran, meskipun hasil akhirnya adalah hibrida unik.

Meskipun demikian, kecilnya ukuran juga membawa kerentanan yang inheren (Buker, 2020). Struktur kelembagaan di negara-negara pulau kecil menghadapi tantangan unik. Salah satunya adalah isu fungsionalitas parlemen di negara-negara yang sangat kecil seperti Tuvalu dan Nauru (Paeniu, 2012). Skala kecil dapat memperbesar dampak dari faksi politik dan persaingan

elit, mengarah pada ketidakstabilan pemerintahan meskipun ada komitmen formal terhadap demokrasi.

Isu amandemen konstitusional juga menjadi perhatian, di mana meskipun mekanisme formal ada, ketersediaan sumber daya dan kecilnya sistem politik dapat memengaruhi proses perubahan konstitusi di negara-negara demokrasi pulau kecil (Anckar, 2012). Selain itu, upaya untuk memodernisasi dan memperkuat demokrasi melalui teknologi, seperti *e-government* dan *e-democracy*, menghadapi hambatan infrastruktur dan kapasitas di negara-negara pulau Pasifik (Finau, 2014; Cullen, 2017).

Keterisolasian: Bentuk Nyata Demokrasi yang Timpang

Asumsi bahwa kepulauan secara otomatis menghasilkan demokrasi yang kuat adalah mitos yang harus diuji. Keterisolasian, baik geografis, ekonomi, maupun informasi telah menciptakan kelemahan struktural yang membuat demokrasi di negara-negara pulau sering kali timpang. Keterisolasian geografis berarti SIS sering kali memiliki basis ekonomi yang sempit, terbatas pada sektor-sektor seperti pariwisata, perikanan, atau pertanian subsisten, membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan ekonomi pada bantuan luar negeri atau remitansi dapat merusak kedaulatan demokratis. Donor internasional dan negara-negara besar dapat secara tidak langsung memengaruhi kebijakan domestik, menciptakan demokrasi yang dibatasi secara finansial dan strategis (Corbett, 2015).

Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi kepulauan di Pasifik sangat rentan terhadap kudeta atau gejolak

politik, seperti yang berulang kali terjadi di Fiji (Singh, 2006; Gounder, 2010). Kerentanan ini timbul dari ketegangan etnis, seperti yang diamati di Taiwan (Wanek, 2012), atau dari persaingan elite yang diperkuat oleh ukuran negara yang kecil. Studi kasus Afrika juga menunjukkan bahwa transisi menuju demokrasi di pulau-pulau kecil Afrika dapat disertai dengan ketidakstabilan sistem partai (Sanches, 2020). Keterisolasian juga berarti bahwa masalah internal seringkali diperburuk oleh kurangnya sumber daya untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan pembangunan. Misalnya, masalah dukungan terhadap demokrasi di Kepulauan Fiji menunjukkan pentingnya faktor seperti pendidikan dalam memperkuat pondasi demokrasi (Gounder, 2010). Demokrasi menjadi timpang ketika janji-janji kesetaraan politik tidak dapat dipenuhi oleh realitas ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang diperparah oleh isolasi.

Aspek kritis dari keterisolasian yang menghasilkan ketimpangan adalah terbatasnya akses terhadap informasi dan media independen. Meskipun media memiliki peran dalam demokrasi, studi kasus di Fiji, Tonga, dan Kepulauan Solomon menunjukkan bagaimana hubungan antara politik, demokrasi, dan media di Pasifik sangat kompleks dan seringkali bermasalah (Singh, 2006). Dalam masyarakat yang lebih kecil dan terisolasi, media cenderung lebih mudah dipengaruhi atau dikendalikan oleh elit politik, membatasi ruang publik untuk debat kritis dan akuntabilitas. Inisiatif *e-democracy* dapat membantu (Finau, 2014), namun digitalisasi saja tidak mengatasi akar masalah dari kontrol media tradisional.

Konsep 'Pulau Demokrasi' juga digunakan untuk menggambarkan kasus seperti Kyrgyzstan di Asia Tengah, sebuah negara yang sering digambarkan sebagai pengecualian demokrasi di kawasan yang didominasi oleh rezim otoriter (Levitin, 2004; Anderson, 2013). Namun, pengalaman Kyrgyzstan menunjukkan bahwa 'isolasi' politik di kawasan yang bermusuhan juga dapat menciptakan demokrasi yang timpang dan rapuh. Awalnya dipuji sebagai mercusuar reformasi (Levitin, 2004), Kyrgyzstan telah berjuang dengan ketidakstabilan, kekerasan, dan korupsi. Laruelle (2015) menunjukkan bahwa realitas di Kyrgyzstan jauh melampaui dikotomi sederhana 'Pulau Demokrasi' versus 'Negara Gagal', mencerminkan perubahan sosial dan politik pasca-Soviet yang kompleks. Isolasi geografis dan politik dari model-model demokrasi yang mapan, dikombinasikan dengan tantangan transisi domestik, membuat demokrasi Kyrgyzstan secara inheren lemah dan rentan terhadap kemunduran

Mengatasi Ketimpangan Demokrasi

Untuk mengatasi ketimpangan yang disebabkan oleh keterisolasian, diperlukan pendekatan multi-sektor. Salah satu pelajaran penting adalah kebutuhan akan institusi yang lebih kuat dan adaptif (Makita, 2023). Hal ini termasuk mekanisme yang efektif untuk amandemen konstitusi (Anckar, 2012) dan peningkatan fungsionalitas parlemen (Paeniu, 2012). Ada juga seruan untuk mengadopsi bentuk-bentuk demokrasi yang lebih selaras dengan budaya lokal, bergerak menuju 'demokrasi

budaya' dalam pendidikan dan penelitian, seperti yang dianjurkan untuk kawasan Pasifik (Thaman, 2013).

Di era digital, keterisolasian informasi dapat diperangi dengan penguatan media layanan publik sebagai 'Pulau Kepercayaan' (*Islands of Trust*) di ruang publik digital (Rodríguez-Castro, 2024). Demokrasi yang timpang tidak hanya disebabkan oleh ketidakstabilan politik, tetapi juga oleh erosi kepercayaan publik. Meningkatkan akses dan kualitas *e-government* juga dapat membantu memperkuat akuntabilitas dan lembaga keadilan (Cullen, 2017). Tantangan yang dihadapi oleh Demokrasi Kepulauan harus dilihat dalam konteks global yang lebih luas, termasuk meningkatnya xenofobia dan populisme, yang dapat mengancam bahkan demokrasi yang mapan sekalipun (Smith, 2020). Solusi yang efektif harus mengenali bahwa 'pulau-pulau demokrasi' ini, baik secara harfiah maupun metaforis, memerlukan dukungan eksternal yang bijaksana, yang memprioritaskan pemberdayaan sosial dan pembangunan berkelanjutan (Buker, 2020), seperti yang terlihat dalam pergeseran menuju konsep energi pulau yang terdesentralisasi di Yunani dan Spanyol (Tsagkari, 2021; Tsagkari, 2022).

Gagasan Demokrasi Kepulauan menyajikan kontradiksi yang menarik. Meskipun ukuran kecil dan kohesi sosial dapat menjadi lahan subur bagi bentuk-bentuk pemerintahan yang partisipatif (Anckar, 2004), keterisolasian, terutama dalam dimensi ekonomi, informasi, dan kerentanan politik, dengan efektif menciptakan demokrasi yang timpang. Demokrasi ini sering kali ada di atas fondasi yang rapuh, mudah digoyahkan oleh kepentingan elit domestik atau tekanan

eksternal, menjadikan janji-janji idealnya sulit dicapai di tengah kenyataan geografis dan struktural yang menantang. Kekurangan ini menegaskan perlunya analisis yang lebih kritis dan berbasis kontekstual terhadap demokrasi di negara-negara pulau, menghindari narasi yang terlalu optimis dan berfokus pada kerentanan yang inheren dalam keterisolasian (Veenendaal, 2020).

Mempertimbangkan kontradiksi yang melekat pada gagasan Demokrasi Kepulauan, di mana kohesi sosial berhadapan dengan kerentanan struktural dan keterisolasian ekonomi-politik, dari analisis kritis harus bergeser dari idealisme normatif menuju realitas implementasi praktis. Kesenjangan antara janji ideal demokrasi dan kenyataan rapuh yang diakibatkan oleh hambatan geografis dan elite ini paling kentara terlihat dalam pelaksanaan proses elektoral, yang berfungsi sebagai penentu utama legitimasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, untuk memahami sifat demokrasi yang "timpang" ini, perlu dikaji secara mendalam bagaimana kerentanan ini memanifestasikan dirinya dalam Dinamika Elektoral di Wilayah Kepulauan, khususnya dalam mengatasi tantangan logistik, disparitas infrastruktur, dan interaksi unik antara proses pemilu formal dengan kekhasan sosial-politik lokal yang terfragmentasi.

Dinamika Elektoral di Wilayah Kepulauan

Kepulauan, dengan karakteristik geografisnya yang terfragmentasi dan seringkali terisolasi, secara intrinsik menghadirkan medan yang unik dan kompleks untuk pelaksanaan proses pemilihan umum. Berdasarkan telaah

literatur akademik yang komprehensif, mulai dari studi kasus di Pasifik hingga di kawasan Atlantik Utara, dapat ditarik benang merah tentang tantangan, praktik lokal, dan implikasi tata kelola elektoral di wilayah berkepulauan. Haas (1969) dalam analisisnya tentang Pemilihan Umum di Kepulauan Cook tahun 1968, menyiratkan bahwa kemerdekaan internal, atau dalam konteks yang lebih luas, otonomi politik tidak secara otomatis menjamin proses elektoral yang mulus, terutama dalam menghadapi dinamika lokal pasca-pemerintahan mandiri. Tantangan logistik, disparitas infrastruktur, dan kekhasan sosial-budaya di pulau-pulau terpisah membentuk labirin yang harus diurai oleh setiap penyelenggara pemilu.

Eksplorasi tiga sub-topik utama, hambatan geografis dan infrastruktur dalam logistik pemilu, peran kearifan lokal dan dinamika sosial-politik dalam partisipasi pemilih, serta implikasi hasil pemilu terhadap tata kelola dan transisi politik di wilayah kepulauan. Seluruh pembahasan ini akan disajikan secara kritis dan ilmiah, menghindari penomoran atau *bullet point* untuk menjaga koherensi naratif dan kepadatan substansi.

Karakteristik kepulauan, seperti yang diidentifikasi oleh Ketua KPU RI terkait Pemilu 2024 di Maluku, di mana lebih dari sebagian besar wilayah berupa laut dengan infrastruktur pendukung yang terbatas, menjadi penghalang utama dalam penyelenggaraan pemilu yang efisien dan adil. Distribusi logistik pemilu, mulai dari surat suara, kotak, hingga perlengkapan lainnya, menjadi pekerjaan rumah yang menantang. Berbeda dengan wilayah daratan yang mengandalkan jalur transportasi

yang relatif stabil, wilayah kepulauan sering kali harus bergantung pada moda transportasi laut atau udara yang mahal, rentan terhadap cuaca buruk, dan terbatas frekuensinya. Tantangan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan isu substantif yang dapat mengancam integritas proses pemilu. Ketersediaan infrastruktur komunikasi juga menjadi kendala. Penerapan sistem informasi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi, meskipun dimaksudkan untuk transparansi dan kecepatan, dapat terhambat oleh koneksi internet yang tidak merata di pulau-pulau terpencil, seperti yang dihadapi di Kepulauan Riau saat mengantisipasi Pemilu 2024.

Bahkan di negara-negara maju, seperti yang diamati Masterson (1980) dalam pemilihan dewan komunitas di Orkney dan Shetland Islands, keterpencilan geografis memengaruhi struktur administrasi dan pelaksanaan elektoral. Di Kepulauan Solomon, Fraenkel (2006) dan Alasia (2007) menyoroti bahwa Pemilu 2006, terutama dalam konteks pasca-RAMSI yang dipengaruhi oleh tantangan logistik dan keamanan di wilayah yang tersebar. Masalah logistik ini pada akhirnya berpotensi memicu ketidakpercayaan, distorsi suara, atau bahkan kerusakan pasca-pemilu, sebagaimana terlihat dari insiden kerusakan pasca-pemilu 2006 di Solomon Islands yang dianalisis Atkinson (2009, 2010), menunjukkan bahwa kerentanan infrastruktur berkontribusi pada ketidakstabilan pasca-elektoral. Untuk mengatasi ini, perlunya perbaikan tata kelola pemilu yang secara eksplisit mengakomodasi wilayah berciri kepulauan, dengan aturan yang menyelaraskan tantangan geografis

seperti yang disarankan dalam studi kasus Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru, merupakan keharusan untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses setara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terlepas dari keterpencilan lokasi mereka.

Masyarakat kepulauan seringkali memiliki struktur sosial yang kental dan kearifan lokal yang kuat, yang secara signifikan membentuk perilaku dan partisipasi pemilih. Premdas (1981, 1995) secara konsisten menunjukkan di Solomon Islands, dinamika lokal, termasuk konflik antaretnis dan loyalitas tradisional sangat memengaruhi hasil pemilu dan transisi politik pasca-kemerdekaan. Contoh paling ekstrem dari adaptasi kearifan lokal adalah penerapan sistem Noken atau Ikat di beberapa wilayah adat di Papua, yang merupakan pengejawantahan pengakuan negara terhadap hak konstitusi masyarakat adat, di mana suara diwakili oleh kepala suku (*big man*) berdasarkan musyawarah, meskipun praktik ini menimbulkan diskursus mengenai kesesuaiannya dengan prinsip *one person, one vote* seperti yang dikaji dalam konteks hak pilih masyarakat adat Indonesia.

Di Fiji, Tuimaleali'Ifano (2000) membahas konsep *Veiqati Vaka Viti* dalam Pemilu 1999, yang menunjukkan bagaimana ikatan tradisional dan komunal memengaruhi pilihan politik, menyiratkan bahwa perilaku memilih dipengaruhi oleh faktor komunal, psikologis, dan afiliasi kandidat, bukan hanya rasionalitas individu. Hal ini sejalan dengan temuan Steeves (2011) tentang 'politik tak terbatas' (*unbounded politics*) di Solomon Islands, di mana pemilihan didorong oleh hubungan pribadi dan jaringan

alih-alih ideologi partai formal. Tantangan partisipasi pemilih juga terlihat di pulau-pulau terpencil Indonesia, di mana kendala seperti akses informasi dan rendahnya kesadaran politik menghambat partisipasi, meskipun pelibatan tokoh adat dan pemanfaatan teknologi diidentifikasi sebagai peluang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, seperti yang diteliti Fauzy (2024). Di belahan dunia lain, Filindra (2013) mengamati dampak transisi etnis di Providence, Rhode Island, dengan pemilihan walikota Latino pertama, menunjukkan bahwa faktor etnis dan transisi populasi menjadi variabel krusial yang perlu dipertimbangkan dalam studi elektoral di wilayah berciri kepulauan atau terisolasi. Oleh karena itu, keberhasilan pemilu di kepulauan sangat bergantung pada kemampuan sistem elektoral untuk bersinergi dengan struktur kekuasaan tradisional dan dinamika sosial yang ada, bukan sekadar memaksakan model demokrasi universal, sambil tetap menjamin prinsip non-diskriminasi, seperti yang diatur dalam UU Indonesia tentang hak pilih disabilitas.

Hasil dari pemilihan umum di wilayah kepulauan seringkali memiliki implikasi yang mendalam dan unik terhadap tata kelola dan stabilitas politik. Phillips (1995) membahas Jerman, meskipun bukan negara kepulauan, sebagai "Pulau Stabilitas" partai politik, yang secara kontras menyoroti kerentanan sistem politik di pulau-pulau kecil terhadap perubahan dan fragmentasi. Pemilu di wilayah kepulauan dapat menjadi pemicu transisi politik yang signifikan, baik menuju otonomi yang lebih besar, seperti yang diamati oleh Phetres (1983) di Northern Mariana Islands, atau menuju tantangan atas

identitas nasional, seperti diskursus 'secessionism demokratis' di Greenland pasca-pemilu Inatsisartut yang dianalisis Maffei (2022). Di Kanada, Stewart (1986) meneliti peran federalisme dan hubungan antara tingkat pemerintahan dalam pemilu provinsi di Prince Edward Island, menunjukkan bagaimana pemilu di pulau kecil terintegrasi dalam kerangka politik nasional yang lebih besar.

Wood (2015, 2025) secara spesifik membahas pemilihan parlemen di Solomon Islands pada tahun 2014 dan 2024, menggarisbawahi bagaimana pemilu ini berfungsi sebagai termometer bagi politik domestik dan geopolitik yang lebih luas, terutama dalam konteks peran aktor eksternal. Di sisi lain, isu representasi perempuan dalam politik di Solomon Islands, yang dikaji Baker (2018), menunjukkan bahwa meskipun proses elektoral berjalan, tantangan gender tetap menjadi hambatan struktural yang memerlukan solusi yang lebih dari sekadar proses pemilihan formal. Lebih lanjut, Arter (2022) mempertanyakan apakah pemilihan di Åland Islands yang otonom lebih mengutamakan representasi personal atau partai, yang menunjukkan perdebatan mendasar tentang kualitas demokrasi di wilayah kecil dan otonom. Bahkan, untuk wilayah negara kepulauan seperti Indonesia, Busroh (2023) mengemukakan ide 'rotasi pulau' sebagai konsep pemilu yang adil bagi kepala negara, menyiratkan bahwa tantangan geografis dapat memicu proposal radikal untuk menyeimbangkan representasi dan kekuasaan antarwilayah kepulauan.

Pemilu di kepulauan dengan segala kerumitan logistik dan dinamika sosialnya, bukan hanya sekadar

mekanisme pergantian kekuasaan, melainkan suatu titik kritis yang menguji ketahanan institusi demokrasi dan menentukan arah tata kelola lokal, otonomi, dan hubungan dengan pusat kekuasaan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemilu harus terus dievaluasi dan disempurnakan, seperti yang dicontohkan oleh Bernardo (2024) dalam studi simulasi in-person voting di Rhode Island terkait COVID-19, untuk memastikan proses yang adil dan dapat diakses oleh semua warga negara kepulauan, sehingga tidak ada 'koalisi yang merupakan sebuah pulau' dan terisolasi dari proses demokrasi yang lebih besar, seperti yang dihipotesiskan Škvrňák (2025) mengenai koalisi pra-pemilihan.

Mendalami Kompleksitas Elektoral Kepulauan

Kelanjutan analisis ini akan memperdalam studi kasus dan kerangka teoritis di sekitar pemilu kepulauan, dengan fokus pada tantangan dalam mengatasi praktik kecurangan atau politik uang, peran identitas dalam perilaku memilih, dan upaya untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan berkelanjutan di tengah kerentanan geografis. Meskipun konteks "Kepulauan Hamnatan" tidak ditemukan dalam data eksplisit, esensi dari tantangan elektoral di wilayah ini dapat ditarik dari koleksi studi kasus yang ada, yang mencakup berbagai kepulauan di Pasifik, Eropa Utara, dan Karibia. Dengan demikian, "Hamnatan" dapat berfungsi sebagai model representatif dari wilayah kepulauan yang bergulat dengan isu-isu demokrasi dan tata kelola, sebuah entitas

teoretis yang mewarisi tantangan dari Maluku, Solomon Islands, Rhode Island, dan pulau-pulau lainnya.

Mengatasi Integritas Pemilu

Integritas pemilu sering kali lebih rentan di wilayah kepulauan karena kombinasi keterpencilan, keterbatasan pengawasan, dan dominasi struktur kekuasaan lokal yang kuat. Risiko politik uang (*money politics*) dan kecurangan lainnya merupakan ancaman nyata yang harus diantisipasi, sebagaimana terlihat dalam konteks Indonesia secara umum, yang menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut cenderung mendominasi. Keterbatasan akses dan biaya tinggi untuk mencapai pulau-pulau terpencil menyulitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan yang intensif dan merata, membuka celah bagi pelanggaran. Fenomena ini diperparah oleh kedekatan hubungan antara pemilih dan kandidat di komunitas pulau kecil, di mana faktor psikologis dan komunal seringkali lebih berpengaruh daripada platform ideologis, seperti yang disoroti oleh Masterson (1980) di Skotlandia dan Premdas (1981, 1995) di Kepulauan Solomon.

Ketergantungan ekonomi masyarakat pulau terhadap jaringan politik atau figur otoritatif lokal juga dapat menjadi alat untuk memobilisasi suara melalui imbalan atau tekanan, yang secara substansial mengurangi konsep kebebasan memilih yang dijamin oleh asas pemilu. Raglon (2002) meneliti peran lingkungan dan *e-forums* dalam pemilu di British Columbia Gulf Island, menunjukkan bahwa meskipun isu-isu modern dan teknologi muncul, dinamika lokal tetap menjadi penentu.

Dalam konteks yang lebih kritis, Andrews (2007) membahas "pemilihan kulit hitam" dan politisasi ruang seremonial Afrika di Newport, Rhode Island, menunjukkan bagaimana pemilu di masa lalu dapat digunakan sebagai alat untuk menegaskan atau menantang kekuasaan dan identitas dalam ruang terbatas. Praktik *noken* di Papua, meskipun merupakan kearifan lokal yang diakui Mahkamah Konstitusi Indonesia, juga memunculkan kekhawatiran tentang potensi distorsi suara, di mana tetua adat atau "big man" memegang kuasa untuk mewakili banyak pemilih, sebuah praktik yang dapat disalahgunakan jika integritas moral para pemegang mandat diragukan. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, diperlukan upaya kolaboratif dan terstruktur.

Penerapan teknologi seperti SIREKAP, meskipun terkendala jaringan, dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan transparansi, tetapi harus didukung oleh pengawasan yang lebih kuat di lapangan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Diperlukan reformasi regulasi pemilu agar lebih sensitif terhadap konteks geografis kepulauan, dengan menciptakan aturan yang lebih mengakomodasi tantangan logistik dan meminimalkan peluang praktik curang, yang sejalan dengan saran perbaikan tata kelola Pemilu di daerah kepulauan. Pada akhirnya, integritas pemilu di kepulauan harus dibangun di atas kepercayaan publik, yang memerlukan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang intensif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran politik, seperti yang diupayakan KPU di Provinsi Riau, serta penegasan kembali pada hukum

untuk mencegah kejahatan pemilu seperti yang diamati Haryanti (2024) di Pulau Bintan.

Identitas dan Representasi dalam Pemilu Kepulauan

Isu identitas meliputi ras, etnis, gender, dan status disabilitas memainkan peran sentral dalam dinamika politik kepulauan, dan ini berhubungan langsung dengan prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* atau non-diskriminasi dalam pemilu. Populasi pulau seringkali memiliki komposisi etnis atau budaya yang unik, dan pemilu menjadi arena di mana kelompok-kelompok ini berjuang untuk representasi dan pengakuan. Lopez (2021) mengkaji partisipasi pemilih di antara Puerto Riko yang lahir di pulau dan yang lahir di daratan AS dalam Pemilu Kongres 2018, menyoroti bagaimana latar belakang geografis dapat menjadi penentu perilaku memilih dan identitas politik, terutama pasca-bencana seperti Badai Maria. Di Fiji, konflik etnis antara masyarakat *Veiqati Vaka Viti* dan kelompok etnis lainnya telah menjadi isu yang berulang dalam pemilu, memengaruhi stabilitas politik dan hasil elektoral.

Demikian pula, isu gender dalam representasi politik menjadi tantangan universal yang diperburuk oleh struktur patriarki yang kuat di banyak komunitas kepulauan, seperti yang disoroti oleh Baker (2018) di Solomon Islands, di mana perempuan menghadapi hambatan budaya dan politik yang jauh lebih besar untuk mencalonkan diri dan terpilih dibandingkan rekan pria mereka. Inklusivitas pemilu juga harus diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjamin hak politik penyandang disabilitas, yang sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) internasional. Namun, hambatan fisik (seperti akses ke TPS yang tidak ramah disabilitas) dan hambatan informasi (kurangnya materi sosialisasi yang dapat diakses) menjadi tantangan nyata di lapangan, seperti yang dibahas dalam konteks Pemilu di Desa Kerandon (2025). Penerapan prinsip non-diskriminasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah kepulauan menjadi sangat krusial, mengingat disparitas infrastruktur yang lebih besar. Solusi untuk meningkatkan inklusivitas meliputi penyediaan fasilitas yang aksesibel, penyederhanaan prosedur administrasi pemilu, dan sosialisasi yang inklusif untuk semua jenis disabilitas. Dengan demikian, pemilu di kepulauan harus berupaya melampaui hambatan geografis dan infrastruktur untuk mengatasi hambatan struktural yang berakar pada identitas dan diskriminasi, memastikan bahwa "setiap warga negara yang telah dewasa memiliki hak untuk memilih tanpa diskriminasi," sebuah prinsip yang mendasari demokrasi yang sehat.

Masa depan tata kelola dan keberlanjutan demokrasi di wilayah kepulauan bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan proses elektoral formal dengan realitas geografis dan sosial-budaya setempat. Dari studi kasus global, jelas bahwa tidak ada satu model demokrasi yang cocok untuk semua. Konsep rotasi pulau untuk pemilihan kepala negara di Indonesia, yang diajukan Busroh (2023), mencerminkan upaya untuk memikirkan ulang desain elektoral untuk mengakomodasi keragaman dan disparitas antar-pulau. Di Åland Islands, Arter (2022)

mengamati perdebatan antara representasi personal dan partai, yang menunjukkan bahwa di komunitas kecil, ikatan personal dengan kandidat seringkali lebih penting daripada afiliasi partai, sebuah dinamika yang juga dominan di Pasifik (Steeves, 2011). Tantangan terbesar adalah menciptakan sistem yang secara simultan menghormati kearifan lokal—seperti musyawarah adat—sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal demokrasi, seperti kesetaraan suara dan non-diskriminasi.

Transisi politik di kepulauan juga dapat dilihat dari kacamata geopolitik, di mana aktor eksternal sering memiliki kepentingan yang signifikan. Konflik pasca-pemilu, seperti yang disorot oleh Atkinson (2009, 2010) di Solomon Islands terkait peran Australia dan Taiwan, menunjukkan bahwa hasil elektoral di pulau-pulau kecil dapat memicu intervensi atau ketidakstabilan regional. Oleh karena itu, Wood (2025) melihat Pemilu 2024 di Solomon Islands sebagai 'Laut yang Baru dan Asing,' di mana politik domestik dan geopolitik saling berkelindan. Untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan, wilayah kepulauan perlu memperkuat institusi demokrasi mereka, meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu (KPU) di tingkat lokal, dan memberdayakan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk memastikan integritas proses, terutama dalam menghadapi praktik politik uang yang merajalela. Lebih jauh, seperti yang dicontohkan Ye (2025) dalam konteks kontrol tegangan dan daya reaktif di *Offshore Island AC Microgrids*, konsep 'Pemilihan Pemimpin Dinamis' menunjukkan bahwa model pemilihan yang responsif dan adaptif dapat menjadi kunci untuk mengelola sistem yang terfragmentasi. Pemilu di

Kepulauan Hamnatan, sebagai representasi dari tantangan ini, harus menjadi lokus di mana inovasi elektoral, kearifan lokal, dan prinsip-prinsip universal demokrasi bersatu untuk menciptakan sistem politik yang adil, inklusif, dan stabil, yang mampu menghadapi hambatan geografis dan dinamika sosial-politik yang kompleks.

Tiga pulau di Maluku Utara, Pulau Maitara (Kota Tidore Kepulauan), Pulau Kolorai (Kabupaten Pulau Morotai), dan Pulau Tolonuo (Kabupaten Halmahera Utara) secara nyata mengkristalisasi implikasi teoritis dari keterisolasian yang menghasilkan ketimpangan demokrasi dan ketidaksetaraan dalam konteks Demokrasi Kepulauan Indonesia. Keterisolasian geografis pulau-pulau kecil ini menciptakan biaya logistik dan informasi yang tinggi, mengganggu prinsip kesetaraan politik bagi warga negara. Secara teoritis, demokrasi menjanjikan partisipasi yang setara, namun dalam realitasnya ketiga pulau ini, keterbatasan infrastruktur seperti akses politik dan pembangunan yang memadai membuat warga di sana rentan terhadap manipulasi informasi, partisipasi elektoral yang rendah, serta kesulitan dalam memantau akuntabilitas elit lokal. Akibatnya, keterisolasian tidak hanya menjadi masalah infrastruktur, tetapi bertransformasi menjadi ketimpangan akses terhadap hak-hak politik dasar, menguatkan premis bahwa demokrasi di wilayah kepulauan berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Ketimpangan ini berlanjut pada dimensi kesetaraan sosio-ekonomi, yang berinteraksi secara resiprokal dengan kualitas demokrasi. Keterbatasan akses pembangunan dan

layanan publik, yang merupakan dampak langsung dari keterisolasian, di pulau-pulau seperti Maitara, Kolorai, dan Tolonuo memperburuk kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat. Dalam teori, ketimpangan yang tinggi cenderung mendistorsi proses demokrasi, karena kekuatan ekonomi seringkali dipegang oleh elit domestik yang mengendalikan jalur distribusi dan politik lokal dapat dengan mudah menerjemahkan pengaruh finansial mereka menjadi kekuatan politik yang tidak setara. Hal ini menciptakan lingkaran setan, keterisolasian menghasilkan ketimpangan ekonomi, ketimpangan ekonomi ini melemahkan kesetaraan partisipatif dengan membatasi pilihan politik warga (misalnya, melalui politik uang), yang pada gilirannya menghasilkan hasil elektoral yang menguntungkan elite yang sudah mapan. Model ini dengan sempurna menjelaskan mengapa janji ideal demokrasi sulit dicapai di tengah kenyataan struktural yang menantang di pulau-pulau terpencil Indonesia.

Implikasi teoritik paling nyata yang diilustrasikan oleh ketiga pulau ini adalah kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang konsep Demokrasi Kepulauan yang berbasis konteks alih-alih mengadopsi narasi universal yang optimis. Solusi struktural yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan demokrasi di pulau-pulau kecil ini tidak hanya tentang peningkatan indeks kebebasan sipil (aspek yang seringkali sudah 'sedang' atau 'baik'), tetapi tentang mengatasi hambatan materiil dan geografis yang mencegah warga menggunakan hak-hak tersebut secara efektif. Oleh karena itu, pengalaman Maitara, Kolorai, dan Tolonuo menuntut pergeseran fokus kebijakan, dari

menyelenggarakan pemilu formal menuju upaya sistematis untuk mengintegrasikan pulau-pulau terisolasi ke dalam jaringan ekonomi, informasi, dan tata kelola yang lebih luas. Tanpa investasi yang disengaja dalam mengatasi keterisolasian sebagai sumber utama ketimpangan, kualitas demokrasi dan kesetaraan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil akan tetap menjadi janji kosong yang mudah digoyahkan oleh kepentingan elite atau tekanan struktural. Demikian.

Referensi

Alasia, S. (2007). Rainbows across the mountains: The First Post-RAMSI general elections in Solomon Islands, April 2006, and the policies of the second sogavare government. *Journal of Pacific History*, 42(2), 165–186. <https://doi.org/10.1080/00223340701461635>

Alekseev, A. (2025). Freedom in Populist Radical Right Discourses: The Polish ‘Island of Freedom’ in the 2019 European Parliament Election. *International Spectator*, 60(1), 136–156. <https://doi.org/10.1080/03932729.2024.2412626>

Anckar, D. (2002). Why are small island states democracies? *Round Table*, (365), 375–390. <https://doi.org/10.1080/0035853022000010344>

Anckar, D. (2004). Direct democracy in microstates and small island states. *World Development*, 32(2), 379–390. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.08.003>

Anckar, D. (2012). Constitutional amendment methods in twenty one small island democracies. *Island Studies Journal*, 7(2), 259–270.

Anderson, J. (2013). *Kyrgyzstan: Central Asia's Island of democracy?* Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9781315079325>

Andrews, E. E. (2007). "Creatures of mimic and imitation": The liberty tree, black elections, and the politicization of African ceremonial space in revolutionary Newport, Rhode Island. *Radical History Review*, (99), 121–139. <https://doi.org/10.1215/01636545-2007-006>

Arter, D. (2022). Personal representation or party representation? Elections in the autonomous Åland Islands. *Regional and Federal Studies*, 32(4), 511–524. <https://doi.org/10.1080/13597566.2022.2047940>

Atkinson, J. (2009). Big trouble in Little Chinatown: Australia, Taiwan and the April 2006 post-election riot in Solomon Islands. *Pacific Affairs*, 82(1), 47–65. <https://doi.org/10.5509/200982147>

Atkinson, J. (2010). Big trouble in Little Chinatown: Australia, Taiwan and the April 2006 post-election riot in Solomon Islands. *Looking North Looking South China Taiwan and the South Pacific*, 163–188. https://doi.org/10.1142/9789814304399_0007

Baker, K. (2018). 'What did the winning candidate have that I don't have?': gender, politics and elections in Solomon Islands. *Commonwealth and Comparative Politics*, 56(4), 427–445. <https://doi.org/10.1080/14662043.2018.1517953>

Bernardo, N. D. (2024). COVID-19 and United States Election systems: a simulation study of in-person voting in Rhode Island. *Journal of Simulation*, 18(3), 331–340. <https://doi.org/10.1080/17477778.2022.2155258>

Buker, P. E. (2020). Democracy and social empowerment in small island jurisdictions. Dalam S. P. L. R. K. W. K. L. G. L. (Ed.), *Shaping the future of small islands roadmap for sustainable development* (hlm. 111–124). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4883-3_6

Busroh, F. F. (2023). The Fair Concept of Election of the Indonesian Head of State Based on Island Rotation. *Journal of Human Security*, 19(2), 38–43. <https://doi.org/10.12924/johs2023.19020005>

Corbett, J. (2013). Between crisis and persistence: Interpreting democracy narratives in the Pacific Islands. *Political Science*, 65(2), 198–215. <https://doi.org/10.1177/0032318713507208>

Corbett, J. (2015). *Being political: Leadership and democracy in the Pacific Islands*. University of Hawaii Press.

Corbett, J. (2015). Democracy in the Pacific Islands: Comparable practices, contested meanings. *Democratic Theory*, 2(2), 22–40. <https://doi.org/10.3167/dt.2015.020203>

Corrections to: “Smallness and Democracy in Pacific Island Countries From an Institutional Perspective,” (Social Science Quarterly, (2023), 104, (345–363), 10.1111/ssqu.13251). (2025). *Social Science Quarterly*, 106(3). <https://doi.org/10.1111/ssqu.70033>

Cullen, R. (2017). E-government in support of the institutions of democracy and justice in Pacific Island states. Dalam R. Cullen (Ed.), *Public administration and information technology* (Vol. 27, hlm. 171–207). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50972-3_7

Filindra, A. (2013). Anxieties of an Ethnic Transition: The Election of the First Latino Mayor in Providence,

Rhode Island. *Urban Affairs Review*, 49(1), 3–31.
<https://doi.org/10.1177/1078087412462449>

Finau, G. (2014). *Social media and e-democracy in Fiji, solomon islands and vanuatu*. 20th Americas Conference on Information Systems Amcis 2014.

Fraenkel, J. (2006). The impact of RAMSI on the 2006 elections in the Solomon Islands. *Political Science*, 58(2), 63–85. <https://doi.org/10.1177/003231870605800205>

Gounder, N. (2010). Support for democracy in the Fiji Islands: Does schooling matter? *International Journal of Social Economics*, 37(2), 136–149.
<https://doi.org/10.1108/03068291011007255>

Haas, A. (1969). Three Years After Internal Self-Government the Cook Islands General Election 1968. *Journal of Pacific History*, 4(1), 136–145.
<https://doi.org/10.1080/00223346908572152>

Haryanti, D. (2024). Legal Awareness of Bintan Island Coastal Communities In Preventing Election Crimes: Sociological Jurisprudence. *Bio Web of Conferences*, 134. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202413407008>

Kemeny, J. (1980). SAVING AMERICAN DEMOCRACY: THE LESSONS OF THREE MILE ISLAND. *Technology Review*, 83(7), 65–75.

Laruelle, M. (2015). *Kyrgyzstan beyond “democracy island” and “failing state”: Social and political changes in a post-Soviet society*. Lexington Books.
<https://doi.org/10.5040/9781666999204>

Levitin, L. (2004). Liberalization in Kyrgyzstan: ‘An Island of Democracy’. Dalam K. A. E. M. E. (Ed.), *Democracy and pluralism in Muslim Eurasia* (hlm. 187–213). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203009260-14>

Levitin, L. (2004). Liberalization in Kyrgyzstan: 'An Island of democracy'. Dalam K. A. E. M. E. (Ed.), *Democracy and pluralism in Muslim Eurasia* (hlm. 187–213). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203009260>

Lopez, M. H. (2021). Voter Registration and Turnout among Island-Born and MainlandBorn Puerto Ricans in the 2018 U.S. Congressional Elections. *Hurricane Maria in Puerto Rico Disaster Vulnerability and Resiliency*, 143–151.

Maffei, D. N. (2022). Greenland's 'environmental' choice: what future for the island's democratic secessionism? Reflections on the margins of the Inatsisartut early elections. *Federalismi It*, 2022(5), 128–173.

Makita, J. (2023). Smallness and democracy in Pacific island countries from an institutional perspective. *Social Science Quarterly*, 104(3), 345–363. <https://doi.org/10.1111/ssqu.13251>

Masterson, M. (1980). Elections to the Second Generation of Community Councils — The Orkney and Shetland Islands, Lochaber, West Lothian and Berwickshire. *Local Government Studies*, 6(1), 63–82. <https://doi.org/10.1080/03003938008432838>

Mayo, P. (2013). Social democracy in a postcolonial island state: Dom mintoff's impact. *Socialism and Democracy*, 27(2), 130–139. <https://doi.org/10.1080/08854300.2012.759743>

Mourier, P. (2025). From the “Island of Garbage” to Dark Maga: The Resurgence of a Masculinist Alt-Right in the 2024 Election?. *Journal of Transnational American Studies*, 16(1), 35–38. <https://doi.org/10.5070/T8.47927>

Paeniu, L. (2012). How can parliamentary democracy function more effectively in small Pacific Island countries

such as Tuvalu and Nauru? *Journal of South Pacific Law*, 2012(2), 6–19.

Phetres, S. (1983). Elections in the Northern Mariana Islands. *Political Science*, 35(1), 103–116. <https://doi.org/10.1177/003231878303500107>

Phillips, A. L. (1995). An Island of Stability? The German Political Party System and the Elections of 1994. *West European Politics*, 18(3), 219–229. <https://doi.org/10.1080/01402389508425100>

Premdas, R. (1981). Current Developments in the Pacific the Solomon Islands: First Elections After Independence. *Journal of Pacific History*, 16(4), 190–202. <https://doi.org/10.1080/00223348108572427>

Premdas, R. R. (1995). The solomon islands in transition: Aspects of the 1993 elections. *Round Table*, 84(333), 33–52. <https://doi.org/10.1080/00358539508454236>

Raglon, R. (2002). All (green) talk and no action: Environmentalism, E-forums, and elections on a British Columbia Gulf Island. *Environments*, 30(1), 1–16.

Rodríguez-Castro, M. (2024). Public Value and Liberal Democracies: The Potential of Public Service Media as Islands of Trust in the Digital Public Sphere. Dalam R. P. P. C. (Ed.), *Media influence on opinion change and democracy how private public and social media organizations shape public opinion* (hlm. 83–98). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70231-0_6

Sanches, E. R. (2020). Transitions to democracy, institutional choices and party system stability: lessons from small African islands. *Journal of Contemporary African Studies*, 38(2), 186–204. <https://doi.org/10.1080/02589001.2020.1774048>

Singh, S. (2006). Politics, democracy and the media: Case studies in Fiji, Tonga and the Solomon Islands. *Pacific Journalism Review*, 12(2), 67–85. <https://doi.org/10.24135/pjr.v12i2.863>

Škvrňák, M. (2025). No coalition is an island: how pre-electoral coalitions at the national-level shape local elections. *Local Government Studies*, 51(5), 890–917. <https://doi.org/10.1080/03003930.2024.2425751>

Smith, R. M. (2020). Islands in the churning stream: Analyzing xenophobia and democracy in the twenty-first century. *American Political Thought*, 9(3), 453–460. <https://doi.org/10.1086/709520>

Steeves, J. (2011). 'Unbounded politics' and the democratic model in solomon islands: The 2010 national elections. *Commonwealth and Comparative Politics*, 49(3), 342–358. <https://doi.org/10.1080/14662043.2011.582733>

Stewart, I. (1986). Friends at court: Federalism and provincial elections on prince Edward Island. *Canadian Journal of Political Science*, 19(1), 127–150. <https://doi.org/10.1017/S0008423900058029>

Sykes, K. (2014). 'Adopting an obligation': Innovative forms of inter-clan democracy in the Islands Region of Papua New Guinea. *Journal of Classical Sociology*, 14(1), 110–121. <https://doi.org/10.1177/1468795X13494723>

Thaman, K. H. (2013). Towards cultural democracy in university teaching and research with special reference to the Pacific island region. Dalam C. R. C. A. (Ed.), *Academic migration discipline knowledge and pedagogical practice voices from the Asia Pacific* (hlm. 53–62). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-4451-88-8_5

Tsagkari, M. (2021). "From local island energy to degrowth? Exploring democracy, self-sufficiency, and renewable energy production in Greece and Spain". *Energy Research and Social Science*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102288>

Tsagkari, M. (2022). Corrigendum to "From local island energy to degrowth? Exploring democracy, self-sufficiency, and renewable energy production in Greece and Spain" [Energy Research and Social Science Volume 81, November 2021, 102288] (*Energy Research & Social Science* (2021) 81, (S2214629621003819), (10.1016/j.erss.2021.102288)). *Energy Research and Social Science*, 87. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102483>

Tuimaleali'Ifano, M. (2000). Veiqati Vaka Viti and the Fiji Islands elections in 1999. *Journal of Pacific History*, 35(3), 253–267. <https://doi.org/10.1080/00223340020010553>

Veenendaal, W. (2020). Islands of democracy. *Area*, 52(1), 30–37. <https://doi.org/10.1111/area.12462>

Wanek, A. (2012). The Republic of China at a Crossroads? Processes of Democracy and Ethnic Identity on the Island of Taiwan. Dalam K. F. C. (Ed.), *Contesting good governance crosscultural perspectives on representation accountability and public space* (hlm. 163–206). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203037331-9>

Wood, T. (2015). The 2014 parliamentary elections in Solomon Islands. *Electoral Studies*, 39, 153–158. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.03.006>

Wood, T. (2025). A New and Unfamiliar Sea: Politics, Geopolitics and the 2024 General Elections in Solomon Islands. *Journal of Pacific History*. <https://doi.org/10.1080/00223344.2025.2553515>

Ye, X. (2025). Dynamic Leader Election and Model-Free Reinforcement Learning for Coordinated Voltage and Reactive Power Containment Control in Offshore Island AC Microgrids. *Journal of Marine Science and Engineering*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/jmse13081432>

BAB I.

SUARA DARI JANTUNG KEPULAUAN: KELUHAN PEMBANGUNAN DI MALUKU UTARA

Pemilihan umum di Indonesia selalu menjadi sorotan, terutama ketika pelaksanaannya dilakukan di wilayah kepulauan. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang unik, yakni terdiri dari banyak pulau yang terpisah oleh perairan, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri. Namun, di balik tantangan tersebut, masyarakat kepulauan tetap menunjukkan partisipasi aktif dalam setiap pesta demokrasi.

Salah satu tantangan utama adalah masalah logistik dan administratif. Pelaksanaan pemilu di daerah kepulauan sering kali menghadapi hambatan geografis yang signifikan. Transportasi logistik pemilu, seperti pendistribusian surat suara dan kotak suara, menjadi sangat rumit. Pulau-pulau yang terpencil dan akses yang terbatas memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Kendala ini tidak hanya berpotensi memperlambat proses pemilu, tetapi juga dapat memengaruhi akurasi dan integritas data (Hamzah, Liliweri, & Detak Pustaka, 2025: 182).

Selain itu, partisipasi politik masyarakat kepulauan juga menjadi hal yang menarik untuk diamati. Meskipun berada di wilayah yang terisolasi, masyarakat kepulauan memiliki kesadaran politik yang tinggi. Mereka aktif dalam mengikuti perkembangan politik, bahkan dalam konteks modern seperti pemilu tahun 2024 yang tidak lepas dari kebiasaan virtual akibat pandemi Covid-19. Bahkan, proses seleksi Badan Ad Hoc Pemilu menjadi momen penting bagi masyarakat Pulau dari Bawean untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu (Farinuddin, Ilwafa, & Al Ghiffari, 2024: 170).

Aktivitas politik di masyarakat kepulauan juga terkait erat dengan pembentukan identitas dan otonomi daerah. Contohnya, penduduk Pulau Berhala melaksanakan pemilu di bawah administrasi pemerintahan Kepulauan Riau dan Kepulauan Riau itu sendiri merupakan bagian dari Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak politik, sejak pemilu mulai dilakukan, telah menjadi bagian penting dalam menentukan arah pemerintahan dan aspirasi lokal (Triatmodjo, Merdekawati, & Pratama, 2022: 67). Pemilihan umum di tingkat lokal, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), juga memiliki dinamika yang khas di wilayah kepulauan. Di berbagai daerah kepulauan, pilkada merupakan ajang penting untuk memilih pemimpin yang dapat memahami dan mengatasi tantangan spesifik di wilayah tersebut. Misalnya,

pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2015 menjadi sorotan. Demikian juga dengan pilkada serentak di berbagai daerah lain, seperti Maluku Barat Daya (Agustri & Sijaya, 2021: 84).

Di sisi lain, pemilu di daerah kepulauan sering kali diwarnai oleh sengketa hasil. Tingkat perselisihan yang tinggi, baik di tingkat pilkada maupun pemilu legislatif, menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses atau hasil yang ada. Kasus-kasus perselisihan hasil pemilu kepala daerah, seperti yang terjadi di Kepulauan Yapen, menjadi bukti bahwa proses demokrasi di wilayah kepulauan tidak selalu berjalan mulus. Perselisihan ini sering kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian harus memutuskan berbagai kasus sengketa, termasuk yang melibatkan Pemilihan Gubernur di Maluku Utara pada tahun 2013 (Sardini, 2017: 309).

Meskipun demikian, ada upaya-upaya untuk membangun basis perjuangan baru melalui pemilu. Di Kepulauan Riau, misalnya, pemilu dipandang sebagai agenda penting untuk membangun basis perjuangan baru dalam perwujudan teknis Provinsi Kepri (Albintani, 2016: 30). Hal ini menunjukkan bahwa pemilu tidak hanya dilihat sebagai ritual demokrasi semata, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan pembangunan di tingkat lokal.

Dinamika politik di wilayah kepulauan juga menunjukkan peran penting pemilu dalam konsolidasi demokrasi pasca-Orde Baru. Pada Pemilu 2004, misalnya, pembentukan daerah pemilihan (DP) tidak lagi berbasis provinsi melainkan daerah yang lebih kecil, meskipun ada juga DP yang mencakup satu provinsi, termasuk Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau (Marijan, 2019: 77). Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia terus beradaptasi untuk mengakomodasi keberagaman geografis dan politik di seluruh wilayah, termasuk di daerah kepulauan.

Secara keseluruhan, pemilu di masyarakat kepulauan adalah sebuah fenomena yang kompleks, di mana tantangan geografis berhadapan dengan semangat partisipasi politik yang tinggi. Meskipun dihadapkan pada masalah logistik dan sengketa hasil, pemilu tetap menjadi sarana penting bagi masyarakat kepulauan untuk menyuarakan aspirasi, menentukan pemimpin, dan membangun masa depan daerah mereka. Melalui proses ini, masyarakat kepulauan terus berkontribusi pada konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Di tengah gugusan pulau-pulau yang tersebar luas di Provinsi Maluku Utara, terukir kisah-kisah perjuangan masyarakat yang hidup di pulau-pulau terpencil. Di balik panorama alam yang memukau, tersimpan serangkaian keluhan pembangunan yang mendesak, menuntut perhatian serius dari para pemimpin. Keterbatasan

geografis bukan sekadar jarak, melainkan jurang pemisah yang memperdalam ketidaksetaraan dalam akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi. Untuk memahami realitas ini, studi mendalam dilakukan dengan mendengarkan langsung suara dari penduduk tiga pulau kecil, yaitu Pulau Tolonuo, Desa Kolorai, dan Pulau Maitara. Dari wawancara dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan nelayan setempat, tergambar jelas potret utuh dari tantangan yang mereka hadapi.

Pulau Tolonuo: Perjuangan di Bawah Bayang-Bayang Keterbatasan

Di Pulau Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, kehidupan sehari-hari dilalui dengan kerja keras dan harapan akan perubahan. Wawancara dengan informan kunci seperti Adriati Umar, Novitasari Rahim, Bahita Kurung, Budi Anto, Ajhar Kurung, Musifiin Barapa, Ikfan Peleger, dan Hartati La Ida mengungkapkan bahwa tantangan terbesar mereka berpusat pada infrastruktur dasar dan kesenjangan layanan publik.

Salah satu keluhan utama yang tak henti-hentinya disuarakan adalah soal listrik dan air bersih. Adriati Umar dan Novitasari Rahim menceritakan bagaimana listrik di pulau mereka masih sangat terbatas, seringkali hanya menyala beberapa jam saja di malam hari. Kondisi ini

bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menghambat kemajuan ekonomi. Para nelayan kesulitan menyimpan hasil tangkapan mereka, dan para pedagang kecil tidak bisa mengandalkan lemari pendingin. Anak-anak pun harus belajar dengan penerangan seadanya. Air bersih juga menjadi masalah kronis. Meskipun dikelilingi laut, air tawar adalah komoditas langka. Seringkali, warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih, sebuah pekerjaan yang berat dan memakan waktu. Mereka sangat berharap janji-janji kampanye untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau sumur bor dapat segera terealisasi.

Di sisi lain, kualitas layanan kesehatan di Tolonuo jauh dari kata ideal. Budi Anto dan Bahita Kurung mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang minimnya tenaga medis profesional. Puskesmas di pulau itu hanya diisi oleh perawat dan bidan seadanya, tanpa kehadiran dokter yang menetap. Jika ada warga yang sakit parah, mereka terpaksa menyeberang ke Tobelo dengan biaya dan risiko yang tinggi, terutama saat cuaca buruk. Kondisi ini membuat mereka merasa terpinggirkan dari hak dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Selain itu, kualitas pendidikan juga menjadi sorotan. Ajhar Kurung dan Musifiin Barapa mengeluhkan kondisi sekolah yang terbatas. Mereka berharap para calon pemimpin dapat memberikan perhatian lebih pada pembangunan sekolah, penyediaan buku-buku yang

memadai, dan peningkatan kesejahteraan guru. Menurut mereka, pendidikan adalah satu-satunya jalan bagi anak-anak mereka untuk memiliki masa depan yang lebih cerah dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang telah mengakar.

Gambar 1.
Lokasi Pulau Tolonuo



Sumber : Citra Google Earth.

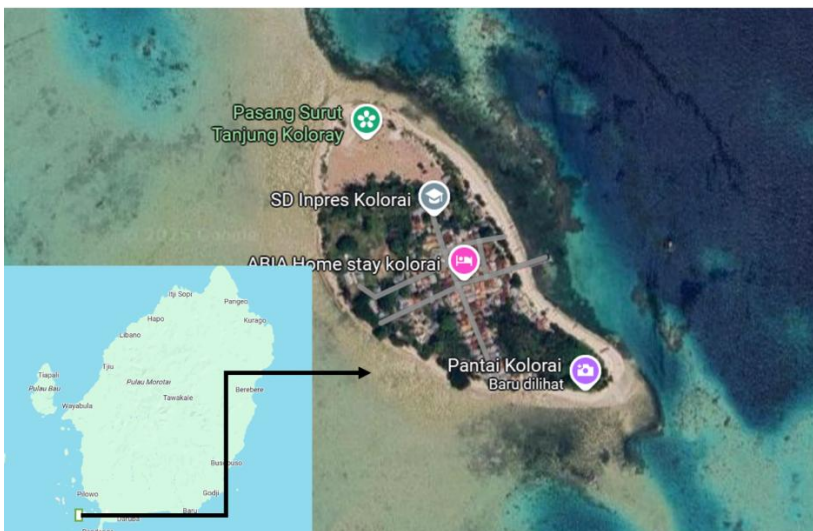
Desa Kolorai: Terhimpit Masalah Transportasi dan Ekonomi

Beranjak ke Desa Kolorai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tim peneliti mendapati keluhan yang serupa namun dengan nuansa yang lebih spesifik. Dari wawancara dengan informan seperti Adhur, Fadli Umar, Jamain Labuha, Kudrat Hamdani, Maimuna

Moloku, Mukhlis Leki, Nafsia Keber, Safril, dan Zulfikar Ladjame, permasalahan utama yang mereka hadapi berkaitan erat dengan aksesibilitas dan ekonomi.

Keluhan terbesar para nelayan di Kolorai adalah transportasi laut yang tidak memadai dan mahal. Fadli Umar dan Jamain Labuha menceritakan betapa sulitnya mereka menjual hasil tangkapan ikan ke kota terdekat. Kapal yang melayani rute tersebut sangat terbatas, dan jadwalnya pun sering tidak menentu. Hal ini membuat mereka terpaksa menjual ikan ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Mereka berharap ada kebijakan yang dapat menstabilkan harga ikan dan menyediakan transportasi laut yang lebih teratur dan terjangkau.

Gambar 2.
Pulau Kolorai



Sumber: Cita Peta Google Earth.

Masalah ekonomi di Kolorai juga diperburuk oleh keterbatasan lapangan kerja. Kudrat Hamdani dan Maimuna Moloku mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk hanya bekerja sebagai nelayan atau petani dengan penghasilan yang tidak stabil. Para pemuda di pulau itu merasa tidak memiliki pilihan karir lain, sehingga banyak dari mereka terpaksa merantau. Mereka menuntut adanya program pelatihan keterampilan, seperti perbaikan mesin perahu atau pengolahan hasil laut, yang dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Di samping itu, infrastruktur dasar seperti jalan pantai, talut dan jembatan di Desa Kolorai juga sangat memprihatinkan. Ancaman abrasi pantai telah mengikis bibir pantai dan merusak beton diinnd talut pelindung daratan. Nafsia Keber dan Safril mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah, membuat mobilitas warga sangat terhambat. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius pada pembangunan infrastruktur jalan, Listrik, Air Bersih, Kesehatan, Perpustakaan, Sekolah, Tenaga pengajar, transportasi laut rutin yang akan mempermudah akses mereka ke pusat-pusat ekonomi dan layanan publik.

Pulau Maitara: Dilema Antara Potensi dan Kesejahteraan

Perjuangan Ekonomi di Pulau Maitara: Antara Keindahan Alam dan Kesenjangan Kesejahteraan

Pulau Maitara, sebuah permata di Kota Tidore Kepulauan, mempesona siapa pun yang memandangnya. Namun, di balik keindahan alamnya yang luar biasa, penduduk lokal menghadapi perjuangan ekonomi yang tak terlihat oleh wisatawan. Potensi pariwisata yang besar dan kekayaan laut yang melimpah belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan mereka. Wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat seperti Suhaimi Robo, Nurul, Yahya, Khadijah, dan Sarti menunjukkan bahwa ada masalah mendasar yang perlu segera diatasi. Keluhan mereka berpusat pada dominasi ekonomi dari luar dan minimnya dukungan untuk memberdayakan warga lokal.

Salah satu keluhan paling mendesak datang dari sektor perikanan. Pulau Maitara, dengan perairan yang kaya akan ikan, seharusnya menjadi sumber penghidupan yang menjanjikan bagi para nelayan. Namun, realitasnya jauh dari harapan. Suhaimi Robo sebagai penjual ikan dan Yahya, nelayan yang telah puluhan tahun mengarungi laut Maitara, menjelaskan bagaimana mereka terjebak dalam lingkaran kehidupan ekonomi yang kurang menguntungkan. Dominasi tengkulak ini tidak hanya

merugikan secara ekonomi, tetapi juga mematikan semangat mereka untuk berkembang. Para nelayan sulit menabung atau mendapatkan modal untuk membeli peralatan tangkap yang lebih modern, yang bisa meningkatkan hasil tangkapan mereka. Mereka sangat berharap ada intervensi dari pemerintah, seperti pembangunan pusat pengolahan ikan atau koperasi nelayan. Dengan adanya fasilitas ini, mereka bisa menampung dan menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang lebih adil, sekaligus meningkatkan nilai produk perikanan, misalnya dengan mengolahnya menjadi ikan asin atau produk olahan lainnya. Maitara dikenal sebagai pulau dengan pemandangan ikonik gunung kembar, yang menjadi magnet bagi wisatawan. Namun, ironisnya, manfaat ekonomi dari pariwisata ini lebih banyak dinikmati oleh pihak luar. Nurul dan Khadijah mengeluhkan bahwa fasilitas pariwisata utama, seperti penginapan, restoran, dan kapal wisata, sebagian besar dimiliki oleh pengusaha dari luar pulau. Warga lokal hanya berperan sebagai pekerja dengan upah minim, bukan sebagai pemilik usaha.

Keluhan ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam tata kelola pariwisata. Alih-alih memberdayakan masyarakat lokal, pembangunan justru menciptakan jurang pemisah antara pemilik modal dari luar dan warga lokal yang hanya menjadi penonton di kampung halaman mereka sendiri. Khadijah menambahkan, banyak pemuda

dan ibu-ibu rumah tangga memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam industri pariwisata, misalnya dengan menjual kerajinan tangan, menjadi pemandu wisata, atau membuka warung makan kecil. Namun, mereka tidak memiliki pelatihan keterampilan atau dukungan modal untuk memulai usaha.

Masyarakat Maitara berharap pemerintah dapat mengubah narasi ini. Mereka menuntut program pelatihan yang berfokus pada keterampilan pariwisata, seperti tata kelola penginapan, pemandu wisata, atau manajemen bisnis kecil. Mereka juga membutuhkan akses permodalan yang mudah agar bisa mendirikan usaha mereka sendiri. Dengan dukungan yang tepat, pariwisata di Maitara bisa menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh warga, tidak hanya untuk segelintir orang.

Melalui suara Suhaimi Robo, Nurul, Yahya, Khadijah, dan Sarti, kita bisa melihat bahwa perjuangan di Pulau Maitara adalah cerminan dari banyak pulau terpencil lainnya. Diperlukan komitmen serius dari para pemimpin untuk tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Pemberdayaan masyarakat lokal adalah kunci untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang melimpah benar-benar membawa kemakmuran bagi seluruh penduduk.

Gambar 3.
Lokasi Pulau Maitara



Sumber: Peta Googlemap, 2025

Menuju Pembangunan Inklusif di Maluku Utara

Dari suara-suara yang disampaikan oleh para informan di Pulau Tolonuo, Desa Kolorai, dan Pulau Maitara, tergambar jelas bahwa kebutuhan pembangunan di pulau-pulau terpencil di Maluku Utara sangatlah mendesak. Keluhan-keluhan ini bukanlah sekadar daftar permintaan, melainkan cerminan dari perjuangan hidup yang terus-menerus.

Kebutuhan akan infrastruktur dasar yang layak, seperti listrik, air bersih, transportasi, dan telekomunikasi, adalah fondasi yang harus segera dibangun. Kesenjangan dalam layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan harus segera diatasi agar tidak ada lagi anak yang putus

sekolah atau nyawa yang hilang karena lambatnya penanganan medis. Dan yang tak kalah penting, pemberdayaan ekonomi harus diprioritaskan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada tengkulak dan dapat menikmati potensi alam yang mereka miliki.

Suara dari Tolonuo, Kolorai, dan Maitara adalah alarm bagi para pemimpin untuk tidak lagi mengabaikan daerah terluar. Pembangunan yang inklusif dan merata adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial. Hanya dengan mendengarkan, memahami, dan bertindak atas keluhan-keluhan ini, Maluku Utara dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah, di mana setiap pulau, sekecil apa pun, dapat merasakan manfaat dari pembangunan.

BAB II.

POTRET DEMOKRASI YANG TERBELAH: POLITIK UANG, IDENTITAS, DAN AKSES INFORMASI DI MALUKU UTARA

Pilkada serentak 2024 di Maluku Utara menjadi panggung yang menarik untuk mengamati dinamika demokrasi di wilayah kepulauan. Jauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan, para pemilih di tiga pulau utama—Tolonuo, Kolorai, dan Mitchell—menunjukkan spektrum pemikiran dan kecenderungan yang beragam. Suara-suara mereka, yang terekam dalam data tren analisis, tidak hanya mencerminkan preferensi politik, tetapi juga tantangan-tantangan fundamental yang dihadapi dalam proses demokratisasi. Narasi ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana para pemilih di ketiga wilayah tersebut memahami, berpartisipasi, dan menyikapi berbagai isu politik, terutama politik uang, identitas, dan akses informasi.

Pulau Tolonuo: Antara Rasionalitas, Identitas, dan Kendala Akses

Pulau Tolonuo menghadirkan gambaran pemilih yang kompleks. Terdapat kelompok yang menunjukkan pemahaman politik yang rasional dan kritis, namun ada pula yang masih terikat pada identitas primordial. Lebih

jauh lagi, kelompok ini menghadapi tantangan praktis terkait akses informasi yang tidak merata.

1. Rasionalitas dan Anti-Pragmatisme yang Menguat

Tolonuo memiliki sekelompok pemilih yang menunjukkan sikap anti-pragmatis yang kuat. Adriati Umar, misalnya, memiliki pemahaman politik yang rasional dan menolak politik uang. Baginya, politik uang adalah racun yang merusak demokrasi. Partisipasinya didasarkan pada penilaian kualitas kandidat, bukan pada iming-iming materi. Sentimen serupa diungkapkan oleh Ajhar Kurung, yang secara tegas menolak politik uang dan menekankan dampaknya yang merusak. Suara-suara ini mencerminkan kesadaran kritis bahwa demokrasi sejati harus dibangun di atas integritas dan meritokrasi, bukan transaksi jangka pendek. Mereka merekomendasikan transparansi kandidat dan penekanan dampak buruk politik uang sebagai solusi pendidikan politik.

Sikap rasional ini juga terlihat pada Ikfan Peleger, yang mengeluhkan kurangnya detail program dari para kandidat. Baginya, pemilih membutuhkan informasi yang jelas dan terperinci untuk membuat keputusan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa ada segmen pemilih yang tidak puas dengan kampanye yang dangkal dan menuntut transparansi program sebagai bagian integral dari pendidikan politik. Mereka adalah representasi dari

pemilih yang "lapar" informasi, yang ingin memilih berdasarkan substansi, bukan sekadar janji-janji kosong.

2. Dominasi Identitas dan Tantangan Inklusivitas

Di sisi lain, narasi demokrasi di Tolonuo juga diwarnai oleh sentimen identitas. Novitasari Rahim adalah contoh nyata dari pemilih yang memilih kandidat berdasarkan kesamaan agama atau suku. Baginya, identitas kelompok menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah upaya menuju demokrasi rasional, ikatan primordial masih memegang peranan penting. Hal ini menjadi tantangan serius bagi KPU dan lembaga terkait untuk menyosialisasikan pentingnya memilih berdasarkan kualitas dan visi, bukan hanya identitas. Rekomendasi pendidikan dasar tentang relevansi kualitas kandidat menjadi sangat relevan untuk mengatasi kecenderungan ini.

Selain itu, Musifiin Barapa menyoroti masalah inklusivitas. Ia mengeluhkan kampanye yang provokatif dan mengusulkan agar KPU melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam proses sosialisasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap cara-cara kampanye yang memecah belah dan menyoroti perlunya pendekatan yang lebih merangkul dan menghormati keberagaman. Suara Musifiin adalah panggilan untuk demokrasi yang tidak hanya adil, tetapi juga inklusif dan damai.

3. Kendala Akses Informasi dan Preferensi Media

Keterbatasan akses informasi juga menjadi tema sentral di Tolonuo. Bahita Kurung mengakui bahwa meskipun akses informasi secara umum baik, sosialisasi dari KPU tidak merata di daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan partisipasi yang tinggi namun dengan basis informasi yang terbatas. Rekomendasinya jelas: sosialisasi langsung dan pemanfaatan media konvensional untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.

Anto Stuart menambahkan perspektif lain dengan menyoroti ketergantungan pada media konvensional seperti TV. Kurangnya literasi digital membuat sebagian pemilih di Tolonuo lebih percaya pada informasi yang mereka terima dari saluran tradisional. Ini diperkuat oleh Hartati La Ida, yang secara terang-terangan lebih mempercayai informasi langsung daripada media sosial. Ketidakpercayaan pada media digital, yang seringkali diwarnai oleh berita palsu dan hoaks, menjadi alasan utama preferensi ini. Oleh karena itu, rekomendasi pendidikan tentang literasi digital menjadi krusial untuk membekali pemilih agar dapat memfilter informasi dengan lebih baik.

Pulau Kolorai: Heterogenitas Pemilih dan Pengaruh Media

Situasi di Pulau Kolorai menunjukkan tren yang lebih heterogen. Pemilih di sini lebih akrab dengan media

sosial, namun juga menghadapi masalah serupa dengan Tolonuo, yaitu politik uang dan kurangnya sosialisasi.

1. Pengaruh dan Akses Media yang Berbeda-beda

Di Kolorai , ada kelompok pemilih yang sudah melek digital. Informan seperti "São Paulo" dan Hamdani Resort menyatakan akses informasi yang cukup dan penggunaan media sosial untuk mendapatkan informasi. Mereka mewakili segmen pemilih yang memanfaatkan teknologi untuk mengikuti perkembangan pilkada. Namun, akses yang mudah ini tidak serta-merta menjamin kualitas informasi. Ini membuka celah bagi kampanye negatif dan hoaks, sehingga rekomendasi untuk meningkatkan literasi digital tetap menjadi prioritas.

Di sisi lain, ada juga pemilih yang masih kesulitan mendapatkan informasi. Jamain Labuha mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari KPU/Bawaslu, yang menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu belum berhasil menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal ini diperparah oleh kondisi geografis, seperti yang dialami Safril, seorang nelayan dengan akses terbatas. Keduanya merekomendasikan sosialisasi langsung dan pemanfaatan media lokal seperti radio komunitas untuk menjangkau pemilih di daerah terpencil dan kelompok profesional tertentu. Zulfikar Ladjame memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan mudahnya akses

informasi melalui kampanye langsung, yang menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, interaksi tatap muka masih menjadi sumber informasi utama.

2. Perang Melawan Politik Uang dan Kampanye Negatif

Isu politik uang juga sangat relevan di Kolorai . Fadli Umar dan Scarlet Witch, misalnya, secara tegas menolak praktik ini. Scarlet Witch bahkan menambahkan penolakan terhadap kampanye negatif, menunjukkan keinginan untuk demokrasi yang lebih sehat dan beretika. Suara-suara ini sejalan dengan tren di Tolonuo, menunjukkan bahwa penolakan terhadap politik uang adalah sentimen yang meluas di Maluku Utara. Rekomendasi anti-politik uang dan transparansi kandidat menjadi tema berulang yang sangat penting.

Namun, tidak semua pemilih memiliki ketegasan yang sama. Mukhlis Leki, misalnya, mengaku terpengaruh oleh janji-janji kampanye, meskipun informasi yang ia terima cukup. Hal ini menunjukkan bahwa retorika politik yang persuasif dan janji-janji manis masih menjadi faktor penentu bagi sebagian pemilih. Rekomendasi pendidikan kritis menjadi penting untuk membantu pemilih menganalisis janji-janji kampanye secara lebih mendalam.

3. Identitas dan Pengaruh Kekuasaan

Seperti di Tolonuo, identitas juga menjadi faktor penentu di Kolorai . Nafsia Keper mengaku kesulitan mendapatkan informasi tentang Pilkada dan merasa tidak bebas dalam memilih, karena kecenderungan memilih berdasarkan kesamaan agama atau suku. Situasi ini diperparah dengan adanya pengaruh kekuasaan, seperti yang diungkapkan Zulfikar Ladjame. Kedua hal ini menunjukkan bahwa kebebasan memilih di Kolorai masih dihadapkan pada tekanan sosial dan struktural. Diskusi kelompok dan edukasi tentang pentingnya memilih secara independen menjadi rekomendasi yang relevan untuk mengatasi tantangan ini.

Pulau Maitara: Perpecahan Antara Kualitas dan Identitas

Pulau Maitara menyajikan dinamika yang lebih terpolarisasi. Terdapat perpecahan yang jelas antara pemilih yang mengutamakan kualitas kandidat dan mereka yang masih sangat terikat pada identitas. Isu politik uang juga menjadi perhatian utama di sini.

1. Polarisasi Antara Kualitas dan Identitas

Maitara menjadi arena pertarungan antara pemilih rasional dan pemilih identitas. Nurul dan Yahya adalah representasi pemilih yang mengedepankan kualitas kandidat dan menolak politik uang. Mereka setuju bahwa pemilih harus mengetahui kandidat dengan baik dan

menuntut transparansi informasi. Suara mereka menunjukkan optimisme terhadap masa depan demokrasi yang lebih baik, di mana pilihan didasarkan pada rekam jejak dan visi, bukan faktor-faktor non-rasional.

Namun, di sisi lain, ada Khadijah yang setuju memilih berdasarkan kesamaan etnis atau agama. Sentimen ini diperparah dengan pandangannya yang "netral" terhadap politik uang, menunjukkan adanya ambivalensi atau mungkin penerimaan terhadap praktik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kelompok yang menolak politik uang, ada juga yang tidak memiliki sikap tegas, yang berpotensi melemahkan integritas demokrasi. "São Paulo" dari Mitchell juga menunjukkan sikap netral terhadap politik uang dan mengakui adanya pengaruh dari orang lain, yang menggarisbawahi pentingnya dinamika kelompok dalam pengambilan keputusan.

2. Tantangan Politik Uang yang Meresap

Isu politik uang menjadi benang merah yang menghubungkan ketiga pulau. Suhaimi Robo, dari Pulau Maitara, secara eksplisit setuju dengan praktik politik uang, bahkan mengakui pengaruh janji-janji kampanye. Sikap ini sangat kontras dengan pandangan Adriati Umar dan Nurul. Perbedaan ekstrem ini menunjukkan betapa dalamnya masalah politik uang di Maluku Utara dan betapa sulitnya memberantasnya. Suhaimi juga setuju

dengan pilihan berbasis etnis/agama, yang menunjukkan bahwa praktik pragmatis dan primordial dapat berjalan beriringan. Rekomendasi pendidikan dasar tentang demokrasi menjadi sangat relevan untuk mengubah pola pikir ini.

Meskipun demikian, keberadaan pemilih seperti Nurul dan Yahya yang menolak politik uang dan menuntut transparansi informasi memberikan harapan. Suara mereka menjadi kekuatan kontra-narasi yang menantang hegemoni politik uang. Mereka mendorong pemilih untuk lebih kritis, menuntut informasi yang jelas, dan memilih pemimpin yang memiliki integritas.

Cermin Demokrasi di Kepulauan

Suara-suara demokrasi dari tiga pulau di Maluku Utara—Tolonuo, Kolorai, dan Mitchell—menghadirkan potret yang kaya dan kompleks tentang tantangan dan harapan dalam Pilkada 2024. Secara keseluruhan, tren yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 1. Politik Uang sebagai Tantangan Utama: Sentimen anti-politik uang sangat kuat di antara sebagian pemilih di ketiga pulau, namun praktik ini masih meresap dan bahkan diterima oleh sebagian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penegakan hukum harus lebih gencar untuk memberantas praktik yang merusak ini; 2. Keterikatan pada Identitas: Faktor etnis dan agama masih menjadi penentu pilihan bagi sebagian pemilih. Hal

ini memerlukan pendidikan politik yang lebih mendalam tentang pentingnya memilih berdasarkan kompetensi dan program kerja, bukan hanya kesamaan identitas; 3. Kesenjangan Informasi dan Literasi: Akses informasi yang tidak merata dan tingkat literasi digital yang berbeda-beda menjadi kendala serius. KPU perlu menemukan metode sosialisasi yang lebih efektif dan inklusif, mulai dari media konvensional di daerah terpencil hingga pendidikan literasi digital untuk menghadapi hoaks.; 4. Pentingnya Transparansi dan Kualitas Kandidat: Banyak pemilih menuntut transparansi program dan kualitas kandidat sebagai dasar pilihan mereka. Ini adalah sinyal positif bahwa ada keinginan kuat untuk demokrasi yang lebih substantif.

Demokrasi di Maluku Utara adalah sebuah perjalanan yang dinamis dan penuh tantangan. Di tengah berbagai kendala, suara-suara pemilih yang menuntut transparansi, menolak politik uang, dan mengutamakan kualitas menjadi mercusuar harapan. Untuk mencapai demokrasi yang lebih matang, diperlukan sinergi antara penyelenggara pemilu, kandidat, dan masyarakat sipil untuk terus-menerus mengedukasi, merangkul, dan memberdayakan setiap suara, agar proses politik benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

BAB III.

MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS UNTUK PILKADA/PEMILU DI PULAU- PULAU TERPENCIL BERBASIS MEDIA DIGITAL

Latar Belakang: Menemukan Solusi untuk Tantangan Demokrasi di Perbatasan

Demokrasi modern di Indonesia tidak hanya diuji di pusat-pusat kota, tetapi juga di tapal batas, di pulau-pulau terpencil yang terpisah oleh lautan. Di Maluku Utara, misalnya, geografis kepulauan menciptakan tantangan unik yang seringkali luput dari perhatian. Pemilih di sana, yang merupakan fondasi dari legitimasi politik, dihadapkan pada serangkaian hambatan sistemik yang dapat mengikis esensi pemilu yang jujur dan adil.

Tantangan pertama dan yang paling nyata adalah keterbatasan akses informasi. Jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak ada, minimnya jangkauan media cetak, serta siaran televisi dan radio yang terbatas, menciptakan "lubang hitam" informasi. Akibatnya, berita dan profil kandidat seringkali tidak sampai atau diterima dalam bentuk yang sudah terfragmentasi dan bias. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya literasi politik, di mana masyarakat mungkin belum sepenuhnya

memahami fungsi legislatif, peran kepala daerah, atau pentingnya hak pilih mereka. Tanpa pemahaman ini, pilihan politik seringkali didasarkan pada asumsi atau informasi dari sumber tunggal yang belum tentu akurat.

Di tengah arus globalisasi, isu mengenai demokrasi, literasi, negara pulau kecil, dan konektivitas menjadi semakin relevan. Empat konsep ini saling terkait dalam membentuk realitas sosial, politik, dan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis terisolasi. Memahami interaksi antara konsep-konsep ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, merujuk pada berbagai literatur yang ada.

Salah satu perspektif teoretik yang muncul adalah tentang bagaimana entitas yang kecil dapat menjadi model bagi yang lebih besar. Menurut Stephen Elstub dan Oliver Escobar (2019: 442), negara-negara pulau kecil menunjukkan bahwa yang kecil dapat mengajar yang lebih besar. Pandangan ini meruntuhkan asumsi dominan bahwa model tata kelola hanya bisa datang dari negara-negara besar. Pengalaman mereka dalam bidang pendidikan, demokrasi, dan hak-hak menjadi contoh konkret. Elstub dan Escobar (2019: 442) mencatat, pada tahun 2016, Forum meluncurkan proyek bersama dengan LSM lain, yaitu Fiji Women's... untuk menyebarkan praktik-praktik inovatif ini.

Pendidikan, yang seringkali diidentikkan dengan literasi, merupakan fondasi penting bagi demokrasi. Joel Spring (2012) menyoroti hubungan erat ini melalui referensi pada karya Roger Austin, "Democracy and Education," yang diterbitkan dalam *Yearbook of the National Society for the Study of Education, Volume 108, Number 1, 2009*. Hubungan ini menunjukkan bahwa literasi politik dan partisipasi demokratis tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan. Lebih lanjut, Spring (2012) juga merujuk pada buku "Small Island" (New York: Routledge, 2008), yang membahas tantangan unik dalam konteks pendidikan di wilayah pulau kecil. Literasi tidak hanya berarti kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan kritis untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Masalah literasi dan pendidikan juga terkait dengan isu konektivitas. Di era digital, literasi tidak lengkap tanpa literasi digital. C. C. Wolhuter dan Alexander W. Wiseman (2022: 136) dalam konteks Pasifik, menyoroti konektivitas dan TIK di Pasifik. Mereka mencatat bahwa isu-isu ini dibahas dalam *Small States Digest, 1(1), 1-29*. Konektivitas digital, menurut Wolhuter dan Wiseman (2022: 136), menjadi faktor penting yang membentuk demokrasi. Hal ini didukung oleh pandangan Corbett (2015) yang membahas demokrasi dalam konteks yang sama. Tanpa akses ke informasi dan platform digital, partisipasi warga negara dalam proses demokrasi menjadi terbatas.

Karin Bäckstrand dan Annica Kronsell (2015: 117) memperluas wacana ini dengan menghubungkan demokrasi dan pembangunan dengan isu lingkungan. Mereka secara eksplisit menyebut negara-negara pulau kecil sebagai entitas yang sangat relevan dalam tata kelola lingkungan. Mereka juga merujuk pada karya Héritier dan Lehmkuhl (2008) yang membahas "the shadow of hierarchy and new modes of governance". Keterbatasan sumber daya dan kerentanan lingkungan di negara pulau kecil menuntut bentuk-bentuk demokrasi yang adaptif dan partisipatif, yang juga bergantung pada literasi dan konektivitas.

Konektivitas, baik fisik maupun digital, memiliki peran sentral dalam membangun kohesi sosial dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan. Ravinder K. Sidhu, Ho Kong Chong, dan Brenda S. A. Yeoh (2019: 68) berpendapat bahwa infrastruktur berinteraksi dengan orang-orang, komunitas, dan alam di bawah budaya politik demokratis maupun otoriter. Mereka menekankan bahwa investasi pulau dalam membina konektivitas sangatlah penting. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa ada materialitas lain, yang meskipun terlihat lebih banal, namun sama pentingnya. Ini menunjukkan bahwa konektivitas bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga jaringan sosial dan budaya yang terbentuk dari interaksi tersebut.

Dalam konteks pendidikan tinggi, konektivitas menjadi tantangan utama bagi universitas di wilayah kepulauan. Sjur Bergan (2025: 151) menyebutkan University of the Aegean sebagai contoh, sebuah universitas pulau di negara yang memiliki banyak pulau. Meskipun ada jaringan feri dan penerbangan domestik, perjalanan dan komunikasi antar bagian negara yang berbeda menjadi hambatan. Hal ini membatasi akses mahasiswa dan dosen terhadap sumber daya dan kolaborasi.

Literasi, dalam bentuknya yang paling luas, juga mencakup pemikiran kritis dan hak asasi manusia. Sebuah publikasi dari tahun 2024 (2024: 757) menggambarkan bagaimana Islandia, sebagai komunitas pulau kecil di dekat Kutub Utara, telah berhasil membangun citra yang tidak hanya dalam hal koneksi tetapi juga dalam pemikiran demokratis dan hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa literasi dan pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai ini dapat menjadi kekuatan pendorong bagi citra dan identitas suatu bangsa.

Namun, akses terhadap literasi dan konektivitas tidak selalu merata. Kevin McDonough dan Walter Feinberg (2003: 269) mengemukakan bahwa ada sedikit insentif bagi jaringan besar penerima voucher non-publik untuk muncul di pinggiran kota. Mereka menyimpulkan bahwa jika pulau-pulau pilihan tersebut tetap menjadi pulau, mereka akan tetap terisolasi. Ini adalah argumen

kuat tentang pentingnya jaringan pendidikan yang inklusif untuk mencegah fragmentasi sosial dan pendidikan.

Pentingnya jaringan informasi di negara-negara pulau kecil juga ditekankan oleh UNESCO (1989: 14) dalam publikasinya tentang "Small Island States - On Being Small and Different". Publikasi ini menyoroti perlunya Jaringan Informasi Pulau-Pulau Kecil (Small Islands Information Network). Hal ini menunjukkan pengakuan awal akan kebutuhan akan konektivitas yang terorganisir untuk mengatasi isolasi dan mempromosikan pembangunan.

Matthew A. M. Thomas, Tavis D. Jules, dan Michele Schweisfurth (2025) dalam buku mereka membahas metodologi perbandingan dalam konteks negara-negara berkembang pulau kecil (SIDS). Mereka secara spesifik mengkaji hubungan antara demokrasi dan pendidikan, termasuk pertanyaan-pertanyaan etis dan gambaran metodologis. Hal ini menegaskan bahwa studi tentang negara pulau kecil memberikan perspektif unik untuk memahami dinamika global.

Demokrasi dan pembangunan di negara pulau kecil seringkali dibatasi oleh sejarah dan struktur kekuasaan. Gordon Crawford dan Abdul-Gafaru Abdulai (2021: 430) memberikan contoh Zanzibar, yang meskipun merupakan pulau kecil di Tanzania, memiliki budaya Arab yang kuat. Pembagian kekuasaan antara daratan dan Zanzibar

membatasi... demokrasi dan pembangunan di sana. Ini menunjukkan bahwa demokrasi di pulau kecil seringkali bukan sekadar implementasi model Barat, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks historis dan budaya yang kompleks.

Andrew Massey (2019: 177) berpendapat bahwa teori negara kecil adalah bidang studi yang berharga. Ia mengutip Baldacchino (2012), "Islands and...", yang menegaskan bahwa pengetahuan teoretik tentang hal ini akan menjadi tambahan yang berharga untuk memahami fungsi tata kelola dan demokrasi. Ini menekankan perlunya kerangka kerja teoretik yang spesifik untuk menganalisis dinamika di negara-negara pulau kecil, yang berbeda dari negara-negara yang lebih besar.

Era digital membawa harapan baru, tetapi juga tantangan. OECD (2004: 159) membahas e-demokrasi dan mencatat bahwa politisi mulai menyadari bahwa menghubungkan pulau-pulau kecil sangat penting. Mereka berargumen bahwa e-demokrasi dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam proses demokrasi melalui pembelajaran, berbagi ide, dan agregasi. Ini menunjukkan potensi konektivitas digital untuk memperkuat demokrasi.

Namun, konektivitas digital hanyalah satu bagian dari teka-teki. National Research Council (1998: 30) mengingatkan bahwa individu tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis jika mereka tidak

memiliki akses. Mereka menggunakan contoh surat yang dikirim ke lokasi terpencil di pulau-pulau kecil untuk menunjukkan pentingnya konektivitas, bahkan dalam bentuk yang paling dasar. Literasi media dan akses terhadap informasi adalah prasyarat untuk partisipasi yang bermakna.

Anthony Payne (2022) mengkritik model demokrasi yang hanya fokus pada pemungutan suara periodik, dengan menyatakan bahwa demokrasi di mana orang-orang berjalan ke kotak suara dan memilih selama dua detik setiap lima tahun seringkali bukan demokrasi yang nyata. Ia menceritakan tentang sekelompok pemuda berpendidikan di sebuah pulau kecil yang memulai gerakan perubahan, menunjukkan bahwa demokrasi sejati membutuhkan partisipasi aktif dan berkelanjutan, yang didukung oleh pendidikan dan konektivitas yang memadai.

Matthew Montebello (2019: 229) memberikan contoh positif tentang konektivitas digital di pulau kecil di Mediterania, di mana sebuah kursus online menjadi jalur penghubung ke mahasiswa internasional. Pengalaman ini menunjukkan bahwa berbagi pengalaman melalui jaringan online kooperatif dapat memperkaya pendidikan dan pembelajaran, mengatasi hambatan geografis.

Secara keseluruhan, narasi ini menggarisbawahi bahwa demokrasi, literasi, negara pulau kecil, dan konektivitas adalah empat pilar yang saling menopang.

Demokrasi membutuhkan literasi warga negara, yang pada gilirannya difasilitasi oleh konektivitas. Negara-negara pulau kecil, dengan tantangan geografis dan sosial-historisnya, menjadi laboratorium ideal untuk mempelajari hubungan ini. Pemahaman teoretik dan konseptual yang mendalam tentang interaksi antara empat pilar ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif demi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Ancaman Politik Identitas dan Politik Uang di Kepulauan Terpencil

Kekosongan informasi ini dengan cepat diisi oleh dua ancaman utama: politik identitas dan politik uang. Politik identitas seringkali dimainkan dengan memanfaatkan sentimen kesukuan, agama, atau kekerabatan untuk memobilisasi dukungan, alih-alih berfokus pada program dan kinerja. Hal ini menciptakan polarisasi dan mengikis prinsip meritokrasi dalam pemilihan. Sementara itu, praktik politik uang menjadi momok yang sulit diberantas. Dengan kondisi ekonomi yang mungkin terbatas, tawaran uang tunai atau barang seringkali dianggap sebagai solusi pragmatis jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak destruktifnya terhadap kualitas kepemimpinan dan pembangunan jangka panjang.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, sebuah solusi konvensional berbasis kampanye masif dari pusat tidak akan efektif. Diperlukan sebuah model edukasi pemilih yang adaptif, yang tidak hanya menjangkau tetapi juga relevan dengan konteks sosial, budaya, dan geografis setempat. Model ini harus berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan fisik, namun juga memanfaatkan kearifan lokal sebagai jembatan kepercayaan, mengubah tantangan menjadi peluang untuk membangun partisipasi politik yang lebih cerdas dan berdaulat.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam mengimplementasikan demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada). Geografi yang terfragmentasi oleh lautan menciptakan dinamika politik lokal yang berbeda, di mana interaksi sosial dan politik cenderung lebih personal dan intens. Dalam lingkungan seperti ini, praktik-praktik yang merusak integritas demokrasi, seperti politik uang, menjadi ancaman serius. Isu ini tidak hanya merusak esensi pemilihan yang jujur dan adil, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai studi telah menunjukkan bagaimana fenomena ini berakar kuat di Indonesia, dengan dampak yang meresap hingga ke tingkat nasional. Penelitian dari Aspinall dan Berenschot (2019) dalam buku mereka, *Democracy for Sale*, menyoroti bagaimana praktik ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.

Salah satu studi kasus yang menarik adalah Pilkada di pulau-pulau terluar. Denny JA (2020: 140) dalam bukunya, *Creating A Political Legacy*, memberikan contoh konkret tentang strategi kampanye di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, di mana jumlah pemilih terdaftar relatif kecil dan terpisah oleh perairan. Situasi geografis ini memerlukan pendekatan kampanye yang sangat spesifik dan personal, yang sayangnya seringkali membuka celah untuk praktik politik uang. Kedekatan antara politisi dan pemilih, yang oleh Robert B. Potter dkk. (2015) dalam *The Contemporary Caribbean* disebut sebagai "closeness" dalam politik pulau kecil, bisa menjadi pedang bermata dua: di satu sisi memperkuat ikatan komunitas, namun di sisi lain memudahkan transaksi politik yang tidak sehat.

Praktik politik uang, atau *money politics*, dalam pilkada bukanlah fenomena baru. Ziegenhain (2016) mencatat dalam *Institutional Engineering and Political Accountability in Indonesia* bahwa banyak kasus gugatan pilkada di pengadilan menuduh pemenang menggunakan politik uang dan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme hukum, praktik tersebut tetap merajalela. Lebih jauh, Aspinall (2003) dalam *Local Power & Politics in Indonesia* mengamati bahwa di Sumatera Utara, pilkada yang tidak diwarnai tuduhan suap dan pembelian suara adalah pengecualian. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik-praktik koruptif telah menjadi bagian integral dari sistem politik lokal di banyak

tempat di Indonesia, bahkan sebelum era reformasi yang memberikan otonomi daerah yang lebih besar.

Tantangan ini diperparah oleh kerangka hukum yang terus berubah. Maribeth Erb (2003) dalam bukunya, *Deepening Democracy in Indonesia?*, menyoroti ketidakpastian yang muncul dari Undang-Undang No. 32/2004, yang dia sebut sebagai "hubungan dualistik" yang perlu dijawab sebelum bisa menciptakan budaya politik lokal yang efektif. Undang-undang ini kemudian direvisi dan digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014, seperti yang dicatat oleh Sebastianus Menggo dkk. (2021) dalam prosiding konferensi ICEHHA. Perubahan regulasi ini, meskipun bertujuan untuk memperbaiki tata kelola, seringkali tidak secara fundamental mengatasi akar masalah dari politik uang yang telah begitu mengakar.

Politik Uang dan Dinamika Demokrasi Lokal

Politik uang dalam pilkada di Indonesia mengambil berbagai bentuk, mulai dari pemberian uang tunai secara langsung, sembako, hingga janji-janji proyek pembangunan. Praktik ini secara langsung mengganggu prinsip dasar demokrasi, yaitu bahwa setiap suara harus didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap program dan visi kandidat, bukan karena imbalan materi. Hung-Mao Tien (2016) dalam *Taiwan's Electoral Politics and Democratic Transition* menggambarkan korupsi sebagai tindakan yang mengubah "tindakan publik berupa

pemungutan suara menjadi kesepakatan pribadi". Pernyataan ini sangat relevan dengan situasi di Indonesia, di mana politik uang mengubah pemilih menjadi pelanggan (client) yang hanya melihat nilai pragmatis dari suaranya, bukan nilai ideologis atau partisipatif. Boni Hargens (2021) dalam *Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia* menggambarkan situasi ini sebagai kontes antara "kekuatan kekayaan" (oligarki) dan "kekuatan partisipasi" (demokrasi). Ia berargumen bahwa kekuatan kekayaan, yang diekspresikan melalui politik uang, seringkali mengendalikan proses politik di tingkat lokal.

Dampak dari politik uang tidak hanya terbatas pada hasil pemilu. Praktik ini menciptakan lingkaran setan di mana para kandidat yang terpilih merasa memiliki "hutang" kepada para pemilih yang mereka "beli" suaranya, atau kepada para penyandang dana. Sebagai hasilnya, mereka lebih fokus pada pengembalian modal politik daripada melayani kepentingan publik secara luas. Gerry Van Klinken dan Joshua Barker (2018) dalam *State of Authority* menjelaskan bagaimana politik uang menciptakan loyalitas yang didasarkan pada imbalan materi. Mereka mencatat bahwa para politisi memberikan uang kepada calon pemilih untuk mengembangkan loyalitas, yang kemudian dibalas dengan dukungan politik saat pemilu.

Di daerah-daerah kepulauan, di mana akses fisik dan infrastruktur terbatas, hubungan ini menjadi lebih personal dan intens. Seperti yang diungkapkan oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2019) dalam *Democracy for Sale*, praktik politik uang seringkali dimediasi oleh broker lokal yang memiliki jaringan kuat di komunitas. Hal ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit dan memungkinkan praktik-praktik ilegal ini berkembang subur. Michael Hatherell (2019) dalam *Political Representation in Indonesia* juga menyoroti bagaimana inovasi dalam politik sipil, seperti gerakan-gerakan sosial, masih harus berhadapan dengan realitas politik uang di tingkat lokal dan regional. Meskipun ada upaya-upaya positif, praktik-praktik lama ini masih sulit diberantas.

Korupsi, Otonomi Daerah, dan Demokrasi Kepulauan

Pilkada, yang merupakan manifestasi dari desentralisasi dan otonomi daerah, seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi lokal. Namun, dalam banyak kasus, pilkada justru menjadi arena baru bagi korupsi dan politik uang. Aspinall dan Berenschot (2019) dalam studi mereka tentang korupsi politik di pulau-pulau terluar Indonesia, yang diterbitkan dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, menunjukkan bahwa desentralisasi tidak serta-merta menghasilkan tata kelola yang lebih baik. Sebaliknya, hal itu membuka peluang baru bagi elite lokal untuk

menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Fenomena ini juga terlihat di negara-negara pulau kecil lainnya. Lino Briguglio dkk. (2020) dalam *Handbook of Governance in Small States* mencatat bahwa di São Tomé dan Príncipe, struktur pemerintah lokal direvisi secara substansial untuk mengatasi masalah serupa.

Di Indonesia, desentralisasi memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan. Namun, tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, kewenangan ini rentan disalahgunakan. Denny JA (2020: 140) menyoroti bagaimana strategi kampanye di pulau-pulau kecil seringkali harus mempertimbangkan kondisi geografis yang unik, yang bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan politik uang. Misalnya, pendistribusian logistik kampanye yang sulit bisa menjadi alasan untuk menyalurkan dana secara tidak transparan.

Politik uang juga berdampak pada kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Ketika pemilihan dimenangkan bukan karena kompetensi atau integritas, melainkan karena kemampuan finansial, maka kualitas para pemimpin daerah akan menurun. Hans Antlov dan Sven Cederroth (2021) dalam *Elections in Indonesia* mencatat bahwa politik uang dan manipulasi suara yang terjadi pada pemilu 1999 menunjukkan betapa pentingnya studi mendalam tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa untuk memahami demokrasi yang efektif, seseorang harus mempelajari

bagaimana interaksi antara politik lokal, nasional, dan budaya membentuk praktik-praktik tersebut.

Dalam konteks kepulauan, tantangan ini semakin kompleks. Graham Hassall (2020) dalam *Government and Public Policy in the Pacific Islands* menyoroti bahwa di negara-negara pulau kecil, administrasi pemilihan seringkali memiliki tantangannya sendiri. Di Indonesia, tantangan ini diperbesar oleh skala geografis yang sangat luas. Pemilihan di pulau-pulau kecil, yang seringkali memiliki kurang dari 1.000 penduduk seperti yang dicatat oleh Adam Gendźwiłł dkk. (2022) dalam *The Routledge Handbook of Local Elections*, membutuhkan perhatian khusus dan sumber daya yang signifikan untuk memastikan integritas pemilu.

Ancaman terhadap Demokrasi dan Masa Depan Kepulauan

Politik uang bukan sekadar masalah teknis dalam pemilihan. Ini adalah ancaman fundamental terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Joel Krieger (2001) dalam *The Oxford Companion to Politics of the World* mencatat bahwa sumber daya alam yang kecil dan masalah sosial-ekonomi seperti kurangnya air bersih adalah masalah umum di negara-negara pulau. Ketika politik uang merajalela, para pemimpin yang terpilih cenderung tidak fokus pada solusi jangka panjang untuk masalah-masalah ini, melainkan pada pemenuhan janji-janji jangka pendek yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

Carola Klöck dan Michael Fink (2019) dalam *Dealing with climate change on small islands* berargumen bahwa untuk mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, penting untuk melibatkan partisipasi politik lokal dan memasukkan pengetahuan lokal dalam perencanaan. Namun, hal ini sulit terwujud jika proses politik di tingkat lokal dikuasai oleh uang dan bukan oleh aspirasi masyarakat. Praktik politik uang menciptakan apatis dan sinisme di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi politik yang bermakna.

Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Brian Meeks (2014) dalam *Critical Interventions in Caribbean Politics and Theory* menyarankan beberapa langkah, termasuk legislasi baru yang komprehensif mengenai pendanaan partai politik dan pemilihan, serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah lokal. Di Indonesia, upaya-upaya ini perlu disesuaikan dengan konteks kepulauan yang unik. Penguatan lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang adalah langkah-langkah krusial. Selain itu, pendidikan politik yang berkelanjutan untuk masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak politik mereka dan bahaya dari politik uang.

Pilkada di Indonesia telah membuka babak baru dalam sejarah demokrasi, tetapi juga mengungkapkan

kerapuhan sistem yang ada. Seperti yang disimpulkan oleh Aspinall dan Berenschot (2020) dalam buku mereka, *Democracy for sale*, demokrasi Indonesia bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari rakyatnya. Oleh karena itu, perjuangan untuk melawan politik uang dan memperkuat demokrasi harus dimulai dari tingkat lokal, dari pulau ke pulau, dari desa ke desa. Hanya dengan cara inilah demokrasi kepulauan di Indonesia dapat tumbuh menjadi sistem yang kuat, adil, dan benar-benar melayani rakyatnya.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi di Indonesia akan sangat bergantung pada seberapa berhasil kita mengatasi tantangan-tantangan ini, terutama dalam konteks pilkada. Jika kita gagal, maka demokrasi yang kita perjuangkan selama ini akan terus dihantui oleh praktik-praktik yang mengikisnya dari dalam, mengancam untuk mengubahnya menjadi sekadar formalitas tanpa substansi. Jack Corbett (2015) dalam *Being Political: Leadership and Democracy in the Pacific Islands* mengingatkan kita bahwa politisi sangat terikat dengan komunitas yang mereka wakili. Dalam konteks Indonesia, ikatan ini harusnya menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan dan partisipasi yang sehat, bukan sebaliknya, menjadi celah untuk praktik politik uang yang merusak.

BAB IV.

KERANGKA MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS: PILAR-PILAR MENUJU PARTISIPASI RASIONAL

Model edukasi ini dirancang sebagai sistem terpadu yang menggabungkan kekuatan teknologi digital dengan sentuhan personal dari pendekatan konvensional. Tujuannya adalah untuk tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk pemilih yang berdaya, mampu berpikir kritis, dan membuat keputusan yang rasional. Model ini berdiri di atas empat pilar utama yang saling menguatkan.

Definisi Pemilih Cerdas dan Partisipasi Rasional

Pemilih cerdas adalah sebuah konsep fundamental yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Istilah ini melampaui sekadar partisipasi dalam pemilihan umum, melainkan merujuk pada pemahaman mendalam, kemampuan kritis, dan kesadaran akan tanggung jawab politik yang dimiliki oleh setiap warga negara. Di era disrupsi informasi dan perkembangan teknologi, definisi pemilih cerdas menjadi semakin kompleks dan relevan, terutama dengan munculnya berbagai inovasi dalam sistem pemilihan.

Sebagaimana yang diuraikan oleh Scott H. Ainsworth dan Brian M. Harward (2019: 821), pemilih yang cerdas adalah mereka yang menggunakan alat-alat seperti Vote Smart's Voter's Self-Defense Manual untuk mendapatkan informasi tentang posisi pejabat terpilih, rekam jejak, sumbangan kampanye, dan peringkat dari kelompok kepentingan. Penggunaan alat-alat ini menunjukkan bahwa kecerdasan pemilih tidak lagi hanya mengandalkan informasi konvensional, melainkan juga memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan data yang objektif dan komprehensif.

Definisi pemilih cerdas tidak bisa dilepaskan dari konteks partisipasi politik yang rasional. GBP Editorial (2023: 73) dalam bukunya, *Understanding NCERT Democratic Politics*, menyoroti pentingnya kampanye pemilu yang memungkinkan pemilih untuk "secara bebas dan terbuka memperdebatkan kandidat mana yang akan membuat keputusan terbaik." Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih cerdas adalah mereka yang aktif dalam proses deliberasi, tidak hanya menerima informasi secara pasif. Mereka adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kandidat berdasarkan substansi, bukan hanya retorika atau popularitas. Dalam konteks ini, pemilih cerdas adalah agen perubahan yang mendorong perdebatan publik yang sehat dan memaksa para kandidat untuk menawarkan program kerja yang lebih substantif dan terukur.

Tiga Dimensi Utama Pemilih Cerdas

Untuk memahami pemilih cerdas secara lebih mendalam, kita bisa mengurai definisinya ke dalam tiga dimensi utama: dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi perilaku. Dimensi Kognitif (Pengetahuan) Pada dimensi ini, pemilih cerdas ditandai dengan tingkat pengetahuan politik yang memadai. Mereka tidak hanya mengetahui nama-nama kandidat, tetapi juga memahami isu-isu politik, platform kebijakan, dan rekam jejak para calon. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi mereka untuk membuat keputusan yang terinformasi. L. Ashok Kumar dkk. (2020: 824) dalam prosiding konferensi mereka menyoroti bahwa dalam sistem pemilu modern, "hanya pemilih yang memenuhi persyaratan pemilih yang diizinkan untuk memilih." Hal ini menekankan bahwa pengetahuan tentang prosedur pendaftaran dan otentikasi adalah bagian integral dari kecerdasan pemilih. Pemilih cerdas memahami bahwa hak suara mereka datang dengan tanggung jawab untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan. Mereka juga memiliki pemahaman tentang bagaimana sistem pemilihan bekerja, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, serta peran dan fungsi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Pengetahuan ini melindungi mereka dari manipulasi dan disinformasi, yang menjadi ancaman serius dalam demokrasi modern.

Dimensi Afektif (Sikap dan Nilai) Pemilih cerdas juga memiliki dimensi afektif yang kuat, yang tercermin dari sikap mereka terhadap demokrasi dan nilai-nilai yang mendasarinya. Mereka adalah individu yang percaya pada pentingnya kebebasan berpendapat, pluralisme, dan akuntabilitas publik. Sikap ini membuat mereka menolak praktik-praktik yang merusak demokrasi, seperti politik uang, intimidasi, atau korupsi. Mereka memandang hak suara bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai kepercayaan yang harus dijaga. Sikap ini sangat penting karena, seperti yang dijelaskan oleh Morris Altman (2017: 545), pemilih tunggal mungkin merasa suaranya "tidak konsekuensial" dalam skala besar. Namun, pemilih cerdas memahami bahwa dampak kolektif dari jutaan suara yang terinformasi adalah kekuatan yang tak tergantikan. Sikap ini memotivasi mereka untuk berpartisipasi meskipun ada keraguan tentang dampak individual mereka, karena mereka percaya pada nilai demokrasi itu sendiri.

Dimensi Perilaku (Tindakan Nyata) Ini adalah dimensi yang paling terlihat dari pemilih cerdas. Mereka adalah pemilih yang aktif mencari informasi, memverifikasi fakta, dan terlibat dalam diskusi publik. Peter Y. A. Ryan dan Berry Schoenmakers (2009: 22) dalam publikasi mereka tentang e-voting, mencatat bahwa kegagalan peralatan, seperti kartu pintar dan pembaca kartu, bisa "mencegah pemilih untuk memilih." Pemilih cerdas adalah mereka yang proaktif menghadapi

tantangan ini. Mereka tidak akan menyerah begitu saja jika menghadapi masalah teknis, melainkan akan mencari cara untuk memastikan hak suara mereka tetap dapat digunakan. Dalam konteks yang lebih luas, perilaku pemilih cerdas juga mencakup keikutsertaan dalam kegiatan sipil, seperti mengawasi jalannya pemilu, menuntut akuntabilitas dari para pejabat terpilih, dan berpartisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Perilaku ini memastikan bahwa demokrasi tidak berhenti di hari pemilu, melainkan terus berjalan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan.

Tantangan dalam Mewujudkan Pemilih Cerdas

Meskipun idealnya semua warga negara menjadi pemilih cerdas, ada banyak tantangan yang menghalangi terwujudnya tujuan ini, terutama di negara-negara dengan populasi besar dan beragam seperti Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap informasi yang tidak merata. Di daerah terpencil, akses internet seringkali terbatas, dan media massa cetak mungkin tidak tersedia secara luas. Ini membuat pemilih di daerah tersebut lebih rentan terhadap disinformasi atau informasi yang dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Tantangan lainnya adalah politik uang dan klientelisme, yang secara sistematis merusak kemampuan pemilih untuk membuat pilihan rasional. Ketika imbalan materi menjadi faktor penentu, pertimbangan rasional tentang program dan rekam jejak menjadi tidak relevan.

Selain itu, literasi politik yang rendah juga menjadi kendala. Banyak pemilih yang mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk memahami isu-isu politik yang kompleks. Hal ini membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh retorika emosional atau narasi yang disederhanakan. Seperti yang dicatat oleh Darren Lilleker dan Richard Scullion (2009: 179), beberapa pemilih, terutama generasi muda, cenderung berpikir sebagai "konsumen" yang mencari kepuasan pribadi, bukan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pola pikir ini, yang menganggap voting sebagai "konsumsi", adalah ancaman bagi partisipasi rasional.

Peran Teknologi dalam Membangun Pemilih Cerdas

Di sisi lain, teknologi juga menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Konsep seperti "smart voting" atau "e-voting" bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pemilu. Robert Krimmer dkk. (2020: 53) menggambarkan bagaimana kartu pintar dan PIN dapat digunakan untuk otentikasi pemilih, yang meningkatkan keamanan dan akurasi. Dhiren Patel dkk. (2020: 73) juga membahas bagaimana teknologi *blockchain* dan smart contracts dapat digunakan untuk mengelola pendaftaran dan aktivitas pemilih, yang menjamin integritas data.

Namun, inovasi teknologi ini juga membawa tantangan baru. Peter Y. A. Ryan dan Berry Schoenmakers (2009: 22) mengingatkan bahwa perangkat e-voting bisa relatif mahal dan rentan terhadap kegagalan teknis, yang dapat menghalangi pemilih untuk memilih. Oleh karena itu, penerapan teknologi harus diiringi dengan sosialisasi yang memadai dan ketersediaan infrastruktur yang andal.

Selain itu, ada juga inisiatif teknologi yang berfokus pada edukasi pemilih. Regina Smyth (2020: 209) mencatat kasus "Smart Voting" di Rusia, sebuah "alat informasi" yang membantu pemilih mengidentifikasi kandidat yang memiliki peluang terbaik untuk menang melawan petahana. Meskipun tujuannya adalah strategis, inisiatif semacam ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memberdayakan pemilih dengan informasi yang relevan dan terstruktur. Efthimios Tambouris dan Ann Macintosh (2010: 70) juga menyebutkan inisiatif serupa, yang berupaya menggunakan internet untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan memberikan informasi kepada pemilih.

Pemilih cerdas adalah fondasi dari demokrasi yang efektif. Pemilih cerdas tidak lahir begitu saja, melainkan dibentuk melalui proses edukasi, akses terhadap informasi, dan lingkungan politik yang kondusif. Mereka adalah warga negara yang memahami hak-haknya, mengikuti proses pemilu dengan benar, dan membuat

pilihan berdasarkan pertimbangan matang atas isu-isu politik yang relevan.

Di tengah tantangan modern seperti disinformasi dan politik uang, peran teknologi menjadi sangat penting. Baik melalui inisiatif seperti Project Vote Smart (Scott H. Ainsworth & Brian M. Harward, 2019: 821) maupun penggunaan teknologi canggih seperti *smart contracts*, tujuan utamanya tetap sama: memberdayakan pemilih. Namun, teknologi hanyalah alat. Kecerdasan pemilih yang sesungguhnya berasal dari keinginan untuk belajar, berpikir kritis, dan bertindak demi kebaikan bersama. Mendorong pemilih untuk bertransformasi dari sekadar pemilih tradisional yang mencoblos simbol, menjadi pemilih cerdas yang memahami konsekuensi dari setiap pilihan mereka, adalah tugas berkelanjutan yang harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat (Suresh Chandra Satapathy dkk., 2017: 498).

Pemilih cerdas dan partisipasi rasional adalah dua konsep fundamental yang saling terkait dalam membangun fondasi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Keduanya tidak hanya merujuk pada tindakan sederhana memberikan suara, tetapi lebih pada kualitas proses di baliknya. Pemilih cerdas adalah individu yang tidak hanya tahu cara mencoblos, tetapi juga memahami esensi dari tindakannya. Mereka adalah warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Sementara itu, partisipasi rasional adalah hasil dari

kecerdasan pemilih tersebut, yaitu tindakan memilih yang didasarkan pada informasi yang memadai dan pertimbangan yang matang, bukan sekadar emosi, iming-iming, atau pengaruh sesaat.

Pemilih Cerdas: Memahami Hak, Proses, dan Isu Politik

Seorang pemilih cerdas dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki tiga pemahaman mendasar: memahami hak politiknya, memahami proses pemilu, dan memahami isu-isu politik yang relevan.

Memahami Hak Politiknya

Pemilih cerdas menyadari bahwa hak memilih bukanlah sekadar kewajiban, melainkan sebuah kekuasaan yang dimiliki setiap warga negara untuk menentukan masa depan bersama. Mereka tahu bahwa hak ini dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dicerai oleh paksaan, intimidasi, atau imbalan materi. Pemahaman ini melahirkan kesadaran untuk menjaga integritas suara mereka dari godaan politik uang dan tekanan dari pihak lain. Dengan pemahaman ini, mereka tidak akan menganggap suaranya sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, melainkan sebagai alat yang suci untuk memilih pemimpin yang terbaik. Mereka juga memahami bahwa hak politik tidak hanya sebatas memilih, tetapi juga hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Memahami Proses Pemilu

Pemilih cerdas tidak buta terhadap mekanisme demokrasi. Mereka tahu cara mendaftar sebagai pemilih, di mana tempat mereka harus mencoblos, dan bagaimana prosedur yang benar saat berada di bilik suara. Lebih dari itu, mereka juga memahami peran lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta mekanisme hukum yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Pemahaman ini membuat mereka tidak mudah bingung oleh informasi yang salah dan dapat mengidentifikasi potensi kecurangan. Ketika mereka memahami prosesnya, mereka akan lebih percaya pada sistem dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Mereka juga tahu bahwa proses demokrasi tidak berakhir di hari pencoblosan, melainkan terus berlanjut melalui pengawasan publik terhadap kinerja wakil rakyat dan kepala daerah yang terpilih.

Memahami Isu Politik yang Relevan.

Ini adalah inti dari kecerdasan pemilih. Seorang pemilih cerdas mampu mengidentifikasi isu-isu penting yang memengaruhi kehidupan mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mereka tidak hanya tahu masalah-masalah tersebut, tetapi juga berusaha memahami solusi yang ditawarkan oleh para kandidat. Contohnya, di masyarakat kepulauan, mereka akan fokus pada isu-isu seperti akses transportasi antarpulau,

ketersediaan air bersih, harga hasil laut, atau kualitas pendidikan di daerah terpencil. Mereka akan mencari tahu bagaimana para calon kepala daerah memiliki visi dan program untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Pemilih cerdas tahu cara membedakan antara janji kampanye yang realistis dan janji yang hanya sekadar retorika kosong.

Partisipasi Rasional

Partisipasi rasional adalah tindakan nyata yang diwujudkan oleh pemilih cerdas. Ini adalah proses memilih yang didasarkan pada data dan informasi, bukan emosi atau sentimen. Ketika pemilih berpartisipasi secara rasional, mereka melakukan beberapa hal berikut:

Mencari dan Mengonsumsi Informasi Secara Kritis. Pemilih rasional tidak puas dengan satu sumber informasi. Mereka akan membandingkan berbagai pandangan dari media yang berbeda, membaca rekam jejak kandidat, dan mendengarkan program kerja yang ditawarkan. Mereka juga mampu memfilter hoaks atau disinformasi yang sering menyebar, terutama melalui media sosial. Mereka tahu cara menelusuri fakta, memverifikasi klaim, dan mendengarkan pendapat dari para ahli. Tindakan ini membuat mereka tidak mudah terjebak dalam polarisasi politik yang seringkali merugikan.

Mengevaluasi Kandidat Berdasarkan Kompetensi dan Integritas. Alih-alih memilih karena kesamaan suku, agama, atau afiliasi sosial, pemilih rasional menilai kandidat berdasarkan kriteria yang objektif. Mereka melihat pengalaman kepemimpinan, kapabilitas manajerial, rekam jejak dalam pelayanan publik, dan yang paling penting, integritas moral. Mereka akan bertanya, "Apakah kandidat ini memiliki kapasitas untuk memimpin? Apakah mereka terbukti bersih dari kasus korupsi? Apakah program kerjanya realistis dan bermanfaat bagi masyarakat?" Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bagi keputusan mereka, menjauhkan mereka dari godaan politik uang dan *vote buying*.

Membuat Keputusan untuk Kesejahteraan Publik. Pada akhirnya, partisipasi rasional adalah tentang memilih demi kebaikan yang lebih besar, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pemilih rasional memahami bahwa pilihan mereka akan memengaruhi seluruh masyarakat, bukan hanya diri mereka sendiri. Mereka akan memilih kandidat yang memiliki visi jangka panjang untuk pembangunan, bukan yang hanya menawarkan solusi instan yang tidak berkelanjutan. Keputusan yang didasarkan pada pertimbangan matang ini akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berfokus pada pelayanan publik.

Konsep Partisipasi Pemilih Rasional

Teori Pemilih Rasional (Rational Voter Theory) merupakan salah satu landasan penting dalam ilmu politik modern yang berupaya menjelaskan perilaku pemilih. Teori ini berakar kuat pada teori pilihan rasional (rational choice theory), sebuah kerangka kerja yang meminjam asumsi dasar dari ilmu ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Anthony Downs (1957) dalam karyanya yang monumental, *An Economic Theory of Democracy*, pemilih diasumsikan sebagai "aktor yang rasional" yang membuat keputusan politik dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan. Asumsi ini, seperti yang diakui oleh Tom DeLuca (1995: 99), menjadi titik awal perdebatan dan penelitian dalam ilmu politik, meskipun pada akhirnya menghadirkan banyak paradoks yang menarik untuk dikaji. Teori ini berpendapat bahwa pemilih, layaknya konsumen di pasar, akan memilih kandidat atau kebijakan yang paling memaksimalkan keuntungan atau utilitas pribadi mereka. Namun, aplikasi teori ini dalam ranah politik tidaklah sesederhana dalam ekonomi, karena ada banyak faktor yang membedakan antara pilihan konsumen dan pilihan pemilih.

Salah satu premis utama dari teori ini adalah gagasan bahwa pemilih akan mengonsumsi informasi politik dan membuat pilihan rasional. David Sonius (2020) dalam bukunya *Divided We Fall*, berargumen bahwa "teori *issue voting* berpendapat bahwa pemilih mengonsumsi

informasi dan membuat pilihan rasional." Hal ini menyiratkan bahwa pemilih secara aktif mencari tahu tentang isu-isu kebijakan yang relevan, membandingkan posisi kandidat, dan kemudian memilih kandidat yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Namun, kenyataan di lapangan sering kali tidak sejalan dengan model ideal ini. Bryan Caplan (2011: 273), dalam karyanya yang terkenal, *The Myth of the Rational Voter*, secara terang-terangan menantang asumsi ini, dengan berpendapat bahwa pemilih tidak selalu rasional dan seringkali memilih kebijakan yang buruk. Ia bahkan menyebutnya sebagai "mitos", menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan realitas.

Asumsi Dasar dan Model Klasik Teori Pemilih Rasional

Teori pemilih rasional memiliki beberapa asumsi dasar yang membentuk kerangkanya. Pertama, pemilih dianggap memiliki preferensi yang jelas dan konsisten. Richard G. Niemi dan Herbert F. Weisberg (1993: 9) menjelaskan bahwa dalam model pemilih rasional, "pemilih memutuskan apakah akan memilih atau tidak berdasarkan... model ini." Pemilih akan memilih berdasarkan preferensi dan pertimbangan mereka, bukan karena faktor-faktor emosional atau ideologis semata. Asumsi ini menyiratkan bahwa pemilih mampu mengukur jarak antara posisi mereka sendiri dengan posisi kandidat, dan akan memilih kandidat yang paling dekat dengan "titik ideal" mereka. Bryan D. Jones (2001:

39) menggambarkan ini dengan istilah "titik ideal pemilih" di mana kurva indifferensi pemilih menunjukkan preferensi marginal mereka terhadap isu atau barang tertentu, serupa dengan teori pilihan konsumen.

Model klasik teori ini, yang dikembangkan oleh Anthony Downs (1957) dan diperluas oleh William H. Riker dan Peter C. Ordeshook (1968), mencoba untuk memformulasikan keputusan pemilih dalam sebuah persamaan sederhana. Persamaan ini, sering disebut "kalkulus pemilih" (calculus of voting), menyatakan bahwa seorang pemilih akan pergi ke tempat pemungutan suara jika manfaat (B) dari hasil pemilu, dikalikan dengan probabilitas (P) bahwa suara mereka akan menjadi penentu, lebih besar dari biaya (C) untuk memilih. Lorraine C. Minnite (2011: 265) menyebutkan teori Riker dan Ordeshook ini sebagai "Teori Kalkulus Pemilih" yang menjadi landasan untuk memahami apakah seorang pemilih rasional akan melakukan kecurangan. Namun, model ini menghadapi paradoks yang signifikan: dalam pemilu skala besar, probabilitas (P) bahwa satu suara akan menjadi penentu hampir nol. Oleh karena itu, secara rasional, biaya untuk memilih—seperti waktu, tenaga, dan informasi—akan selalu lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Paradoks ini menyebabkan banyak teori pilihan rasional kesulitan menjelaskan mengapa orang-orang masih memilih, sebuah masalah yang diakui oleh Michael Taylor (2006: 180).

Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi (2018: 149) dalam studi mereka tentang perilaku memilih di Indonesia, berpendapat bahwa "rasionalitas pemilih membantu menjelaskan" perilaku tersebut, meskipun dengan mengakui bahwa teori pilihan rasional memandang manusia sebagai aktor yang menghitung biaya dan manfaat dari tindakan mereka (Downs, 1957; Olson, 1965; Riker dan Ordeshook, 1968). Mereka berpendapat bahwa setiap tindakan, termasuk memilih, harus memberikan manfaat pribadi. Meskipun demikian, model kalkulus ini terbukti tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku pemilih, mendorong para ahli teori untuk mencari penyesuaian atau teori-teori alternatif.

Kritik dan Penyesuaian terhadap Teori Pemilih Rasional

Teori pemilih rasional telah menghadapi banyak kritik, terutama karena asumsinya yang terlalu idealistis. Salah satu kritik paling mendasar adalah rasionalitas pemilih yang terbatas (*bounded rationality*). Bryan Caplan (2011: 273) berpendapat bahwa "teori pilihan rasional tidak mampu menjelaskan kegagalan politik." Pemilih seringkali tidak memiliki waktu, sumber daya, atau minat untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Fenomena ini dikenal sebagai ketidaktahuan rasional pemilih (*rational voter ignorance*). Philip E. Graves (2013: 140) menjelaskan bahwa "mungkin tidak rasional bagi seorang pemilih untuk memperoleh banyak informasi

tentang sebagian besar proposal," karena satu suara mereka kemungkinan besar tidak akan mengubah hasil. Dengan demikian, pemilih akan cenderung mengambil jalan pintas mental (heuristik) atau mengandalkan sinyal-sinyal sederhana, seperti afiliasi partai.

Chris Robinson (2010: 99) dalam bukunya, *Electoral Systems and Voting in the United Kingdom*, juga mempertanyakan teori ini. Ia menyatakan, "Jika seseorang ingin berpegang pada teori pemilih rasional, jawabannya sederhana – mereka tidak bisa." Ini adalah pengakuan bahwa teori pemilih rasional yang kaku tidak mampu merekonsiliasi fluktuasi dalam pola pemilih dan volatilitas isu. Hal ini mendorong pencarian teori-teori alternatif, seperti teori *expressive voting*, di mana pemilih tidak memilih untuk alasan instrumental (untuk mengubah hasil), tetapi untuk alasan ekspresif (untuk menunjukkan identitas atau dukungan moral mereka). Sandra Dzenis (2025: 94) menjelaskan bahwa dalam teori ini, individu memilih karena alasan ekspresif, bukan instrumental.

Para ahli teori juga mencoba menyesuaikan teori pemilih rasional dengan memasukkan elemen-elemen yang lebih realistis. Misalnya, Roger D. Congleton, Bernard Grofman, dan Stefan Voigt (2019: 345) mencatat bahwa teori pilihan rasional yang baru kini memiliki "koneksi yang jauh lebih kuat antara teori pilihan rasional yang eksplisit." Penyesuaian ini mengakui bahwa

meskipun individu mungkin bertindak rasional dalam konteks yang terbatas, mereka juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Salah satu pendekatan penyesuaian yang menarik adalah teori pilihan rasional-ekspresif yang mengintegrasikan kedua motivasi: instrumental dan ekspresif. Teori ini berargumen bahwa pemilih mungkin mendapatkan "manfaat" dari tindakan memilih itu sendiri, terlepas dari hasil pemilu, seperti kepuasan moral atau rasa partisipasi.

Aplikasi Modern dan Perkembangan Teori Pemilih Rasional

Meskipun kritik terhadap teori pemilih rasional terus berlanjut, kerangkanya tetap relevan dan terus berkembang. Saat ini, para peneliti menggunakan model-model yang lebih canggih, seperti model berbasis agen (agent-based model), untuk menguji teori ini. Zining Yang dan Caroline Krejci (2024: 258) mencatat adanya "updates Rational Voter Theory: An Agent-Based Model" dalam konferensi terbaru, yang menunjukkan bagaimana para peneliti berupaya memodelkan perilaku pemilih yang lebih kompleks dan dinamis dengan menggunakan simulasi komputer. Model ini memungkinkan para ilmuwan untuk menguji bagaimana interaksi antara pemilih dapat menghasilkan pola perilaku yang tidak dapat dijelaskan oleh model klasik yang terlalu menyederhanakan.

Selain itu, teori pemilih rasional juga terus diperdebatkan dalam konteks sistem pemilu yang berbeda. Manfred J. Holler dan Hannu Nurmi (2013: 88) menunjukkan bahwa teori ini hanya dapat menjelaskan "efek marjinal dari kedekatan dan ukuran" terhadap tingkat partisipasi pemilih, yang mendorong perlunya analisis yang lebih mendalam. Di sisi lain, Jonathan D. Caverley (2014: 24) tetap berpegang pada esensi teori ini dengan mengasumsikan bahwa para pemimpin yang bertanggung jawab kepada mayoritas "populasi negara" harus "memaksimalkan kesejahteraan individu mereka."

Teori pemilih rasional tetap menjadi alat yang kuat untuk menganalisis perilaku politik, meskipun dengan keterbatasan yang signifikan. Teori ini mengajarkan kita untuk tidak menganggap enteng tindakan memilih dan mendorong kita untuk berpikir lebih kritis tentang motivasi di balik setiap suara. Meskipun Bryan Caplan (2011: 319) berargumen dalam *The Myth of the Rational Voter* bahwa demokrasi seringkali memilih kebijakan yang buruk karena pemilih yang tidak rasional, teori ini tetap menjadi titik referensi yang penting untuk memahami perilaku pemilih dan terus mendorong para peneliti untuk mengembangkan model-model yang lebih canggih dan realistis.

Dampak Positif pada Kualitas Demokrasi dan Legitimasi Hasil Pemilu

Ketika pemilih menjadi cerdas dan rasional, para politisi akan menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan kampanye yang dangkal, populisme, atau politik uang. Mereka akan dipaksa untuk menyajikan program kerja yang lebih substantif, berdebat secara sehat tentang kebijakan, dan membangun rekam jejak yang bersih. Ini akan mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang lebih kompeten, berintegritas, dan visioner, yang benar-benar siap untuk mengabdikan kepada rakyat.

Hasil pemilu yang dihasilkan dari partisipasi rasional akan memiliki legitimasi yang kuat. Ketika pemilih memilih berdasarkan informasi dan pertimbangan yang matang, mereka cenderung lebih menerima hasil yang ada, bahkan jika kandidat pilihan mereka tidak menang. Mereka akan melihat pemilu sebagai sebuah kompetisi gagasan dan program, bukan perebutan kekuasaan semata. Hal ini akan mengurangi ketegangan dan konflik pasca-pemilu, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Pemilih cerdas tidak berhenti mengawasi setelah pemilu usai. Mereka akan terus mengkritisi dan menuntut janji-janji kampanye dari para pemimpin yang terpilih. Partisipasi rasional menciptakan masyarakat yang lebih

kritis dan proaktif, yang pada akhirnya akan memaksa pemerintah untuk bekerja lebih keras, transparan, dan akuntabel. Ini adalah siklus positif di mana pemilih yang cerdas melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang kemudian melayani masyarakat yang cerdas pula.

Dengan demikian, membangun pemilih cerdas dan mendorong partisipasi rasional bukanlah tugas yang mudah, terutama di negara kepulauan dengan tantangan geografis dan sosial yang unik. Namun, ini adalah investasi paling berharga untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat terus tumbuh menjadi sistem yang adil, makmur, dan berdaulat.

BAB V.

KERANGKA MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS: PILAR-PILAR MENUJU PARTISIPASI RASIONAL

Demokrasi yang kuat dan berkualitas tidak dapat terwujud tanpa adanya partisipasi pemilih yang cerdas dan rasional. Edukasi pemilih menjadi pilar utama dalam membangun fondasi ini, sebab ia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan didasarkan pada pemahaman yang mendalam. Sebuah model edukasi pemilih yang efektif harus berfokus pada pembangunan kesadaran kritis, di mana warga tidak hanya tahu cara mencoblos, tetapi juga memahami konsekuensi dari pilihan politik mereka. Dengan demikian, partisipasi yang didorong bukan sekadar partisipasi "hadir di bilik suara", melainkan partisipasi yang "sadar dan bertanggung jawab", yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan yang terpilih.

Model edukasi pemilih cerdas ini memiliki tiga pilar utama. Pilar pertama adalah memperkuat kesadaran akan pentingnya demokrasi dan pemilu. Edukasi harus dimulai dengan menanamkan pemahaman bahwa pemilu adalah

sarana vital untuk menyalurkan aspirasi dan menentukan arah bangsa. Pemilih perlu disadarkan bahwa setiap suara memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan, sehingga sikap apatis atau pasif dapat diminimalisir. Pilar ini berupaya membangun semangat kewarganegaraan, di mana pemilih merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam proses politik, bukan hanya sebagai objek, melainkan sebagai subjek penentu masa depan.

Pilar kedua adalah membangun kemampuan pemilih untuk berpartisipasi secara rasional. Aspek ini menekankan pada literasi politik, yaitu kemampuan pemilih untuk menganalisis informasi, membedakan fakta dari hoaks, dan mengevaluasi rekam jejak serta program kerja kandidat secara kritis. Edukasi harus membekali pemilih dengan alat-alat analisis agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu SARA, politik uang, atau janji-janji populis yang tidak realistis. Dengan kemampuan ini, pemilih akan mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis, seperti kesesuaian visi-misi kandidat dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar popularitas atau daya tarik personal.

Pilar ketiga dari model ini adalah mendorong informed voting, atau pemilih yang berpengetahuan. Pilar ini merupakan puncak dari dua pilar sebelumnya, di mana pemilih tidak hanya memiliki kesadaran dan kemampuan, tetapi juga secara aktif mencari informasi

yang relevan sebelum hari pemilihan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyediaan platform informasi yang mudah diakses, debat publik yang berkualitas, serta kampanye yang lebih substansial dari para kandidat. Ketika pemilih terbiasa mencari tahu dan membandingkan, mereka tidak akan memilih secara membabi buta. Pilihan yang diambil adalah hasil dari sebuah proses pertimbangan yang matang, yang pada akhirnya akan menghasilkan perwakilan yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Model edukasi pemilih cerdas ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan demokrasi. Dengan menempatkan pemilih sebagai pusat dari seluruh proses, kita dapat mengubah dinamika politik dari yang semula didominasi oleh elite menjadi kekuatan yang digerakkan oleh rakyat. Pada akhirnya, partisipasi rasional yang diwujudkan melalui model ini akan menjadi benteng pertahanan terbaik melawan berbagai ancaman terhadap demokrasi, seperti korupsi, polarisasi, dan disinformasi, serta menjamin bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

BAB VI.

PUSATKAN PENGALAMAN PEMILIH

Model edukasi pemilih yang efektif, terutama untuk masyarakat di wilayah kepulauan terpencil, tidak bisa disamaratakan. Pendekatan yang berpusat pada pengalaman pemilih (*voter-centric approach*) adalah kunci untuk memastikan pesan edukasi tersampaikan dan relevan. Pilar ini menekankan pentingnya memahami siapa pemilih kita, bagaimana mereka berpikir, apa yang mereka butuhkan, dan tantangan unik apa yang mereka hadapi. Dengan memusatkan perhatian pada pemilih, kita bisa merancang strategi edukasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dijangkau, dipahami, dan diterima oleh masyarakat di pulau-pulau terpencil. Ini adalah langkah fundamental untuk membangun partisipasi politik yang bermakna dan berkelanjutan.

Memahami Kemampuan, Sikap, dan Kecenderungan Pemilih di Kepulauan Terpencil

Masyarakat di kepulauan terpencil memiliki karakteristik unik yang memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan informasi politik. Keberagaman budaya, tradisi lokal, dan struktur sosial yang kuat menjadi faktor penentu. Kemampuan literasi dan akses terhadap teknologi informasi seringkali terbatas. Bagi

banyak warga, informasi dari media sosial atau media massa nasional mungkin tidak sepopuler obrolan dari mulut ke mulut atau arahan dari tokoh adat dan pemuka agama. Memahami kecenderungan ini sangat penting.

Misalnya, di banyak desa nelayan di Maluku atau Nusa Tenggara Timur, ikatan kekerabatan dan persaudaraan sangat kuat. Keputusan politik seringkali tidak dibuat secara individual, melainkan melalui musyawarah keluarga atau kelompok. Seorang kepala keluarga atau tokoh adat memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan pilihan politik anggotanya. Dalam konteks ini, edukasi pemilih yang hanya menargetkan individu secara personal mungkin kurang efektif. Sebaliknya, pendekatan yang melibatkan tokoh-tokoh kunci ini sebagai agen perubahan atau fasilitator edukasi akan jauh lebih berhasil.

Sikap pemilih juga bervariasi. Beberapa mungkin sangat apolitis, menganggap politik sebagai urusan elite yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka cenderung memilih berdasarkan loyalitas pribadi atau imbalan materi jangka pendek, yang ironisnya dipengaruhi oleh politik uang. Di sisi lain, ada juga pemilih yang sangat sadar akan isu-isu lokal, seperti kelangkaan air bersih, masalah transportasi antarpulau, atau akses pendidikan. Untuk kelompok ini, materi edukasi harus langsung menyentuh masalah-masalah konkret tersebut, bukan membahas isu-isu makro yang terasa abstrak.

Dengan demikian, langkah pertama adalah melakukan riset mendalam. Tim edukasi pemilih harus turun langsung ke lapangan, berdialog, dan mendengarkan aspirasi warga. Riset ini dapat berupa survei sederhana, diskusi kelompok terfokus (FGD), atau wawancara informal. Tujuannya adalah untuk memetakan pemahaman mereka tentang pemilu, sumber informasi yang mereka percaya, serta motivasi di balik pilihan politik mereka. Data ini akan menjadi landasan untuk merancang strategi yang tepat sasaran.

Segmentasi Pemilih: Pemilih Baru, Jarang, dan Reguler

Pemilih bukanlah kelompok homogen, terutama di wilayah kepulauan yang tersebar. Segmentasi adalah strategi penting untuk menyesuaikan pesan edukasi agar lebih relevan. Kita bisa membagi pemilih menjadi tiga kategori utama: pemilih baru, pemilih jarang, dan pemilih reguler.

1. Pemilih Pemula

Pemilih Pemula adalah generasi muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak suaranya. Di kepulauan terpencil, kelompok ini seringkali menghadapi tantangan unik. Mereka mungkin baru lulus SMA dan belum memiliki paparan yang cukup tentang politik lokal. Akses internet terbatas membuat mereka tidak bisa mencari informasi dengan mudah. Materi edukasi untuk pemilih baru harus bersifat dasar dan menarik.

Pendekatan yang efektif bisa melalui media kreatif seperti komik, video pendek yang bisa diakses secara offline, atau workshop interaktif di sekolah-sekolah atau pusat komunitas pemuda. Pesan yang disampaikan harus sederhana: mengapa suara mereka penting, bagaimana cara memastikan nama mereka terdaftar, dan bagaimana cara mencoblos yang benar. Fokusnya adalah pada membangun kesadaran awal dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi.

2. Pemilih Pasif

Pemilih jarang adalah mereka yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi tidak selalu menggunakan hak suaranya. Kelompok ini seringkali merasa apatis atau tidak yakin bahwa suara mereka bisa membuat perbedaan. Di kepulauan, apatisisme ini bisa diperburuk oleh pengalaman buruk masa lalu, seperti janji-janji kampanye yang tidak pernah ditepati atau kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk pemilih ini, edukasi harus berfokus pada membangun kembali kepercayaan. Tim edukasi bisa menggunakan kisah-kisah sukses (success stories) dari daerah lain yang menunjukkan dampak positif partisipasi politik. Pendekatan ini harus personal dan persuasif, menekankan bahwa partisipasi mereka adalah kunci untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin.

3. Pemilih Reguler

Pemilih reguler adalah mereka yang selalu datang ke TPS. Kelompok ini seringkali menjadi tulang punggung demokrasi, tetapi edukasi untuk mereka tidak boleh diabaikan. Tantangan utama untuk pemilih reguler di kepulauan adalah bagaimana meningkatkan kualitas partisipasi mereka. Mereka mungkin sudah tahu cara mencoblos, tetapi apakah mereka memilih berdasarkan pertimbangan rasional? Edukasi untuk kelompok ini harus lebih mendalam, membahas isu-isu substansial seperti rekam jejak kandidat, platform kebijakan, dan dampak jangka panjang dari pilihan mereka. Materi edukasi bisa berupa diskusi publik, seminar kecil, atau bahan bacaan yang mengupas tuntas isu-isu lokal yang relevan, seperti pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur, atau ketahanan pangan. Kelompok ini juga bisa diberdayakan sebagai agen edukasi, membantu menyebarkan informasi kepada pemilih lain di lingkungan mereka.

Menyesuaikan Materi Edukasi Sesuai Kebutuhan dan Konteks Pemilih

Setelah memahami pemilih dan melakukan segmentasi, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan materi edukasi. Strategi ini sangat krusial, terutama di kepulauan terpencil dengan segala keterbatasannya.

Materi yang Relevan dengan Isu Lokal

Edukasi harus berfokus pada isu-isu yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, di pulau-pulau kecil yang bergantung pada perikanan, materi edukasi bisa menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan sumber daya laut, subsidi BBM untuk nelayan, atau pembangunan pasar ikan akan memengaruhi mata pencaharian mereka. Di pulau lain yang kesulitan akses air bersih, edukasi dapat membahas program-program kandidat terkait pembangunan sumur bor, instalasi desalinasi, atau sistem irigasi. Dengan cara ini, politik tidak lagi terasa jauh, melainkan menjadi bagian integral dari perjuangan sehari-hari mereka.

Penggunaan Bahasa dan Media yang Sesuai

Penyampaian materi harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bahkan jika perlu menggunakan dialek lokal. Media yang digunakan juga harus disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur. Di daerah yang sinyal internetnya lemah atau tidak ada, materi digital berbasis online tidak akan efektif. Sebaliknya, media cetak seperti poster, brosur, atau selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum (balai desa, warung kopi, atau dermaga) akan lebih menjangkau. Radio komunitas juga bisa menjadi media yang sangat kuat untuk menyebarkan informasi. Tim edukasi juga bisa menggunakan media tradisional, seperti pertunjukan teater rakyat atau cerita lisan, untuk menyampaikan pesan-pesan politik secara kreatif dan menarik.

Pendekatan Partisipatif, Bukan Satu Arah

Edukasi pemilih di kepulauan terpencil harus bersifat dialogis, bukan monolog dari fasilitator. Tim edukasi harus menciptakan ruang bagi warga untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pandangan mereka. Pendekatan ini membangun rasa kepemilikan (*ownership*) dan memberdayakan pemilih. Misalnya, alih-alih ceramah tentang bahaya politik uang, fasilitator bisa memulai diskusi dengan pertanyaan, "Bagaimana perasaan Bapak/Ibu jika ada yang memberi uang untuk memilih?" Jawaban dari warga akan menjadi bahan diskusi yang lebih otentik dan bermakna.

Keterlibatan Tokoh Lokal dan Jaringan Komunitas

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keterlibatan tokoh adat, pemuka agama, guru, atau ketua kelompok tani/nelayan sangat penting. Mereka adalah jembatan informasi yang paling efektif di masyarakat kepulauan terpencil. Tim edukasi bisa melatih mereka sebagai fasilitator, memberikan pemahaman yang kuat tentang materi edukasi sehingga mereka bisa menyampaikannya kepada komunitas dengan bahasa dan cara yang paling sesuai. Jaringan komunitas, seperti kelompok arisan, majelis taklim, atau asosiasi nelayan, juga bisa dimanfaatkan sebagai kanal penyebaran informasi yang efisien.

Pengalaman pemilih adalah pendekatan yang paling logis untuk mengatasi tantangan unik di kepulauan terpencil. Dengan memahami pemilih sebagai manusia seutuhnya, dengan segala keterbatasan dan kearifan lokalnya, kita dapat merancang model edukasi yang tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

BAB VII.

PENYAMPAIAN INFORMASI YANG JELAS DAN TERSTRUKTUR

Penyampaian Informasi yang Jelas dan Terstruktur

Pilar kedua dalam model edukasi pemilih adalah Penyampaian Informasi yang Jelas dan Terstruktur. Pilar ini menjadi jembatan krusial antara pemahaman tim edukasi tentang audiens (pilar pertama) dan tujuan akhir untuk mencapai partisipasi rasional. Informasi yang rumit, disajikan dengan bahasa teknis, dan dalam format yang membosankan tidak akan pernah mencapai targetnya. Sebaliknya, informasi harus dirancang secara cermat agar mudah dicerna, relevan, dan menarik bagi pemilih dari berbagai latar belakang, terutama di wilayah yang memiliki tantangan literasi dan akses. Untuk mencapai efektivitas komunikasi, pilar ini mengadopsi tiga strategi utama: menggunakan kerangka "bite, snack, meal", menyederhanakan bahasa dan desain visual, serta menguji materi edukasi secara berkala.

Gunakan Kerangka "Bite, Snack, Meal" untuk Tingkat Informasi Bertahap. Kerangka "bite, snack, meal" adalah sebuah pendekatan yang telah terbukti efektif dalam dunia jurnalisme dan pemasaran digital, dan sangat relevan untuk edukasi pemilih. Kerangka ini

mengakui bahwa tidak semua orang memiliki waktu, minat, atau kapasitas untuk mengonsumsi informasi yang panjang dan mendalam. Oleh karena itu, informasi disajikan dalam tiga tingkatan yang berbeda, memungkinkan pemilih untuk memilih seberapa jauh mereka ingin menggali.

Bite (Informasi Ringkas dan Instan) Tingkat "bite" adalah informasi yang sangat ringkas, padat, dan mudah dicerna. Ini adalah "headline" atau "poin-poin utama" yang dapat ditangkap dalam hitungan detik. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pemilih dan memberikan inti dari pesan tanpa banyak detail. Dalam konteks edukasi pemilih, "bite" bisa berupa:

- Poster dengan slogan yang kuat: "Suara Anda Penentu Masa Depan Desa."
- Infografis mini di media sosial yang menampilkan tanggal pemilu, lokasi TPS, dan cara mendaftar.
- Pesan singkat (SMS) atau *broadcast* WhatsApp yang berisi pengingat penting: "Jangan lupa, pilkada tanggal 27 November! Cek nama Anda di DPT."
- Slogan atau jingle yang mudah diingat yang diputar di radio komunitas.

Materi pada tingkatan ini harus berfokus pada apa yang perlu diketahui segera oleh pemilih. Ini adalah cara efektif untuk menjangkau pemilih yang memiliki mobilitas tinggi atau yang tidak memiliki banyak waktu

luang. Di masyarakat kepulauan terpencil, di mana sinyal internet terbatas, poster atau pesan lisan dari tokoh masyarakat dapat berfungsi sebagai "bite" yang sangat efektif.

Snack (Informasi Sedang dan Lebih Terperinci)
Tingkat "snack" adalah langkah berikutnya. Ini adalah informasi yang lebih terperinci daripada "bite", tetapi masih dalam format yang mudah dicerna. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang sedikit lebih dalam bagi pemilih yang tertarik. Materi ini berfungsi sebagai jembatan antara "bite" dan "meal", memberikan pemilih kesempatan untuk menggali lebih jauh tanpa harus merasa kewalahan. Contoh materi "snack" meliputi:

- Brosur atau selebaran yang menjelaskan secara ringkas visi-misi dan program kerja utama dari kandidat.
- Video pendek berdurasi 1-2 menit yang menjelaskan pentingnya pilkada bagi pembangunan lokal.
- Cerita pendek bergambar atau komik yang menjelaskan prosedur mencoblos dengan narasi yang sederhana dan visual yang menarik.
- Sesi tanya jawab cepat setelah acara komunitas, di mana tim edukasi menjawab beberapa pertanyaan dasar pemilih.

Materi "snack" sangat berguna untuk pemilih yang memiliki sedikit waktu luang, tetapi masih ingin

mendapatkan pemahaman dasar. Di daerah terpencil, materi ini bisa disampaikan melalui majalah dinding di balai desa, ditempel di warung kopi, atau dibagikan dalam pertemuan-pertemuan arisan. Kuncinya adalah menjaga agar materi tetap ringkas dan visual.

Meal (Informasi Mendalam dan Komprehensif) Tingkat "meal" adalah informasi yang paling lengkap dan mendalam. Ini dirancang untuk pemilih yang benar-benar ingin memahami isu-isu politik secara komprehensif, mengevaluasi kandidat secara kritis, dan berpartisipasi secara rasional. Materi "meal" membutuhkan waktu dan konsentrasi untuk dicerna. Ini bukan untuk semua orang, tetapi sangat penting untuk para "pemimpin opini" atau pemilih yang ingin menjadi lebih aktif. Contoh materi "meal" meliputi:

- Buku saku atau panduan pemilih yang berisi profil lengkap semua kandidat, rekam jejak, dan analisis program kerja.
- Webinar atau diskusi sederhana dengan para tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu krusial.
- Program pelatihan fasilitator yang melatih tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi ke komunitas mereka.
- Laporan investigasi tentang isu-isu lokal, seperti penanganan limbah, pengelolaan sumber daya alam, atau penggunaan anggaran daerah.

Materi "meal" sangat vital untuk menciptakan lapisan masyarakat yang terinformasi dengan baik, yang nantinya akan menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Di daerah kepulauan, materi ini bisa disajikan dalam bentuk pertemuan tatap muka di pusat-pusat komunitas, di mana para pemilih memiliki kesempatan untuk berdiskusi langsung dan mengajukan pertanyaan mendalam.

Bahasa Sederhana dan Desain Visual yang Mudah Dipahami

Setelah kerangka "bite, snack, meal" ditetapkan, tantangan berikutnya adalah bagaimana merancang materi agar benar-benar dapat dipahami. Di sinilah penggunaan bahasa sederhana dan desain visual menjadi sangat penting.

Sederhanakan Bahasa Politik Bahasa politik seringkali penuh dengan jargon, singkatan, dan istilah teknis yang membingungkan bagi masyarakat awam. Tim edukasi pemilih harus menerjemahkan istilah-istilah ini ke dalam bahasa sehari-hari yang akrab bagi pemilih.

- Ganti "Desentralisasi Asimetris" dengan "Pemerintah pusat kasih otonomi khusus untuk daerah kita."
- Ganti "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" (APBD) dengan "Uang belanja pemerintah daerah."
- Ganti "Rekam jejak" dengan "Catatan kinerja calon."

Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, bahkan jika perlu menggunakan dialek lokal, akan membantu pemilih merasa lebih terhubung dengan materi. Ini menunjukkan bahwa tim edukasi menghargai pemilih dan tidak memposisikan diri di atas mereka. Hal ini sangat krusial dalam membangun kepercayaan, terutama di masyarakat kepulauan terpencil yang seringkali merasa terpinggirkan dari wacana politik nasional.

Manfaatkan Desain Visual yang Menarik Visual adalah cara yang paling efektif untuk menyampaikan informasi yang rumit. Otak manusia memproses gambar lebih cepat daripada teks. Oleh karena itu, materi edukasi harus kaya visual, terutama di wilayah di mana tingkat literasi membaca mungkin rendah.

- Gunakan infografis untuk menyajikan data secara visual (misalnya, perbandingan alokasi anggaran kandidat A vs. kandidat B).
- Gunakan ilustrasi atau komik untuk menjelaskan prosedur mencoblos yang kompleks menjadi langkah-langkah yang mudah diikuti.
- Gunakan warna yang kontras dan font yang jelas agar materi mudah dibaca, bahkan oleh pemilih lansia.
- Sertakan foto-foto kandidat yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan etika kampanye, agar pemilih dapat dengan mudah mengenali calon mereka.

Penggunaan visual tidak hanya membuat materi lebih mudah dipahami, tetapi juga lebih menarik. Di tengah banyaknya informasi yang bersaing untuk mendapatkan perhatian pemilih, visual yang kuat bisa menjadi pembeda.

Uji Materi dengan Audiens untuk Efektivitas Komunikasi

Penyusunan materi edukasi bukanlah proses satu arah. Tim edukasi tidak bisa berasumsi bahwa apa yang mereka buat akan secara otomatis efektif. Oleh karena itu, pengujian materi dengan audiens target adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan. Proses ini adalah bagian dari siklus umpan balik yang memastikan bahwa materi edukasi benar-benar mencapai tujuannya.

1. Uji Kelayakan Awal (Pilot Testing)

Sebelum materi dicetak massal atau disebarluaskan secara luas, tim harus mengujinya dengan sekelompok kecil pemilih dari audiens target.

- Wawancara satu-satu: Tunjukkan poster atau brosur kepada pemilih dan tanyakan apa yang mereka pahami dari materi tersebut. Tanyakan juga apakah ada kata-kata atau gambar yang membingungkan.
- Diskusi kelompok terfokus (FGD): Kumpulkan sekelompok pemilih dan mintalah mereka untuk berdiskusi tentang materi edukasi. Ini akan

memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pesan diterima dalam konteks sosial.

Mendengarkan Umpan Balik (Feedback Loop) Umpan balik dari audiens harus menjadi pedoman untuk merevisi materi. Jika banyak pemilih merasa bahwa sebuah istilah terlalu sulit atau sebuah gambar tidak jelas, materi harus diubah. Proses ini memastikan bahwa materi edukasi bersifat kolaboratif dan benar-benar berpusat pada pemilih.

Evaluasi Pasca-Kampanye Setelah pemilu usai, tim edukasi perlu melakukan evaluasi untuk mengukur dampak dari materi yang telah disebar.

- Survei pasca-pemilu dapat menanyakan apakah pemilih merasa materi edukasi membantu mereka dalam membuat keputusan.
- Observasi partisipasi dapat melihat apakah tingkat partisipasi pemilih baru meningkat setelah kampanye edukasi.

Dengan menguji materi secara berkala, tim edukasi dapat terus menyempurnakan pendekatan mereka dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan benar-benar efektif. Ini adalah investasi yang krusial untuk membangun program edukasi pemilih yang tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan berdampak nyata. Di masyarakat kepulauan terpencil, di mana

sumber daya seringkali terbatas, pengujian materi ini menjadi lebih penting lagi agar setiap poster, brosur, atau pesan yang dibuat tidak terbuang sia-sia.

BAB VIII.

EDUKASI HAK DAN PROSES PEMILU

Edukasi Hak dan Proses Pemilu

Pilar ketiga dalam model edukasi pemilih adalah Edukasi Hak dan Proses Pemilu. Ini adalah fondasi praktis yang memberdayakan pemilih dengan pengetahuan konkret tentang bagaimana sistem demokrasi bekerja dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi di dalamnya dengan efektif. Tanpa pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti, pemilih akan mudah merasa kebingungan, rentan terhadap disinformasi, dan akhirnya apatis. Pilar ini bukan hanya tentang memberikan informasi, melainkan juga tentang menumbuhkan rasa percaya diri dan kepemilikan terhadap proses politik. Tujuannya adalah untuk mengubah pemilih pasif menjadi aktor aktif yang mampu menavigasi kompleksitas pemilu, melindungi hak-hak mereka, dan membuat suara mereka benar-benar dihitung.

Informasi tentang Hak Suara, Cara Registrasi, dan Mekanisme Pemungutan Suara

Edukasi yang efektif harus dimulai dari hal yang paling mendasar: hak suara. Banyak warga, terutama di daerah terpencil, mungkin tidak sepenuhnya menyadari

bahwa hak untuk memilih adalah hak konstitusional yang tidak bisa dicabut atau dijual. Tim edukasi harus menjelaskan bahwa hak ini adalah fondasi dari kedaulatan rakyat. Mereka harus menyampaikan pesan ini dengan cara yang persuasif, membingkainya sebagai warisan perjuangan panjang untuk demokrasi. Hak ini juga mencakup hak untuk memilih secara bebas, tanpa paksaan atau intimidasi dari pihak mana pun. Dengan memahami hal ini, pemilih akan merasa lebih kuat untuk menolak intervensi yang tidak sah dalam pilihan mereka.

Setelah pemahaman tentang hak suara tertanam, langkah selanjutnya adalah memberikan informasi praktis tentang cara registrasi sebagai pemilih. Di banyak daerah, terutama di kepulauan terpencil, proses pendaftaran bisa menjadi kendala besar. Nama pemilih mungkin tidak terdaftar, atau mereka tidak tahu cara memeriksa status mereka. Tim edukasi harus proaktif dalam menyebarkan informasi tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi di balai desa, mengumumkan informasi di radio komunitas, atau menempelkan pengumuman di tempat-tempat umum. Materi edukasi harus mencakup:

- Persyaratan untuk menjadi pemilih: Siapa saja yang berhak memilih.
- Cara memeriksa DPT: Menyediakan panduan langkah demi langkah tentang cara mengecek nama di DPT, baik secara online (jika memungkinkan) atau melalui kantor desa.

- Prosedur jika nama tidak terdaftar: Menjelaskan apa yang harus dilakukan pemilih jika nama mereka tidak ada di DPT, termasuk cara mendaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Pengetahuan ini adalah benteng pertama melawan disinformasi dan kecurangan. Pemilih yang tahu status pendaftaran mereka tidak akan mudah dimanipulasi dengan isu-isu palsu tentang kelayakan mereka. Terakhir, edukasi harus mencakup mekanisme pemungutan suara. Bagi banyak pemilih, terutama yang baru pertama kali memilih atau yang jarang berpartisipasi, proses di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa terasa membingungkan. Edukasi yang jelas dan terperinci sangat penting untuk memastikan tidak ada suara yang tidak sah. Materi edukasi harus menjelaskan:

- Dokumen yang diperlukan: Apa saja yang harus dibawa pemilih ke TPS (misalnya, KTP-el atau surat keterangan).
- Langkah-langkah di TPS: Menjelaskan secara visual langkah-langkah mulai dari verifikasi identitas, menerima surat suara, masuk ke bilik suara, mencoblos, hingga memasukkan surat suara ke kotak, dan mencelupkan jari ke tinta.

- Cara mencoblos yang benar: Menyajikan panduan yang sangat jelas tentang cara mencoblos surat suara agar tidak menjadi tidak sah.

Penyampaian informasi ini harus menggunakan media yang sangat visual, seperti poster bergambar atau video simulasi pendek. Ini akan membangun kepercayaan diri pemilih dan mengurangi kesalahan teknis yang bisa menyebabkan suara mereka tidak dihitung.

Penjelasan tentang Jenis Pemilu dan Kandidat

Selain prosedur, pemilih juga harus memahami konteks di mana mereka berpartisipasi. Edukasi harus menjelaskan jenis-jenis pemilu yang ada, terutama di tingkat lokal, seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg), dan pemilihan kepala desa. Setiap jenis pemilu memiliki peran dan dampak yang berbeda, dan pemilih cerdas harus memahami perbedaan ini.

Selanjutnya, edukasi harus fokus pada informasi tentang kandidat. Ini adalah inti dari partisipasi rasional. Pemilih tidak hanya harus tahu siapa kandidatnya, tetapi juga apa yang mereka tawarkan. Materi edukasi harus menyediakan:

- Profil singkat kandidat: Menyajikan latar belakang, pendidikan, dan pengalaman kerja mereka secara objektif.

- Visi dan misi: Menjelaskan secara sederhana apa yang ingin dicapai kandidat jika terpilih.
- Program kerja utama: Menyajikan poin-poin utama dari program kerja kandidat, terutama yang relevan dengan isu-isu lokal yang dihadapi pemilih.

Penyajian informasi ini harus adil dan non-partisan. Tim edukasi harus memastikan bahwa semua kandidat mendapatkan porsi yang sama dan tidak ada bias yang terlihat. Ini akan membantu pemilih membuat keputusan yang objektif, bukan karena preferensi emosional atau tekanan politik. Pendekatan ini juga membantu mempromosikan persaingan yang sehat di antara kandidat, karena mereka tahu bahwa pemilih akan mengevaluasi mereka berdasarkan substansi.

Prosedur Pengaduan dan Perlindungan Hak Pemilih

Pilar ini tidak akan lengkap tanpa edukasi tentang mekanisme pengaduan dan perlindungan hak pemilih. Pemilu seringkali diwarnai oleh berbagai pelanggaran, mulai dari politik uang, intimidasi, hingga kecurangan administrasi. Pemilih cerdas harus tahu bahwa mereka memiliki hak untuk melapor jika menemukan pelanggaran tersebut. Edukasi harus mencakup:

- Apa saja yang termasuk pelanggaran pemilu: Memberikan contoh-contoh konkret tentang pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye hitam, atau mobilisasi pemilih yang tidak sah.

- Di mana dan bagaimana cara mengadu: Memberikan informasi yang jelas tentang lembaga-lembaga yang berwenang menerima pengaduan, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah, panwascam, atau panwaslu desa.
- Perlindungan bagi pelapor: Menjamin bahwa pelapor akan dilindungi dan identitas mereka akan dirahasiakan. Ini sangat penting untuk menumbuhkan keberanian pemilih untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan retribusi.

Dengan memberikan pengetahuan ini, tim edukasi memberdayakan pemilih sebagai "pengawas" pemilu itu sendiri. Pemilih yang sadar akan hak mereka dan tahu cara melapor akan menjadi benteng pertahanan terbaik melawan kecurangan. Ini akan menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan dan akuntabel, di mana setiap suara benar-benar dihormati. Pada akhirnya, edukasi ini tidak hanya melindungi proses pemilu, tetapi juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki peran yang tak terpisahkan dalam memastikan integritas demokrasi.

BAB IX.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN LITERASI POLITIK

Pendidikan Kewarganegaraan dan Literasi Politik

Pilar keempat dari model edukasi pemilih adalah Pendidikan Kewarganegaraan dan Literasi Politik. Pilar ini merupakan upaya jangka panjang yang bertujuan untuk membangun fondasi mental dan intelektual bagi pemilih agar mereka tidak hanya berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga menjadi warga negara yang sadar dan kritis. Berbeda dengan pilar-pilar sebelumnya yang fokus pada aspek praktis pemilu, pilar ini lebih menekankan pada pengembangan pola pikir. Bagi masyarakat di kepulauan terisolasi dan pulau-pulau terluar, di mana akses informasi terbatas dan interaksi politik seringkali didominasi oleh tokoh-tokoh lokal, pendidikan ini menjadi sangat krusial. Ini adalah benteng pertahanan terakhir melawan apatisme, politik uang, dan polarisasi yang mengancam keutuhan demokrasi.

Pemahaman Sistem Politik dan Peran Lembaga Negara

Untuk menjadi pemilih yang cerdas, seseorang harus terlebih dahulu memahami arena di mana mereka bermain. Pendidikan kewarganegaraan harus memberikan gambaran yang jelas tentang sistem politik

dan peran lembaga negara, baik di tingkat nasional maupun lokal. Bagi pemilih di pulau-pulau terluar, pemahaman ini seringkali kabur karena jarak geografis yang memisahkan mereka dari pusat pemerintahan.

Edukasi harus dimulai dengan menjelaskan struktur pemerintahan di Indonesia:

- Pemerintah Pusat dan Daerah: Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota? Apa saja kewenangan dan tanggung jawab masing-masing? Materi edukasi dapat menggunakan analogi yang mudah dipahami, misalnya, "Pemerintah pusat itu seperti nakhoda kapal besar, sedangkan pemerintah daerah adalah nakhoda-nakhoda kapal kecil yang mengarungi perairan di sekitar kita. Mereka bekerja sama, tapi punya tugas yang berbeda."
- Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif: Apa peran DPR, DPRD, presiden, gubernur, dan bupati? Mengapa ada pemisahan kekuasaan? Edukasi dapat menjelaskan bahwa pemisahan ini penting agar tidak ada satu lembaga yang terlalu kuat, dan setiap lembaga bisa saling mengawasi. Pemilih perlu disadarkan bahwa suara mereka dalam pemilu legislatif sama pentingnya dengan suara dalam pilkada, karena anggota legislatif adalah perwakilan yang membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan.

- Peran Lembaga Independen: Menjelaskan peran lembaga seperti KPU, Bawaslu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga integritas demokrasi. Pemilih harus tahu bahwa ada lembaga yang bisa mereka andalkan untuk memastikan pemilu berjalan adil dan untuk melawan korupsi.

Di kepulauan terisolasi, penyampaian materi ini harus disesuaikan dengan konteks lokal. Alih-alih menggunakan istilah-istilah teknis, gunakan bahasa sehari-hari. Gunakan contoh-contoh konkret yang relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya, "Pemerintah kabupaten yang bapak/ibu pilih akan menentukan anggaran untuk membangun dermaga atau membeli kapal untuk warga." Dengan cara ini, pemilih akan melihat hubungan langsung antara pemilu dan kesejahteraan mereka, sehingga motivasi untuk berpartisipasi akan lebih kuat.

Nilai Demokrasi, Kesetaraan, dan Tanggung Jawab Warga Negara

Edukasi kewarganegaraan juga harus menanamkan nilai-nilai fundamental demokrasi. Demokrasi bukan hanya tentang prosedur, melainkan tentang nilai-nilai yang mendasarinya.

- Kesetaraan: Mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Edukasi harus menentang diskriminasi dan mempromosikan inklusivitas. Di masyarakat kepulauan yang mungkin memiliki struktur sosial tradisional yang kuat, pesan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara, termasuk suara perempuan, pemuda, atau kelompok minoritas, dihargai dan dihitung.
- Toleransi dan Pluralisme: Menjelaskan bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Edukasi harus mempromosikan dialog yang sehat, bukan konflik. Pesan ini sangat relevan di tengah maraknya polarisasi politik yang bisa memecah belah komunitas. Pemilih perlu disadarkan bahwa lawan politik hari ini bisa jadi teman berdiskusi di kemudian hari.
- Tanggung Jawab Warga Negara: Menanamkan kesadaran bahwa hak politik datang dengan tanggung jawab. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas memilih, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan, melaporkan pelanggaran, dan berpartisipasi dalam pembangunan komunitas. Pendidikan ini mengajarkan bahwa demokrasi adalah proyek yang berkelanjutan, dan setiap warga negara adalah arsiteknya.

Nilai-nilai ini harus disampaikan melalui metode yang partisipatif, seperti diskusi kelompok, cerita rakyat yang dimodifikasi, atau simulasi. Di kepulauan, di mana kearifan lokal masih kuat, edukasi bisa mengaitkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai tradisional yang sudah ada, seperti musyawarah dan gotong royong. Ini akan membuat pesan lebih mudah diterima dan dihayati oleh masyarakat.

Keterampilan Berpikir Kritis dan Analisis Informasi Politik

Di era informasi yang masif dan seringkali tidak terkontrol, keterampilan berpikir kritis dan analisis informasi politik menjadi senjata paling ampuh bagi pemilih. Literasi politik bukan hanya tentang membaca, tetapi juga tentang memilah, menganalisis, dan mengevaluasi informasi.

- **Membedakan Fakta dan Opini:** Mengajarkan pemilih untuk tidak langsung percaya pada semua informasi yang mereka dengar atau baca. Tim edukasi bisa memberikan contoh-contoh sederhana tentang bagaimana membedakan antara fakta (misalnya, "Jumlah suara pemilu X adalah 1000") dan opini (misalnya, "Kandidat A adalah kandidat yang terbaik").
- **Melawan Hoaks dan Disinformasi:** Mengajarkan pemilih untuk skeptis terhadap informasi yang

provokatif, sensasional, atau yang tidak memiliki sumber yang jelas. Pemilih harus diajarkan untuk selalu memeriksa kembali informasi sebelum membagikannya. Ini adalah keterampilan hidup yang sangat penting, terutama di daerah yang mengandalkan media sosial dan pesan berantai sebagai sumber berita utama.

- **Menganalisis Janji dan Program Kandidat:** Memberikan panduan tentang cara mengevaluasi janji-janji kampanye. Apakah janji tersebut realistis? Apakah ada anggaran yang cukup untuk melaksanakannya? Apakah rekam jejak kandidat mendukung janji tersebut? Pemilih harus didorong untuk bertanya dan mencari bukti, alih-alih menerima janji begitu saja.

Edukasi tentang keterampilan ini harus dilakukan secara praktis. Tim edukasi bisa menggunakan studi kasus dari isu-isu lokal, misalnya, janji seorang kandidat untuk membangun jembatan antar-pulau. Mereka bisa mengajak pemilih untuk berdiskusi: "Apakah ini janji yang realistis? Berapa biayanya? Apakah pemerintah daerah punya anggaran sebesar itu? Darimana sumber dananya?" Diskusi semacam ini akan melatih pemilih untuk berpikir seperti seorang analis, bukan sekadar penonton.

Pilar ini adalah investasi jangka panjang yang akan menghasilkan pemilih yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab politik yang tinggi. Di kepulauan terisolasi dan pulau-pulau terluar, di mana tantangan geografis menciptakan keterbatasan informasi, pendidikan kewarganegaraan dan literasi politik adalah kunci untuk memastikan bahwa suara mereka bukan hanya dihitung, tetapi juga berbobot dan bermakna. Dengan pilar ini, kita tidak hanya mengedukasi pemilih untuk satu kali pemilu, melainkan membangun generasi warga negara yang cerdas dan berdaulat.

BAB X.

PENDEKATAN INKLUSIF DAN SENSITIF GENDER

Pendekatan Inklusif dan Sensitif Gender

Pilar kelima dalam model edukasi pemilih adalah Pendekatan Inklusif dan Sensitif Gender. Pilar ini memastikan bahwa upaya edukasi tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga menembus lapisan-lapisan sosial yang paling rentan dan sering terabaikan. Di pulau-pulau kecil terisolasi, di mana hierarki sosial dan budaya patriarki mungkin masih kuat, pendekatan inklusif adalah kunci untuk menjamin bahwa setiap suara memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Ini adalah upaya untuk melawan bias dan diskriminasi struktural, memastikan bahwa perempuan, kaum disabilitas, pemuda, lansia, dan kelompok marginal lainnya memiliki pengetahuan, akses, dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi. Dengan demikian, demokrasi yang terwujud bukan hanya milik mayoritas, tetapi milik semua.

Menjangkau Kelompok Rentan dan Minoritas

Edukasi pemilih yang inklusif dimulai dengan kesadaran bahwa tidak semua orang memiliki titik awal yang sama dalam hal akses informasi dan kesempatan

berpartisipasi. Kelompok rentan dan minoritas seringkali menghadapi hambatan unik yang menghalangi mereka untuk terlibat dalam politik. Di pulau-pulau kecil terisolasi, hambatan ini bisa diperburuk oleh faktor geografis dan sosial.

1. Identifikasi dan Pahami Hambatan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan dan apa hambatan spesifik yang mereka hadapi.

- Perempuan: Di banyak masyarakat patriarki, perempuan mungkin menghadapi norma sosial yang membatasi peran mereka di ruang publik. Keterbatasan mobilitas, kurangnya pendidikan, dan beban kerja domestik yang berat bisa menjadi alasan mengapa mereka tidak dapat menghadiri sosialisasi atau mencari informasi politik.
- Penyandang Disabilitas: Warga dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan fisik di TPS yang tidak ramah disabilitas, atau mereka mungkin kesulitan mengakses materi edukasi yang tidak dirancang dalam format yang dapat mereka gunakan (misalnya, braille atau video dengan juru bahasa isyarat).
- Lansia: Banyak lansia, terutama di daerah yang tingkat pendidikannya rendah, mungkin kesulitan memahami prosedur pemilu yang semakin

kompleks atau beradaptasi dengan teknologi baru. Mereka mungkin juga tidak memiliki KTP-el atau dokumen lain yang diperlukan.

- **Kelompok Marginal:** Di beberapa daerah, mungkin ada kelompok masyarakat adat atau kelompok sosial yang terpinggirkan, yang merasa tidak diakui atau tidak relevan dengan proses politik. Mereka mungkin juga menghadapi diskriminasi atau intimidasi yang membuat mereka takut untuk berpartisipasi.

Tim edukasi harus melakukan pemetaan yang cermat untuk memahami hambatan-hambatan ini di setiap komunitas. Pendekatan "satu ukuran cocok untuk semua" tidak akan berhasil di lingkungan yang beragam ini.

2. Strategi Penjangkauan yang Bertarget

Setelah hambatan diidentifikasi, strategi penjangkauan harus dirancang secara khusus untuk setiap kelompok.

- **Untuk Perempuan:** Libatkan tokoh perempuan lokal, seperti ketua PKK, tokoh adat perempuan, atau pemimpin komunitas agama. Gunakan forum yang sudah ada, seperti pengajian atau arisan, untuk menyisipkan pesan-pesan edukasi pemilih. Materi edukasi bisa difokuskan pada isu-isu yang relevan

bagi perempuan, seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi.

- Untuk Penyandang Disabilitas: Bekerja sama dengan organisasi disabilitas lokal untuk merancang materi edukasi yang aksesibel. Pastikan bahwa lokasi sosialisasi dan TPS dapat diakses oleh pengguna kursi roda. Sediakan materi edukasi dalam format audio atau visual dengan juru bahasa isyarat.
- Untuk Lansia: Gunakan pendekatan tatap muka dan personal. Sediakan materi edukasi yang sederhana dengan huruf besar. Libatkan pemuda atau relawan untuk membantu lansia memeriksa DPT atau menjelaskan prosedur mencoblos dengan sabar.
- Untuk Kelompok Marginal: Bangun kepercayaan terlebih dahulu. Tim edukasi harus menunjukkan bahwa mereka menghargai budaya dan tradisi kelompok tersebut. Dengarkan aspirasi mereka dan tunjukkan bagaimana partisipasi dalam pemilu bisa menjadi cara untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Edukasi yang Relevan dan Mudah Diakses oleh Perempuan dan Kelompok Marginal

Pendekatan inklusif tidak hanya tentang menjangkau, tetapi juga tentang memberikan materi edukasi yang relevan dan mudah diakses. Materi harus dibuat sedemikian rupa sehingga pemilih merasa bahwa informasi tersebut langsung berbicara kepada mereka.

Konten yang Sensitif Gender dan Isu Marginal. Materi edukasi harus mencakup isu-isu yang secara spesifik memengaruhi perempuan dan kelompok marginal.

- Untuk Perempuan: Materi bisa membahas tentang pentingnya perwakilan perempuan dalam politik dan bagaimana suara perempuan dapat mendorong kebijakan yang lebih adil gender. Ini bisa berupa kisah sukses tokoh perempuan lokal yang berpartisipasi dalam politik dan berhasil membawa perubahan positif.
- Untuk Kelompok Minoritas: Edukasi bisa menyoroti pentingnya hak-hak sipil dan bagaimana partisipasi dalam pemilu adalah cara untuk melindungi identitas dan kepentingan mereka. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mengadvokasi agar para kandidat memperhatikan isu-isu yang selama ini terabaikan.

Format yang Beragam dan Aksesibel. Materi edukasi harus disampaikan dalam format yang dapat diakses oleh semua orang, mengingat keterbatasan infrastruktur di pulau-pulau kecil terisolasi.

- Media Lisan dan Tradisional: Gunakan media lisan seperti cerita, drama, atau lagu untuk menyampaikan pesan. Ini sangat efektif di komunitas yang memiliki tradisi lisan yang kuat.

- Media Visual: Poster, infografis, dan komik yang ditempel di tempat-tempat strategis dapat menjangkau pemilih yang mungkin tidak memiliki akses ke internet atau media cetak.
- Aksesibilitas Digital: Jika memungkinkan, sediakan materi edukasi dalam format yang dapat diunduh dan dibagikan secara offline melalui Bluetooth atau *flash disk*. Ini bisa menjangkau pemuda yang menggunakan telepon pintar tetapi tidak memiliki koneksi internet yang stabil.

Mendorong Partisipasi Aktif Semua Lapisan Masyarakat

Tujuan akhir dari pendekatan inklusif adalah mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, tidak hanya pada hari pemilihan, tetapi juga dalam seluruh proses politik. Pemberdayaan Perempuan: Edukasi harus memberdayakan perempuan untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi agen perubahan. Ini bisa dilakukan melalui:

- Pelatihan Kepemimpinan: Mengadakan pelatihan singkat untuk perempuan lokal tentang keterampilan kepemimpinan dan advokasi.
- Mendorong Perwakilan: Menjelaskan pentingnya memilih kandidat perempuan yang kompeten, atau bahkan mendorong perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilu lokal.

- Menghilangkan Stigma: Melawan narasi bahwa politik adalah urusan laki-laki. Edukasi harus menunjukkan bahwa peran perempuan dalam politik sama pentingnya.

3. Mendorong Keterlibatan Kaum Muda

Pemuda di pulau-pulau kecil seringkali menjadi kelompok yang paling bersemangat, tetapi juga paling mudah frustrasi. Edukasi harus menyalurkan energi mereka ke arah yang positif.

- Pemanfaatan Media Sosial: Jika ada akses, gunakan platform media sosial untuk kampanye edukasi yang menarik dan interaktif.
- Melibatkan dalam Proses: Libatkan pemuda sebagai relawan untuk membantu tim edukasi, terutama dalam mendistribusikan materi atau membantu lansia di TPS.

4. Menciptakan Ruang Aman untuk Partisipasi

Penting untuk menciptakan ruang di mana setiap orang merasa aman dan nyaman untuk berpartisipasi. Ruang ini harus bebas dari intimidasi dan diskriminasi.

- Forum Diskusi Inklusif: Mengadakan diskusi publik yang secara khusus mengundang perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas untuk berbicara.

- **Membangun Jaringan Dukungan:** Membangun jaringan dukungan lokal yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan kepada pemilih yang merasa terintimidasi.

Dengan menerapkan pendekatan inklusif dan sensitif gender, model edukasi pemilih ini tidak hanya akan meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga akan membangun fondasi demokrasi yang lebih adil dan setara. Di pulau-pulau kecil terisolasi, ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa suara setiap warga, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan komunitas mereka.

BAB XI.

STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS DI KEPULAUAN TERPENCIL

Mengimplementasikan model edukasi pemilih cerdas di wilayah kepulauan, pulau terpencil, dan terisolasi, yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan dan jarang tersentuh kehidupan modern, membutuhkan strategi yang inovatif, kolaboratif, dan sangat adaptif. Kondisi geografis yang menantang, keterbatasan infrastruktur, serta budaya sosial yang unik menjadikan pendekatan konvensional tidak akan efektif. Strategi implementasi harus dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan ini, memastikan bahwa setiap suara, di pulau sekecil apa pun, memiliki kesempatan yang sama untuk didengar.

Kolaborasi Antara Pemerintah, LSM, dan Media Lokal

Keberhasilan implementasi model edukasi pemilih tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Di daerah kepulauan terpencil, kolaborasi menjadi kunci utama. Setiap pihak memiliki peran unik yang saling melengkapi untuk mengatasi tantangan yang ada. Peran Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu Pemerintah daerah,

terutama di tingkat kabupaten, harus menjadi motor penggerak utama. Mereka memiliki kewenangan dan sumber daya untuk memfasilitasi program. KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) di tingkat lokal harus proaktif dalam menyusun rencana edukasi yang terintegrasi dengan jadwal pemilu. Mereka harus menyediakan data pemilih yang akurat, menyosialisasikan prosedur pendaftaran, dan memastikan logistik pemilu—termasuk materi edukasi—dapat sampai ke pulau-pulau terjauh.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokal dan Nasional LSM memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat akar rumput. Mereka seringkali lebih fleksibel dan memiliki pendekatan yang lebih personal. LSM dapat menjadi mitra strategis dalam:

- Melakukan Pemetaan Komunitas: Mengidentifikasi tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin informal yang dapat menjadi jembatan komunikasi.
- Melatih Fasilitator Lokal: Melatih warga lokal atau pemuda desa untuk menjadi fasilitator edukasi. Mereka yang berasal dari komunitas yang sama akan lebih dipercaya dan memahami konteks budaya setempat.
- Mengembangkan Materi Adaptif: Bekerja sama dengan KPU untuk menyusun materi edukasi yang disederhanakan, menggunakan bahasa lokal, dan visual yang relevan dengan kehidupan nelayan.

Peran Media Lokal dan Tradisional Di daerah yang akses internetnya minim, media lokal menjadi vital. Radio komunitas adalah salah satu alat komunikasi paling efektif di kepulauan. Stasiun radio lokal dapat menyiarkan informasi tentang pemilu, jadwal sosialisasi, dan debat kandidat. Selain itu, koran lokal, majalah dinding desa, atau bahkan pengumuman dari masjid/gereja dapat menjadi saluran penting untuk menyebarkan informasi.

Pemanfaatan Teknologi Digital dan Media Sosial yang Adaptif

Meskipun akses internet terbatas, pemanfaatan teknologi digital masih bisa diadaptasi untuk menjangkau pemilih di kepulauan. Strategi ini bukan hanya mengandalkan konektivitas, tetapi juga memanfaatkannya secara cerdas.

Konten Offline-Friendly Materi edukasi tidak selalu harus diakses secara online. Tim edukasi bisa membuat video pendek, komik digital, atau infografis yang bisa diunduh sekali dan disebar dari satu gawai ke gawai lainnya melalui Bluetooth atau *flash disk*. Materi ini kemudian dapat diputar di acara-acara komunitas menggunakan proyektor atau TV portabel yang bertenaga surya.

Pemanfaatan Media Sosial dengan Bijak Meskipun sinyal internet mungkin lemah, beberapa warga, terutama

pemuda, mungkin masih memiliki akses ke media sosial. Tim edukasi dapat menggunakan WhatsApp Group atau Facebook Group yang dikelola secara lokal untuk menyebarkan "bite-sized information" (informasi ringkas), seperti pengumuman penting atau jadwal sosialisasi. Jaringan ini juga bisa menjadi platform bagi pemilih untuk bertanya dan berdiskusi.

Aplikasi atau Website Ramah Data Jika ada anggaran, KPU dapat bekerja sama dengan pengembang untuk membuat aplikasi atau website ringan yang tidak membutuhkan banyak data. Aplikasi ini bisa berisi informasi dasar tentang DPT, profil kandidat, dan prosedur pemilu, yang bisa diakses secara offline setelah diunduh.

Program Pelatihan bagi Petugas Pemilu dan Fasilitator Edukasi

Kunci dari setiap program edukasi adalah sumber daya manusianya. Di kepulauan, di mana sebagian besar informasi disebarkan secara lisan, petugas pemilu dan fasilitator harus dilatih secara khusus untuk menjadi agen edukasi yang efektif.

Pelatihan Khusus Berbasis Komunitas Petugas pemilu (PPK, PPS, KPPS) di tingkat desa dan kecamatan harus menerima pelatihan yang tidak hanya fokus pada prosedur, tetapi juga pada keterampilan komunikasi. Mereka harus diajarkan bagaimana berbicara dengan

pemilih, terutama dengan kelompok rentan, menggunakan bahasa yang sederhana, dan menjadi pendengar yang baik.

Pelatihan Fasilitator Lokal (Peer-to-Peer Education) Merekrut dan melatih fasilitator dari dalam komunitas itu sendiri adalah strategi yang sangat efektif. Para nelayan, tokoh agama, atau guru lokal akan lebih mudah diterima oleh warga. Pelatihan ini harus membekali mereka dengan pengetahuan tentang:

- Materi Edukasi: Memahami hak pemilih, prosedur pemungutan suara, dan cara menganalisis kandidat.
- Metode Penyampaian: Menggunakan metode interaktif seperti diskusi kelompok, *storytelling*, atau permainan sederhana.
- Etika dan Non-Partisanship: Memastikan bahwa mereka menyampaikan informasi secara objektif tanpa memihak kandidat tertentu.

Dengan strategi ini, edukasi pemilih dapat menjangkau pemilih di pulau-pulau terpencil yang jarang tersentuh kehidupan modern. Kolaborasi yang kuat, pemanfaatan teknologi yang adaptif, dan investasi pada sumber daya manusia lokal akan memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun mereka berada, memiliki kesempatan untuk menjadi pemilih yang cerdas dan berpartisipasi dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Dampak dan Manfaat Edukasi Pemilih Cerdas di Kepulauan Terpencil

Edukasi pemilih yang cerdas dan terstruktur memiliki dampak yang luar biasa, terutama di wilayah kepulauan terpencil. Di daerah-daerah ini, di mana tantangan geografis dan sosial seringkali menghambat akses terhadap informasi, edukasi pemilih bukan sekadar program tambahan, melainkan sebuah keharusan. Dampak positifnya tidak hanya terasa pada hari pemilihan, tetapi juga dalam jangka panjang, membentuk fondasi demokrasi yang lebih kuat, adil, dan berdaulat. Terdapat tiga manfaat utama yang bisa dirasakan: meningkatnya partisipasi dan kualitas suara, berkurangnya kesalahan dan konflik pasca-pemilu, serta menguatnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Kualitas Suara

Salah satu dampak paling nyata dari edukasi pemilih cerdas adalah peningkatan partisipasi. Di pulau-pulau kecil terpencil, tingkat partisipasi seringkali rendah karena beberapa alasan, seperti logistik yang sulit, ketidaktahuan, atau bahkan apatisisme. Namun, edukasi yang tepat dapat mengubah ini secara drastis.

Mengubah Apatisme Menjadi Motivasi Banyak penduduk di pulau-pulau terpencil merasa bahwa suara mereka tidak penting. Jarak yang jauh dari pusat

kekuasaan membuat mereka merasa terpinggirkan dari proses politik. Edukasi pemilih cerdas, melalui Pilar 1 yang berfokus pada pengalaman pemilih, mampu mengatasi perasaan ini. Dengan pendekatan yang personal dan kontekstual, edukasi dapat meyakinkan mereka bahwa setiap suara memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Ketika materi edukasi relevan dengan isu-isu lokal, seperti masalah akses air bersih, transportasi antarpulau, atau harga jual hasil laut, pemilih akan melihat hubungan langsung antara pemilu dan kehidupan mereka. Hal ini mengubah pandangan mereka dari "politik itu urusan Jakarta" menjadi "politik itu urusan kita". Motivasi untuk berpartisipasi pun meningkat secara signifikan.

Meningkatkan Kualitas Suara Lebih dari sekadar jumlah partisipan, edukasi pemilih cerdas juga meningkatkan kualitas suara. Ini berarti pemilih tidak lagi memilih secara membabi buta, melainkan berdasarkan pertimbangan matang. Di masyarakat kepulauan terpencil, di mana informasi seringkali terbatas, pemilih rentan dipengaruhi oleh isu-isu SARA, politik uang, atau arahan dari tokoh-tokoh tertentu. Namun, melalui Pilar 4, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan Literasi Politik, pemilih dibekali dengan keterampilan berpikir kritis. Mereka diajarkan cara menganalisis rekam jejak kandidat, membedakan fakta dari hoaks, dan mengevaluasi janji kampanye.

Ketika pemilih memiliki kemampuan ini, mereka akan menuntut lebih dari sekadar janji manis atau uang tunai. Mereka akan memilih kandidat yang memiliki visi dan program yang konkret untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Dampaknya, kualitas perwakilan yang terpilih akan meningkat, karena mereka dipilih berdasarkan kompetensi dan komitmen, bukan popularitas atau afiliasi semata.

Mengurangi Kesalahan dan Konflik Pasca-Pemilu

Kesalahan teknis dalam pemungutan suara dan konflik pasca-pemilu adalah dua masalah serius yang sering terjadi, terutama di daerah yang kurang tersentuh edukasi. Edukasi pemilih cerdas berperan sebagai alat pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi kedua masalah ini.

Meminimalkan Suara Tidak Sah dan Kesalahan Teknis Pilar 3, yang berfokus pada edukasi hak dan proses pemilu, memiliki peran krusial dalam hal ini. Dengan menjelaskan prosedur mencoblos yang benar secara visual dan sederhana, edukasi dapat secara signifikan mengurangi jumlah surat suara yang tidak sah. Di daerah kepulauan terpencil, di mana banyak pemilih mungkin baru pertama kali memilih atau jarang berpartisipasi, panduan yang jelas tentang cara mencoblos, melipat surat suara, dan memasukkannya ke kotak yang tepat adalah kunci. Dengan demikian, setiap suara yang diberikan akan benar-benar terhitung, memperkuat integritas hasil pemilu.

Meredam Konflik dan Membangun Kepercayaan Konflik pasca-pemilu seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil yang dianggap tidak adil atau manipulatif. Edukasi pemilih cerdas, melalui Pilar 5 yang mendorong pendekatan inklusif, dapat meredam potensi konflik ini. Ketika pemilih memahami prosedur pemilu, hak-hak mereka, dan mekanisme pengaduan yang tersedia, mereka akan cenderung menggunakan jalur hukum daripada kekerasan untuk menyelesaikan sengketa. Mereka tahu bahwa ada lembaga seperti Bawaslu yang bisa mereka andalkan.

Selain itu, edukasi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi dan pluralisme (Pilar 4) juga berperan penting. Di komunitas yang kecil, pemilu seringkali bisa memecah belah. Namun, dengan pemahaman bahwa perbedaan politik adalah hal yang wajar, pemilih akan lebih mudah menerima hasil pemilu, bahkan jika kandidat pilihan mereka kalah. Hal ini membangun lingkungan yang lebih damai dan stabil, yang sangat vital untuk pembangunan berkelanjutan di pulau-pulau kecil.

Memperkuat Kepercayaan Publik terhadap Proses Demokrasi

Manfaat jangka panjang yang paling signifikan dari edukasi pemilih cerdas adalah memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Di daerah terpencil, di

mana akses informasi terbatas, rumor dan isu-isu negatif tentang pemilu mudah menyebar. Edukasi pemilih cerdas bertindak sebagai penangkal utama terhadap skeptisisme ini.

Langkah yang ditempuh adalah transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang proses pemilu, edukasi pemilih meningkatkan transparansi. Pemilih tahu apa yang seharusnya terjadi di TPS, sehingga mereka dapat bertindak sebagai pengawas. Mereka bisa mengenali potensi kecurangan atau pelanggaran, dan, yang terpenting, mereka tahu cara melapor. Keterlibatan aktif dari pemilih ini secara langsung mendorong akuntabilitas dari para penyelenggara pemilu.

Legitimasi Hasil Pemilu Ketika pemilu berjalan dengan partisipasi yang tinggi, kualitas suara yang baik, dan minimnya konflik, hasilnya akan memiliki legitimasi yang kuat. Pemimpin yang terpilih dianggap sebagai representasi sejati dari kehendak rakyat, bukan hasil dari manipulasi atau ketidakpedulian. Legitimasi ini sangat penting bagi stabilitas politik dan keberlanjutan program pembangunan di daerah kepulauan terpencil.

Membangun Budaya Politik yang Sehat Pada akhirnya, edukasi pemilih cerdas bukan hanya tentang satu kali pemilu, melainkan tentang membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif. Pemilih yang teredukasi akan terus mengawasi kinerja pemimpin

mereka setelah pemilu. Mereka akan menuntut janji-janji kampanye, berpartisipasi dalam musyawarah desa, dan menjadi bagian aktif dari pembangunan komunitas. Ini adalah siklus positif di mana pemilih yang cerdas melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk terus terlibat.

Secara keseluruhan, dampak edukasi pemilih cerdas di kepulauan terpencil sangatlah transformatif. Ia tidak hanya mengatasi masalah teknis dan logistik, tetapi juga menyentuh aspek paling mendasar dari demokrasi: pemberdayaan warga negara. Dengan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal, edukasi pemilih cerdas menjadi kunci untuk membuka potensi masyarakat kepulauan, mengubah mereka dari pemilih pasif menjadi arsitek masa depan mereka sendiri.

BAB XII.

MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS UNTUK PEMILU DI PULAU-PULAU TERPENCIL

Edukasi pemilih di daerah terpencil memiliki tantangan unik, seperti keterbatasan akses informasi, infrastruktur, dan tingkat literasi yang bervariasi. Model ini dirancang untuk mengatasi hambatan tersebut dengan pendekatan yang praktis, interaktif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

1. Materi Edukasi Praktis: Papan Informasi Keliling

Alih-alih menggunakan media cetak yang rumit, kita dapat membuat papan informasi visual yang mudah dipahami. Papan ini bisa berupa *spanduk gulung* atau papan tempel portabel yang dapat dibawa dari satu tempat ke tempat lain, misalnya ke balai desa, posyandu, atau tempat berkumpul warga.

Isi Papan Informasi:

- "Apa itu Pemilu?": Jelaskan dengan gambar sederhana. Gunakan ilustrasi perahu yang digerakkan oleh nakhoda (pemimpin) yang dipilih oleh para penumpang (rakyat).

- "Siapa Calon Kita?": Tempelkan foto-foto calon dengan nama dan nomor urut. Di bawah foto, tuliskan *tiga program unggulan* mereka dalam bahasa yang sederhana, misalnya:
 - Calon A: "Bantu Nelayan dengan Jaring Baru"
 - Calon B: "Buka Sekolah Gratis di Desa"
 - Calon C: "Bangun Jalan Lebih Baik"
- "Bagaimana Cara Mencoblos?": Tampilkan urutan mencoblos dengan gambar. Mulai dari menerima surat suara, masuk bilik suara, mencoblos, hingga memasukkan surat suara ke kotak. Gunakan tanda panah besar untuk menunjukkan alurnya.
- "Jadwal Penting": Tuliskan tanggal pencoblosan, lokasi TPS, dan jam buka-tutup dengan huruf tebal dan besar.

2. Langkah-Langkah Edukasi Interaktif

Penyampaian materi harus melibatkan partisipasi warga secara langsung. Pendekatan ini lebih efektif daripada sekadar ceramah satu arah.

Langkah 1: Pendekatan Personal oleh "Relawan Pemilu Desa"

- Siapa Pelakunya? Ajak beberapa tokoh masyarakat yang dihormati, seperti ketua adat, guru, atau tokoh agama, untuk menjadi relawan. Mereka lebih mudah dipercaya oleh warga.

- Bagaimana Caranya? Para relawan ini mengunjungi rumah-rumah atau tempat berkumpul warga (saat ronda, di warung kopi) untuk berdialog santai. Mereka tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi warga.
- Contoh Kalimat: "Pak, Bu, sudah tahu siapa calon pemimpin kita nanti? Coba kita lihat bersama-sama, siapa yang kira-kira paling cocok untuk membantu desa kita."

Langkah 2: Simulasi Mencoblos (Latihan Praktik)

- Tujuan: Menghilangkan rasa takut atau kebingungan saat berada di TPS.
- Alat: Gunakan surat suara tiruan dan kotak suara dari kardus bekas.
- Proses:
 1. Kumpulkan warga di balai desa.
 2. Relawan menjelaskan kembali cara mencoblos menggunakan papan informasi.
 3. Setiap warga diberi satu surat suara tiruan.
 4. Mereka diajak untuk mencoba mencoblos di bilik suara tiruan.
 5. Setelah selesai, mereka memasukkan surat suara ke kotak suara.
- Manfaat: Warga menjadi lebih percaya diri dan tahu persis apa yang harus dilakukan di hari pencoblosan.

Langkah 3: Diskusi Interaktif "Mengenal Janji dan Fakta"

- Tujuan: Melatih warga untuk berpikir kritis.
- Proses:
 1. Relawan memancing diskusi dengan pertanyaan sederhana, misalnya: "Ada calon yang janji akan kasih kapal baru untuk setiap nelayan. Menurut Bapak/Ibu, kira-kira janji itu bisa terwujud atau tidak?"
 2. Fasilitasi warga untuk menyampaikan pendapat mereka. Relawan tidak perlu langsung menyalahkan, tetapi menuntun mereka untuk menganalisis.
 3. Relawan dapat menyimpulkan: "Jadi, kalau ada janji, kita harus pikirkan juga: dari mana uangnya, apakah calonnya punya pengalaman, dan apakah janji itu masuk akal."

Model ini berfokus pada tiga pilar utama:

1. Aksesibilitas Informasi: Informasi disajikan dalam bentuk visual yang mudah dibawa dan dipahami.
2. Partisipasi Aktif: Warga tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berinteraksi dan mencoba langsung.
3. Keterlibatan Tokoh Lokal: Menggunakan relawan dari desa sendiri untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif.

Dengan pendekatan ini, edukasi pemilih di daerah terpencil tidak lagi menjadi hal yang sulit, tetapi justru menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat.

Edukasi Pemilih Cerdas melalui Media Sosial?

Pemilih pemula dan kaum muda merupakan segmen demografi yang paling aktif menggunakan media sosial. Menurut berbagai survei, platform seperti TikTok dan Facebook mendominasi konsumsi konten harian mereka. TikTok dengan format video pendeknya menawarkan hiburan yang cepat, sementara Facebook tetap menjadi platform yang kuat untuk komunitas dan informasi berbasis teks yang lebih mendalam. Oleh karena itu, pendekatan edukasi pemilih yang efektif harus memanfaatkan karakteristik unik dari masing-masing platform.

Tujuan utama dari model ini adalah mengubah pandangan pemilih pemula dari sekadar "partisipasi" menjadi "pemilih cerdas". Pemilih cerdas tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga mampu mengidentifikasi hoaks, menganalisis visi-misi calon, dan memahami dampak pilihan mereka terhadap masa depan. Model ini dirancang untuk mencapai tujuan tersebut dengan tiga pilar utama: (1) Konten Menarik dan Relevan, (2) Strategi Distribusi yang Efektif, dan (3) Pengukuran Dampak yang Terukur.

Pilar 1: Konten Menarik dan Relevan (Karakteristik Konten di Tiap Platform).

Konten adalah jantung dari setiap kampanye media sosial. Konten edukasi pemilih harus dirancang khusus agar tidak terasa membosankan atau menggurui.

A. Strategi Konten untuk TikTok:

TikTok adalah platform video pendek dengan durasi maksimal 10 menit (meski video 15-60 detik jauh lebih populer). Konten di TikTok harus singkat, padat, visual, dan menggunakan tren yang sedang viral.

1. Format Video Interaktif dan Tren (Challenges dan Duet):

- Challenge #SuaraMuda: Ajak pengguna membuat video singkat tentang "Kenapa Kamu Harus Memilih?". Konten bisa berupa video mereka sedang berdiskusi dengan teman, menunjukkan KTP sebagai tanda siap memilih, atau bahkan menari dengan lirik yang berisi ajakan untuk memilih.
- Video Duet dan Stitch: Gunakan fitur Duet atau Stitch untuk mengomentari video kampanye calon, menanggapi berita pemilu, atau berinteraksi dengan video edukasi pemilu dari akun lain. Misalnya, sebuah akun edukasi bisa membuat video "Apa itu money politics?" dan mengundang pengguna untuk Duet dengan menambahkan contoh atau pengalaman mereka.

2. Konten Edukasi dalam Bentuk Komedi atau Drama Singkat:
 - Skit Komedi: Buat video skenario lucu yang menampilkan seorang pemilih pemula yang kebingungan membedakan antara informasi yang benar dan hoaks. Misalnya, seorang teman datang dengan berita hoaks, dan teman yang lain dengan cerdas membantahnya sambil memberikan sumber informasi yang valid.
 - Mini Series: Buat seri video pendek dengan karakter yang konsisten. Misalnya, "Petualangan Budi Mencari Tahu Visi-Misi Calon". Setiap episode 30 detik membahas satu calon atau satu isu pemilu.
3. Visualisasi Data yang Cepat dan Jelas (Infografis Bergerak):
 - Motion Graphics: Buat video infografis dengan animasi sederhana tentang cara mencoblos yang benar, tahapan pemilu, atau bedanya DPR, DPD, dan DPRD. Gunakan ilustrasi yang lucu dan warna-warna cerah.
 - Listicle Videos: Video dengan format "3 Hal yang Wajib Kamu Tahu Sebelum Memilih" atau "5 Ciri-ciri Hoaks Politik". Format ini mudah dicerna dan seringkali viral.

4. Live Q&A dan Interaksi Langsung:
 - o Manfaatkan fitur Live untuk mengadakan sesi tanya-jawab singkat bersama pakar, akademisi, atau bahkan tokoh masyarakat lokal. Fokus pada topik yang paling diminati kaum muda, seperti "Dampak Pemilu terhadap Lapangan Kerja" atau "Cara Melaporkan Kecurangan".

B. Strategi Konten untuk Facebook:

Facebook lebih cocok untuk konten yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Konten di Facebook harus informatif, kredibel, dan membangun komunitas.

1. Grup Diskusi dan Komunitas Digital:
 - o Buat Grup Facebook: Buat grup khusus seperti "Pemilih Cerdas 2024" yang dikelola secara profesional. Grup ini berfungsi sebagai ruang aman bagi pemilih pemula untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi informasi tanpa takut dicemooh atau mendapat serangan hoaks.
 - o Aturan Grup yang Jelas: Terapkan aturan ketat untuk mencegah hoaks dan ujaran kebencian. Setiap informasi yang dibagikan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh moderator.
2. Konten Infografis dan Carousel yang Detail:
 - o Infografis Statis: Buat infografis yang membandingkan visi-misi dua calon, rekam jejak, atau kebijakan mereka di isu tertentu

- (misalnya, pendidikan atau lingkungan). Desainnya harus bersih dan mudah dibaca.
- Carousel Post: Gunakan fitur carousel untuk menjelaskan topik yang lebih kompleks secara bertahap. Misalnya, slide pertama bisa berupa judul "Apa itu Politik Uang?", lalu slide berikutnya berisi penjelasan, contoh, dan sanksi hukumnya.
3. Video Berdurasi Sedang (1-5 Menit) dan Facebook Live:
- Video Penjelasan: Buat video berdurasi 3-5 menit yang menjelaskan suatu topik secara mendalam. Misalnya, "Analisis Kritis Janji Kampanye Calon A tentang Subsidi Pertanian". Video ini bisa direkam dengan format seperti *podcast* yang menampilkan dua orang berdiskusi.
 - Facebook Live Diskusi Panel: Undang para ahli, akademisi, atau jurnalis untuk berdiskusi secara langsung melalui Facebook Live. Topik bisa lebih serius dan mendalam dibandingkan di TikTok. Ajak audiens untuk berinteraksi melalui kolom komentar.
4. Konten Berbasis Teks dan Kisah Inspiratif:
- Artikel Ringkas: Tulis artikel atau *post* panjang tentang isu-isu pemilu. Misalnya, "Mengapa Suara Pemilih Pemula Sangat Penting?" atau "Kisah Sukses Pemimpin Muda yang Terpilih".

- Kisah Sukses Relawan: Ceritakan kisah-kisah inspiratif dari pemilih pemula yang aktif menjadi relawan pemilu, terlibat dalam kampanye, atau menjadi pemilih yang sangat cerdas.

Pilar 2: Strategi Distribusi yang Efektif (Mencapai Target Audiens)

Konten sehebat apapun tidak akan efektif jika tidak sampai ke target audiens. Strategi distribusi harus memanfaatkan algoritma media sosial dan jaringan komunitas.

A. Strategi Distribusi di TikTok:

1. Hashtag dan Tren: Gunakan hashtag yang relevan dan sedang tren seperti #Pemilu2024, #PemilihMuda, #SuaraRakyat, atau hashtag spesifik kampanye #NamaCalon. Gabungkan dengan hashtag umum seperti #Indonesia atau #FYP (For Your Page).
2. Konsistensi Upload: Unggah konten secara konsisten, setidaknya 3-5 video per minggu. Algoritma TikTok menyukai akun yang aktif.
3. Kolaborasi dengan Influencer dan Kreator Konten: Ajak kreator TikTok yang memiliki audiens pemilih pemula untuk berkolaborasi. Mereka bisa membuat video dengan pesan edukasi pemilih yang disisipkan secara halus atau bahkan membuat *challenge* bersama.

4. Iklan Berbayar: Jika anggaran tersedia, manfaatkan iklan TikTok untuk menargetkan audiens berdasarkan usia (17-25 tahun), lokasi, dan minat (politik, berita, dll).

B. Strategi Distribusi di Facebook:

1. Optimasi SEO dan Keyword: Gunakan kata kunci yang relevan dalam judul grup atau postingan agar mudah ditemukan melalui pencarian Facebook.
2. Promosi Silang: Bagikan postingan dari halaman ke grup-grup diskusi yang relevan (tentunya dengan izin admin). Contohnya, postingan tentang "Pentingnya Suara Anak Muda" bisa dibagikan ke grup alumni universitas atau komunitas diskusi politik.
3. Interaksi Aktif di Kolom Komentar: Jawab setiap pertanyaan dan tanggapan di kolom komentar. Interaksi yang tinggi akan meningkatkan jangkauan postingan. Jangan biarkan komentar negatif atau hoaks tanpa klarifikasi.
4. Iklan Berbayar Facebook: Facebook memiliki fitur target audiens yang sangat detail. Manfaatkan ini untuk menargetkan pemilih pemula dengan iklan yang berisi ajakan untuk bergabung di grup diskusi atau menonton video edukasi.

Pilar 3: Pengukuran Dampak yang Terukur

Efektivitas sebuah kampanye media sosial harus diukur untuk mengetahui keberhasilannya dan area mana yang perlu diperbaiki.

A. Metrik Kualitatif:

- Analisis Sentimen: Pantau komentar dan diskusi untuk mengetahui apakah konten diterima secara positif atau negatif.
- Keterlibatan Diskusi: Amati apakah konten berhasil memicu diskusi yang konstruktif dan kritis di kolom komentar atau grup.

B. Metrik Kuantitatif (Menggunakan Insights):

- Jangkauan (Reach) dan Tayangan (Impression): Berapa banyak orang yang melihat konten? Jangkauan menunjukkan seberapa luas informasi tersebar.
- Keterlibatan (Engagement): Jumlah like, share, komentar, dan saves. Angka ini menunjukkan seberapa interaktif konten tersebut.
- Pertumbuhan Pengikut: Berapa banyak pengikut baru yang didapat selama kampanye? Ini menunjukkan daya tarik konten.
- Analisis Konversi (untuk Facebook): Apakah ajakan untuk bergabung ke grup atau mengunjungi tautan berhasil?

- Durasi Tonton Rata-rata (untuk Video): Di TikTok dan Facebook, metrik ini sangat penting. Semakin lama audiens menonton, semakin efektif konten tersebut.

Model edukasi pemilih cerdas ini bukan sekadar mengunggah konten, melainkan membangun sebuah gerakan digital. Dengan memanfaatkan karakteristik unik dari Facebook dan TikTok, kita dapat menciptakan ruang aman dan menarik bagi pemilih pemula untuk belajar, berdiskusi, dan akhirnya membuat keputusan elektoral yang cerdas.

Contoh Skenario Pelaksanaan:

- Bulan Pertama (Fase Awal):
 - TikTok: Rilis video pengenalan #SuaraMudaChallenge. Ajak pengguna untuk menjawab pertanyaan "Mengapa Suaramu Penting?" dengan video kreatif mereka. Kolaborasi dengan 3-5 influencer lokal.
 - Facebook: Buat grup "Pemilih Cerdas 2024". Rilis infografis dasar tentang "Apa itu pemilu?" dan "Siapa saja yang berhak memilih?". Promosikan grup tersebut di akun Instagram dan Twitter.
- Bulan Kedua (Fase Pertengahan):
 - TikTok: Rilis video skenario drama komedi tentang bahaya hoaks. Buat video motion

- graphics yang menjelaskan cara mencoblos. Adakan sesi Live Q&A dengan seorang pakar pemilu.
- Facebook: Rilis video analisis singkat visi-misi calon-calon. Adakan diskusi panel Facebook Live tentang "Isu Lingkungan dan Janji Politik". Bagikan artikel-artikel ringkas di grup.
 - Bulan Ketiga (Fase Kritis menjelang Pemilu):
 - TikTok: Rilis video pengingat hari-H pemilu dengan format yang menarik dan *upbeat*. Ajak pengguna Duet dengan video yang menunjukkan mereka sudah siap memilih.
 - Facebook: Rilis infografis detail tentang "Cara Melaporkan Kecurangan" dan "Mengapa Menjaga Suara Kita Penting". Selenggarakan sesi Live untuk menjawab pertanyaan *last-minute* dari pemilih pemula.

Perbedaan Pendekatan Edukasi di Era Digital

Strategi edukasi pemilih yang cerdas di era digital, seperti penggunaan TikTok dan Facebook untuk memobilisasi kaum muda dengan konten menarik, memang sangat efektif di daerah dengan akses internet yang memadai. Saat mendekati hari-H pemilu, rilis video pengingat yang *upbeat* di TikTok dan sesi Live interaktif di Facebook menjadi cara ampuh untuk menjaga antusiasme dan menjawab pertanyaan mendesak dari pemilih.

Namun, pendekatan yang mengandalkan teknologi ini tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Di daerah kepulauan terpencil dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tidak merata, seperti Pulau Tolonuo, Pulau Kolorai, dan Pulau Maitara, tantangan terbesar datang dari keterbatasan jaringan yang membuat penggunaan media sosial menjadi tidak realistis. Oleh karena itu, analisis ini akan menguraikan kondisi objektif di ketiga pulau tersebut untuk merumuskan pendekatan edukasi pemilih yang paling efektif, dengan mempertimbangkan keterbatasan media sosial.

Edukasi pemilih yang cerdas sangat penting untuk memastikan partisipasi yang berkualitas dalam pemilu. Namun, di daerah kepulauan terpencil, seperti Pulau Tolonuo, Pulau Kolorai, dan Pulau Maitara, tantangan terbesar datang dari infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tidak merata. Analisis ini akan menguraikan kondisi objektif di ketiga pulau tersebut dan merumuskan pendekatan edukasi pemilih yang paling efektif, dengan mempertimbangkan keterbatasan media sosial.

1. Pulau Tolonuo: Ketergantungan dan Keterbatasan Jaringan

Pulau Tolonuo menghadapi kendala serius karena tidak memiliki tower jaringan sendiri. Ketergantungannya

pada jaringan dari Tobelo dan Tobelo Utara berarti akses internet sangat tidak stabil, lemah, dan sering terputus. Dalam kondisi ini, penggunaan media sosial seperti Facebook dan TikTok untuk edukasi pemilih hampir tidak mungkin dilakukan secara efektif. Video-video TikTok yang membutuhkan koneksi internet cepat tidak akan bisa dimuat, dan konten Facebook yang lebih berat (seperti gambar atau video) akan sulit diakses. Oleh karena itu, pendekatan edukasi di Tolonuo tidak dapat mengandalkan media sosial. Strategi yang lebih realistis adalah menggunakan metode konvensional, seperti pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, atau papan informasi fisik yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Materi edukasi harus disiapkan secara *offline* dan disampaikan langsung oleh relawan lokal.

2. Pulau Kolorai: Mengandalkan Jaringan Jarak Jauh

Kondisi di Pulau Kolorai serupa dengan Tolonuo, bahkan mungkin lebih menantang. Ketergantungan pada jaringan dari Pulau Morotai membuat sinyal menjadi sangat lemah dan tidak dapat diandalkan untuk penggunaan media sosial yang intensif. Meskipun jaringan mungkin sesekali tersedia, ia tidak cukup kuat untuk menayangkan video atau memuat konten interaktif secara stabil. Mengandalkan Facebook dan TikTok di sini hanya akan membuang-buang sumber daya dan tidak akan mencapai target audiens secara efektif. Sama seperti

di Tolonuo, fokus edukasi pemilih di Kolorai harus bergeser dari platform digital ke metode komunikasi langsung. Relawan harus menjadi ujung tombak dalam menyebarkan informasi pemilu melalui sosialisasi, simulasi pencoblosan, dan diskusi langsung dengan masyarakat.

3. Pulau Maitara: Peluang Pemanfaatan Teknologi Ganda

Pulau Maitara memiliki kondisi TIK yang jauh lebih baik dibandingkan dua pulau lainnya. Dengan tower jaringan Telkomsel sendiri dan jangkauan jaringan dari Pulau Tidore dan Ternate, akses internet di pulau ini relatif stabil dan memungkinkan penggunaan media sosial. Keberadaan jaringan yang kuat menjadi modal penting untuk mengimplementasikan model edukasi pemilih cerdas melalui Facebook dan TikTok. Di sini, pemilih pemula dan kaum muda dapat dengan mudah mengakses konten video singkat, infografis, dan diskusi grup secara daring. Model edukasi yang berfokus pada konten digital dapat diterapkan dengan efektif, seperti yang diuraikan pada panduan sebelumnya.

4. Strategi Edukasi yang Tepat Sasaran

Berdasarkan kondisi objektif di ketiga pulau, strategi edukasi pemilih harus disesuaikan. Untuk Pulau Tolonuo dan Kolorai, fokus harus dialihkan dari media digital ke interaksi langsung. Pemanfaatan tokoh masyarakat,

relawan lokal, dan media visual sederhana (seperti spanduk, brosur *offline*, atau papan informasi) adalah kunci keberhasilan. Tujuannya adalah memastikan setiap warga, tanpa memandang tingkat literasi digital mereka, mendapatkan informasi yang akurat mengenai pemilu.

Di Pulau Maitara, potensi media sosial harus dimanfaatkan secara maksimal. Kampanye di Facebook dapat digunakan untuk membangun komunitas digital dan ruang diskusi yang aman bagi pemilih pemula. Sementara itu, TikTok dapat menjadi media yang efektif untuk menyebarkan informasi singkat dan menarik tentang tata cara memilih, profil calon, dan tips mengenali hoaks. Kombinasi kedua platform ini akan menciptakan ekosistem informasi yang komprehensif, di mana informasi dapat disebarkan secara cepat dan diverifikasi melalui diskusi yang mendalam.

Pendekatan Adaptif

Pengalaman dari ketiga pulau ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pendekatan edukasi pemilih yang cocok untuk semua daerah. Di daerah kepulauan terpencil dengan infrastruktur terbatas seperti Tolonuo dan Kolorai, ketergantungan pada media sosial adalah hal yang tidak realistis dan kontraproduktif. Di sana, kekuatan relasi sosial dan komunikasi tatap muka jauh lebih efektif. Sebaliknya, di daerah dengan TIK yang memadai seperti Maitara, media sosial dapat menjadi alat

yang sangat kuat untuk meningkatkan literasi politik kaum muda. Oleh karena itu, kunci keberhasilan edukasi pemilih di daerah terpencil adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, di mana strategi disesuaikan dengan kondisi infrastruktur dan sosial-budaya setempat.

Analisis ini juga menyoroti kebutuhan akan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur TIK di daerah-daerah terpencil. Tanpa jaringan yang memadai, keterlibatan publik dalam proses demokrasi digital akan tetap menjadi tantangan besar. Di masa depan, kebijakan edukasi pemilih harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur, agar setiap warga negara, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap informasi pemilu yang akurat dan dapat diandalkan. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa pemilu benar-benar inklusif dan demokratis.

BAB XIII.

MEMBANGUN DEMOKRASI KEPULAUAN YANG CERDAS DI MALUKU UTARA

Demokrasi, sebagai sebuah sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, memiliki manifestasi yang beragam, disesuaikan dengan konteks geografis, sosial, dan kultural suatu wilayah. Di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, implementasi demokrasi dihadapkan pada tantangan yang tidak biasa dan kompleks. Geografi yang terpecah, dengan lebih dari 800 pulau dan hanya sebagian kecil yang berpenghuni, menciptakan hambatan logistik dan komunikasi yang signifikan. Kondisi ini secara fundamental memengaruhi dinamika politik, partisipasi publik, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Narasi ini bertujuan untuk mengelaborasi secara mendalam kondisi demokrasi di Maluku Utara, mengidentifikasi akar masalahnya, menganalisis solusi yang prospektif, dan mengkaji dampak transformatifnya dalam kerangka berpikir yang ilmiah, obyektif, dan kritis.

Demokrasi di Maluku Utara tidak dapat dipahami hanya melalui lensa elektoral, melainkan harus dilihat sebagai sebuah proses holistik yang mencakup partisipasi,

transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Keterpencilan geografis tidak hanya membatasi akses fisik, tetapi juga menciptakan kesenjangan digital yang tajam, yang pada gilirannya memicu ketidakmerataan informasi. Situasi ini diperparah oleh dominasi politik identitas dan pragmatisme, serta marginalisasi kelompok rentan, terutama perempuan dan pemuda. Namun, di tengah tantangan ini, muncul peluang baru yang ditawarkan oleh era digital untuk mereformasi sistem demokrasi. Dengan adopsi teknologi yang tepat, penguatan literasi politik, dan pembangunan kebijakan yang inklusif, Maluku Utara memiliki potensi untuk membangun model demokrasi kepulauan yang cerdas (*smart insular democracy*) yang tidak hanya tangguh tetapi juga adaptif terhadap realitas geografisnya.

1. Evaluasi Kondisi Demokrasi: Kesenjangan Struktural dan Kultural

Analisis kondisi demokrasi di Maluku Utara menunjukkan adanya kesenjangan struktural dan kultural yang menggerus prinsip-prinsip dasar demokrasi substantif. Tiga isu utama menonjol dan saling berkelindan: kesenjangan infrastruktur digital, dominasi politik transaksional, dan marginalisasi partisipasi publik.

1.1. Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Informasi: Manifestasi Digital Divide

Kesenjangan digital (*digital divide*) merupakan masalah fundamental yang secara langsung memengaruhi kualitas demokrasi di Maluku Utara. Meskipun ibu kota provinsi, Ternate, telah menikmati konektivitas internet yang relatif baik, mayoritas masyarakat di pulau-pulau terpencil seperti Tolonuo, Kolorai, atau Maitara masih mengalami kesulitan akses internet yang kronis. Keterbatasan ini menghasilkan konsekuensi yang serius:

Pertama, ketidakmerataan informasi politik. Akses informasi menjadi hak istimewa, bukan hak universal. Warga di daerah terpencil lebih rentan terhadap disinformasi dan hoaks yang menyebar melalui jaringan sosial informal atau media konvensional yang minim verifikasi. Keterbatasan ini menghambat pembentukan pemilih yang rasional dan kritis, yang merupakan prasyarat penting dalam demokrasi modern.

Kedua, inefisiensi sosialisasi pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, menghadapi tantangan logistik yang monumental. Biaya dan waktu yang diperlukan untuk menjangkau setiap TPS di pulau-pulau kecil sangat tinggi, mengakibatkan sosialisasi yang tidak maksimal. Akibatnya, banyak pemilih yang tidak sepenuhnya memahami prosedur pemilu, hak pilih mereka, dan rekam jejak para calon, yang berpotensi memicu masalah administratif dan etika elektoral.

Ketiga, terpeliharanya politik uang. Minimnya literasi politik dan pemahaman yang mendalam tentang arti penting suara mereka membuat sebagian pemilih cenderung pragmatis. Mereka menganggap pemilihan sebagai transaksi ekonomi, di mana suara ditukar dengan imbalan materi. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan kemiskinan, tetapi juga kegagalan sistem politik untuk membangun kepercayaan dan kesadaran bahwa suara mereka adalah instrumen perubahan jangka panjang.

1.2. Dominasi Politik Identitas dan Pragmatisme: Erosi Demokrasi Berbasis Program

Analisis empiris menunjukkan bahwa pilihan politik di Maluku Utara seringkali didasarkan pada faktor non-rasional, seperti identitas dan pragmatisme, ketimbang visi dan misi programatik. Terdapat polarisasi yang jelas antara pemilih urban yang cenderung lebih kritis dan pemilih di daerah terpencil yang lebih terpengaruh oleh faktor-faktor sosiokultural.

Politik identitas, yang berlandaskan pada isu-isu agama dan kesukuan (SARA), masih menjadi instrumen efektif untuk memobilisasi massa. Kampanye negatif dan isu-isu sensitif seringkali digunakan untuk menggerus elektabilitas lawan. Hal ini menghambat terciptanya ruang publik yang sehat dan diskursus politik yang konstruktif. Di sisi lain, politik transaksional, di mana suara ditukar dengan uang atau barang, telah menjadi

praktik umum. Praktik ini merusak integritas pemilu dan melahirkan pemimpin yang tidak akuntabel, karena mereka tidak merasa terikat pada konstituen mereka, melainkan pada kelompok yang mendanai kampanye.

Ketergantungan pada tokoh lokal atau "orang kuat" (strongman) juga menjadi ciri khas. Pemilih cenderung lebih loyal pada figur yang memiliki pengaruh tradisional atau kekuasaan, bukan pada kompetensi atau program yang ditawarkan. Fenomena ini menghambat regenerasi kepemimpinan dan melanggengkan oligarki politik lokal yang kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

1.3. Minimnya Partisipasi Perempuan dan Pemuda: Representasi yang Terpinggirkan

Secara teoritis, demokrasi modern menghendaki partisipasi yang setara dari seluruh elemen masyarakat. Namun, di Maluku Utara, perempuan dan pemuda seringkali termarginalkan dalam proses politik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini:

Pertama, keterbatasan akses pendidikan politik. Program-program edukasi politik seringkali tidak menjangkau daerah terpencil, di mana akses informasi dan pendidikan formal masih terbatas. Akibatnya, perempuan dan pemuda kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif.

Kedua, budaya patriarki. Di banyak daerah, budaya patriarki masih sangat kuat, membatasi peran perempuan pada ranah domestik. Hal ini menyulitkan perempuan untuk tampil di ranah publik dan memegang posisi kepemimpinan.

Ketiga, kurangnya ruang partisipasi. Forum-forum politik, baik di tingkat desa maupun kabupaten, cenderung didominasi oleh tokoh-tokoh senior dan laki-laki. Akibatnya, aspirasi perempuan dan pemuda tidak terakomodasi dengan baik, menciptakan perasaan teralienasi dari proses politik.

2. Kerangka Perbaikan Demokrasi: Langkah-Langkah Konkret dan Prospektif

Melihat kompleksitas masalah di atas, perbaikan demokrasi di Maluku Utara memerlukan pendekatan multidimensi dan berkelanjutan. Solusi tidak dapat hanya berfokus pada aspek elektoral, tetapi harus mencakup penguatan infrastruktur, pendidikan, dan regulasi.

2.1. Memperluas Akses Digital dan Literasi Politik: Membangun Fondasi Demokrasi Cerdas

Reformasi harus dimulai dari pembangunan fondasi yang kuat, yaitu akses digital yang merata. Tanpa konektivitas, inisiatif lain akan sulit diimplementasikan.

- Pembangunan Infrastruktur Digital Prioritas: Pemerintah daerah harus menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah pusat dan sektor swasta

untuk memperluas jangkauan jaringan internet di pulau-pulau terpencil. Pembangunan infrastruktur seperti menara BTS dan satelit harus menjadi prioritas utama.

- Literasi Digital dan Politik: Diperlukan program pendidikan yang masif untuk meningkatkan literasi digital dan literasi politik. Program seperti "Sekolah Demokrasi Digital" dapat diimplementasikan untuk melatih pemuda dan tokoh masyarakat dalam memverifikasi informasi, mengenali hoaks, dan menggunakan platform digital untuk advokasi.
- Platform Informasi Inklusif: KPU dan Bawaslu harus mengembangkan platform informasi yang dirancang untuk kondisi kepulauan. Aplikasi seperti "Pemilu Kita" yang dapat diakses secara offline melalui SMS atau radio komunitas merupakan solusi yang inovatif untuk mengatasi keterbatasan sinyal internet.

2.2. Memberantas Politik Uang dan Meningkatkan Transparansi: Menegakkan Integritas Elektoral

Untuk menegakkan integritas elektoral, diperlukan langkah-langkah yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat.

- Penguatan Mekanisme Pengawasan: Bawaslu harus diberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar untuk melakukan pengawasan. Mekanisme pelaporan online yang mudah diakses dan menjamin

kerahasiaan pelapor harus dibangun untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan politik uang.

- **Transparansi Dana Kampanye:** Regulasi harus diperketat untuk mewajibkan kandidat mempublikasikan sumber dan penggunaan dana kampanye mereka melalui platform yang transparan. Publik dapat memantau dan mengawasi, sehingga tercipta akuntabilitas.
- **Kampanye Anti-Politik Uang:** Kampanye edukasi publik seperti "Gerakan Anti Politik Uang Maluku Utara" harus digalakkan. Kampanye ini melibatkan ormas, kampus, dan media lokal untuk membangun kesadaran kolektif tentang bahaya politik transaksional bagi masa depan daerah.

2.3. Mendorong Partisipasi Perempuan dan Pemuda: Mengakomodasi Suara yang Terpinggirkan

Demokrasi yang sehat memerlukan representasi yang inklusif. Langkah-langkah untuk mendorong partisipasi perempuan dan pemuda harus menjadi agenda prioritas.

- **Kuota Keterwakilan Inklusif:** Penegakan kuota 30% keterwakilan perempuan di tingkat legislatif harus diperluas hingga ke tingkat desa. Pemerintah daerah perlu memastikan kuota ini diisi oleh perempuan-perempuan yang kompeten.

- Membangun Ruang Partisipasi: Pendirian forum pemuda kepulauan sebagai wadah resmi untuk menyalurkan aspirasi politik merupakan langkah penting. Inisiatif seperti "Youth Parliament" dapat memberikan pengalaman langsung kepada pemuda tentang proses legislasi dan tata kelola pemerintahan.
- Program Pengembangan Kepemimpinan: Diperlukan program pelatihan kepemimpinan yang spesifik untuk perempuan dan pemuda di daerah terpencil. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada keterampilan praktis seperti negosiasi, manajemen proyek, dan komunikasi publik.

2.4. Memperkuat Layanan Publik: Meneguhkan Kontrak Sosial

Demokrasi tidak akan berkelanjutan tanpa kepercayaan publik. Kepercayaan ini hanya dapat dibangun melalui pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

- Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dasar: Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, seperti listrik dan air bersih, di seluruh pulau. Penggunaan teknologi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi solusi yang efisien dan berkelanjutan.

- Peningkatan Akses Kesehatan dan Pendidikan: Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas akan melahirkan masyarakat yang lebih sehat, teredukasi, dan kritis. Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu membuat pilihan politik yang rasional.
 - Mendorong Ekonomi Kreatif: Pemanfaatan internet yang stabil dapat mendorong ekonomi kreatif berbasis digital. Pemasaran hasil laut melalui e-commerce atau promosi pariwisata lokal melalui platform online dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat di pulau-pulau.
3. Dampak Transformasi dan Rekomendasi Kebijakan Jangka Panjang

Jika langkah-langkah perbaikan ini diimplementasikan secara sistematis, Maluku Utara akan mengalami transformasi yang signifikan dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi.

3.1. Dampak Kualitatif Demokrasi:

- Masyarakat Lebih Kritis: Dengan akses informasi yang merata dan literasi digital yang meningkat, masyarakat akan menjadi pemilih yang cerdas, yang memilih berdasarkan program kerja, bukan iming-iming uang atau identitas.
- Kepemimpinan yang Berkualitas: Transparansi rekam jejak dan sistem pengawasan yang efektif

akan memastikan bahwa hanya kandidat yang kompeten dan berintegritas yang memiliki peluang besar untuk menang.

- **Pembangunan yang Merata:** Pemerintahan yang akuntabel akan mengalokasikan sumber daya secara adil, memastikan bahwa daerah terpencil tidak lagi tertinggal, sehingga tercipta pembangunan yang inklusif.

3.2. Rekomendasi Kebijakan Jangka Panjang:

Untuk menjamin keberlanjutan transformasi ini, diperlukan strategi jangka panjang yang komprehensif.

- **Integrasi Kurikulum Pendidikan:** Materi pendidikan politik dan literasi digital harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.
- **Regulasi Kuat:** Pemerintah daerah harus membuat peraturan yang mendukung transparansi, partisipasi publik, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika elektoral.
- **Kemitraan Publik-Swasta:** Melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital dan program pendidikan.
- **Penguatan Kelembagaan:** Peningkatan kapasitas KPU dan Bawaslu agar mereka dapat bekerja lebih efektif, independen, dan responsif terhadap tantangan geografis.

Maluku Utara berada di persimpangan penting dalam perjalanan demokrasinya. Tantangan geografis dan sosial yang ada tidak seharusnya menjadi penghalang, melainkan pemicu untuk berinovasi. Dengan membangun jembatan digital, memberantas politik uang, dan melibatkan perempuan serta pemuda secara lebih aktif, Maluku Utara dapat membangun model demokrasi kepulauan yang cerdas dan inklusif.

Transformasi ini membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah, kerja sama dengan pemerintah pusat, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan upaya kolektif, Maluku Utara tidak hanya akan menjadi lebih demokratis, tetapi juga lebih sejahtera, di mana setiap suara dari setiap pulau memiliki arti yang sama pentingnya dalam menentukan masa depan bersama.

BAB XIV.

PENUTUP

Di era informasi yang masif, kemampuan untuk memilah dan memilih informasi adalah keterampilan bertahan hidup yang esensial. Di sinilah Literasi Digital berperan sebagai kunci utama. Pilar ini berfokus pada pembekalan pemilih dengan alat-alat kritis untuk menavigasi ruang digital yang kompleks. Kami tidak hanya mengajarkan cara menggunakan media sosial, tetapi juga bagaimana mengenali ciri-ciri berita hoaks, memverifikasi sumber informasi kandidat, dan memahami risiko dari disinformasi yang kian merajalela. Konten edukasi yang kami sajikan akan menjelaskan mengapa berita yang viral belum tentu benar dan bagaimana cara melakukan pengecekan fakta sederhana. Ini adalah langkah pertama yang krusial untuk memutus rantai penyebaran informasi palsu yang seringkali menjadi alat kampanye hitam. Dengan demikian, pemilih tidak lagi menjadi korban pasif dari narasi yang menyesatkan, melainkan agen aktif yang mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana yang tidak.

Pilihan politik yang rasional tidak bisa didasarkan pada janji manis semata, dan inilah yang menjadi fokus dari pilar kedua: Transparansi Rekam Jejak Kandidat

sebagai basis pilihan. Pilar ini memastikan bahwa pemilih memiliki akses mudah dan terpercaya terhadap informasi substansial tentang kandidat. Kami akan memfasilitasi penyajian visi-misi, program kerja yang konkret, dan yang paling penting, kinerja atau rekam jejak kandidat sebelumnya. Ini bukan sekadar daftar janji yang tak berdasar, melainkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, jika seorang kandidat berjanji akan membangun sekolah, model ini akan menyajikan infografis yang menunjukkan apakah ia memiliki pengalaman di sektor pendidikan atau bagaimana ia akan mendanai janji tersebut. Melalui pendekatan ini, pemilih didorong untuk membuat keputusan berdasarkan data, bukan hanya retorika kosong. Keterbukaan informasi ini menjadi fondasi bagi pemilu yang lebih jujur dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, model ini secara tegas berfokus pada perlawanan langsung terhadap praktik yang paling merusak integritas pemilu, yaitu Kampanye Anti Politik Uang. Konten edukasi akan secara gamblang menjelaskan dampak negatif politik uang—bukan hanya bagi individu yang menerima, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Kami akan menunjukkan bahwa satu lembar uang kertas yang diterima hari ini bisa berarti pemimpin yang korup dan pembangunan yang mandek selama lima tahun ke depan. Lebih dari itu, kampanye ini juga akan menyertakan informasi tentang sanksi hukum bagi pelaku

dan penerima, memberikan pemahaman bahwa praktik ini memiliki konsekuensi serius dan bukan sekadar “tradisi” politik. Dengan cara ini, kami berupaya mengikis budaya pragmatisme politik dan menanamkan kembali nilai-nilai integritas dan moralitas dalam setiap pilihan.

Pilar terakhir, yang menjadi fondasi dari seluruh model, adalah Pendidikan Dasar Demokrasi untuk menumbuhkan kesadaran. Sebelum berbicara tentang kandidat atau isu-isu spesifik, penting untuk kembali pada esensi demokrasi itu sendiri. Edukasi ini akan menjangkau pemilih untuk memahami hak pilih mereka sebagai sebuah kekuatan, pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu, dan bagaimana setiap suara memiliki bobot yang sama dalam menentukan masa depan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proses demokrasi dan mendorong pemilihan rasional yang didasarkan pada pertimbangan logis, bukan sekadar emosi atau imbalan sesaat. Dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai dasar demokrasi, pemilih akan menjadi lebih berdaya dan termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak.

Implementasi model ini dirancang sebagai proses bertahap dan terstruktur, memastikan setiap langkah dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan realitas di lapangan. Langkah pertama adalah Persiapan dan Analisis Kebutuhan, atau yang kami sebut sebagai "Menggali Data dari Akar Rumput." Kami tidak bisa

berasumsi bahwa tantangan di satu pulau sama dengan pulau lain. Oleh karena itu, tim akan melakukan survei dan FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, seperti pemilih, tokoh adat, pemuda, hingga perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan spesifik mereka, tantangan yang mereka hadapi secara langsung, serta aspirasi mereka terhadap pemilu yang lebih baik.

Selain itu, tahap persiapan ini juga mencakup pemetaan infrastruktur digital. Pertanyaan-pertanyaan penting akan diajukan: berapa persen warga yang memiliki smartphone? Jaringan internet apa yang tersedia (jika ada)? Aplikasi media sosial apa yang paling banyak digunakan? Jawaban-jawaban ini akan menjadi panduan vital dalam merancang materi dan strategi distribusi. Misalnya, jika mayoritas warga hanya memiliki akses ke Facebook dan WhatsApp, maka materi akan difokuskan pada dua platform tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa model kami tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Setelah pemetaan infrastruktur digital, tim akan mengidentifikasi aktor kunci di setiap desa. Tokoh agama, kepala desa, dan pemuda yang karismatik memiliki pengaruh yang besar. Mereka akan dipilih dan dilatih untuk menjadi agen edukasi atau "relawan digital" yang

akan membantu menyebarkan informasi dari tim pusat. Melalui pendekatan ini, pesan edukasi tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam komunitas itu sendiri, menjadikannya lebih kredibel dan mudah diterima.

Setelah data terkumpul, tim akan memulai Pengembangan Materi Edukasi Digital dengan membuat konten yang relevan dan mudah dicerna. Materi yang diproduksi tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Konten ini harus memadukan pendekatan visual dan interaktif. Salah satu bentuknya adalah Video Pendek dan Infografis. Video pendek berdurasi 1-3 menit akan dibuat dalam bahasa lokal agar lebih mudah diterima. Isinya bisa berupa tutorial sederhana tentang cara mencoblos surat suara, penjelasan tahapan pemilu, atau cerita dramatis tentang bahaya hoaks. Sementara itu, infografis sederhana akan dibuat untuk menyajikan data kompleks secara visual, seperti profil singkat kandidat, alur pemilu, atau perbandingan program kerja. Tampilan yang bersih dan warna yang menarik akan menjadi kunci agar infografis ini mudah dibaca dan dibagikan.

Mengingat tidak semua desa memiliki akses internet yang memadai, kami juga akan mengembangkan Podcast atau Siaran Radio. Materi ini akan dibuat dalam format diskusi santai dengan narasumber dari KPU/Bawaslu atau tokoh lokal yang kredibel. Podcast dapat didistribusikan melalui media konvensional atau disiarkan melalui radio

lokal. Isinya bisa berupa sesi tanya jawab tentang aturan pemilu, diskusi tentang isu-isu lokal, atau bedah rekam jejak kandidat. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pesan kami menjangkau setiap sudut desa, tanpa terkecuali.

Selain itu, karena survei awal kemungkinan besar akan menunjukkan bahwa WhatsApp dan Facebook adalah platform paling umum, kami akan menciptakan Modul Berbasis WhatsApp & Facebook. Ini bisa berupa serangkaian pesan teks dengan tautan ke video, infografis, atau polling sederhana untuk menguji pemahaman. Grup-grup diskusi di WhatsApp dan Facebook akan dikelola oleh relawan untuk memfasilitasi tanya jawab dan memoderasi diskusi agar tetap kondusif. Di wilayah dengan konektivitas yang lebih baik, kami juga akan mengembangkan Aplikasi Sederhana yang ringan. Aplikasi ini akan berisi panduan pemilu, fitur tanya jawab dengan relawan, dan mungkin sebuah "kuis pemilih" yang membantu pengguna menilai kandidat berdasarkan program kerja mereka. Aplikasi ini tidak perlu canggih, yang terpenting adalah fungsionalitas dan kemudahannya.

Materi yang bagus tidak akan berguna jika tidak sampai ke audiens yang dituju. Oleh karena itu, Strategi Distribusi Konten kami dirancang untuk menjangkau setiap sudut desa, baik melalui media digital maupun pendekatan fisik. Media Sosial akan menjadi kanal utama.

Grup WhatsApp dan Facebook yang sudah teridentifikasi akan menjadi pusat penyebaran konten, di mana relawan lokal bertanggung jawab untuk membagikan konten secara rutin dan memfasilitasi interaksi. Kami juga akan berkolaborasi dengan influencer lokal, seperti pemuda yang aktif di media sosial atau tokoh agama yang memiliki banyak pengikut, untuk membantu menyebarkan pesan edukasi secara lebih luas dan kredibel.

Untuk menjangkau pulau-pulau yang sulit diakses, kami akan memperkenalkan inovasi unik bernama Layanan Bergerak (Mobile Unit). Tim akan menggunakan speedboat edukasi yang dilengkapi proyektor dan sistem suara portabel. Mereka akan berlayar dari satu pulau ke pulau lain, mengadakan "bioskop rakyat" di malam hari untuk memutar video edukasi di balai desa atau area terbuka lainnya. Selain itu, kios digital sederhana yang dilengkapi akses Wi-Fi terbatas akan didirikan di pusat-pusat desa. Di kios ini, warga dapat mengunduh materi edukasi secara gratis atau bertanya langsung kepada relawan yang bertugas. Meskipun fokus pada digital, kami tidak akan mengabaikan Media Konvensional. Siaran radio lokal akan menjadi platform penting untuk menyiarkan diskusi dengan KPU/Bawaslu. Poster dan buklet sederhana yang berisi informasi penting, seperti tanggal pencoblosan, lokasi TPS, dan ajakan untuk

menolak politik uang, akan ditempelkan di balai desa, warung, atau tempat-tempat strategis lainnya.

Model ini sangat menekankan pentingnya Pelibatan Tokoh Lokal dan Pendekatan Budaya sebagai jembatan kepercayaan dan relevansi. Informasi akan jauh lebih mudah diterima jika disampaikan oleh orang-orang yang dipercaya oleh komunitas. Di banyak komunitas di pulau terpencil, tokoh adat dan agama memiliki otoritas moral yang sangat kuat. Melibatkan mereka sejak awal, baik dalam FGD maupun sebagai agen edukasi, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Pesan anti politik uang atau pentingnya memilih pemimpin berintegritas, misalnya, akan lebih mengena jika disampaikan oleh seorang imam atau kepala adat.

Untuk menyampaikan pesan yang kompleks, kami akan memanfaatkan tradisi lisan yang sudah mengakar melalui Penggunaan Cerita Rakyat/Dongeng. Cerita rakyat atau dongeng lokal dapat diadaptasi untuk menyematkan pesan-pesan demokrasi, seperti pentingnya kejujuran, keadilan, dan musyawarah. Ini adalah cara yang lembut namun efektif untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi tanpa kesan menggurui. Selain itu, kami akan memfasilitasi Diskusi Kelompok di antara kelompok-kelompok sosial yang sudah ada, seperti remaja masjid, karang taruna, atau kelompok nelayan. Ini adalah ruang aman bagi pemilih, terutama pemuda, untuk bertanya,

berdebat, dan saling belajar tanpa tekanan, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan organik.

Tahap terakhir adalah Monitoring dan Evaluasi, yang bertujuan untuk mengukur dampak dan memperbaiki diri secara berkelanjutan. Setelah serangkaian kegiatan edukasi, tim akan melakukan Survei Pasca-Edukasi untuk mengukur peningkatan pemahaman pemilih tentang isu-isu yang telah disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan akan berfokus pada seberapa baik mereka sekarang dapat mengidentifikasi hoaks atau memahami visi-misi kandidat. Melalui media sosial, kami akan melakukan Analisis Keterlibatan Digital dengan menganalisis metrik seperti jumlah tayangan (views), pembagian (shares), dan komentar. Peningkatan keterlibatan ini dapat menjadi indikator bahwa konten kami menarik dan relevan. Hasil dari survei dan analisis akan digunakan untuk Perbaikan Konten Berdasarkan Masukan. Jika sebuah video tidak mendapatkan banyak respons, misalnya, kami akan mencari tahu alasannya dan membuat versi yang lebih baik. Proses ini memastikan bahwa model kami terus berevolusi dan menjadi lebih efektif seiring waktu.

Untuk menguji efektivitasnya, model ini akan dimulai dengan sebuah pilot project di beberapa pulau yang mewakili tantangan yang berbeda. Contohnya, di Tolonuo (dengan akses internet yang sangat terbatas),

Kolorai (dengan isu politik identitas yang kuat), dan Maitara (dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi). Di setiap lokasi, kami akan merekrut dan melatih relawan dari kalangan pemuda setempat. Mereka adalah kunci dari keberhasilan program, karena merekalah yang paling memahami dinamika sosial dan bahasa lokal. Mereka akan dilatih tidak hanya dalam materi edukasi, tetapi juga dalam teknik fasilitasi dan moderasi diskusi.

Kerja sama dengan KPU/Bawaslu adalah hal yang mutlak. Mereka akan menjadi narasumber utama untuk memvalidasi informasi tentang regulasi pemilu dan rekam jejak kandidat, memastikan setiap informasi yang kami sampaikan akurat dan tidak bias. Hal terpenting adalah model ini tidak hanya dijalankan saat pemilu. Edukasi berkelanjutan akan dilakukan bahkan di luar musim pemilu, dengan fokus pada pendidikan kewarganegaraan, pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa, dan pengawasan terhadap kinerja pemimpin terpilih.

Sebagai kesimpulan, Model Edukasi Pemilih Cerdas ini menawarkan sebuah solusi inklusif dan holistik dengan memadukan teknologi digital dan pendekatan sosio-kultural. Dengan strategi yang tepat, pemilih di pulau-pulau terpencil dapat bertransformasi dari sekadar objek politik menjadi subjek yang berdaya. Mereka akan menjadi lebih melek politik, lebih kritis terhadap hoaks, dan mampu membuat pilihan yang didasarkan pada

rekam jejak kandidat, bukan hanya janji kosong atau iming-iming materi.

Dampak yang diharapkan dari model ini dirancang untuk menciptakan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan, meneguhkan fondasi demokrasi. Peningkatan partisipasi rasional akan terlihat ketika pemilih memilih berdasarkan program, bukan uang atau sentimen SARA. Kemudian, penurunan politik uang dan hoaks akan menciptakan ruang publik yang lebih bersih dari praktik yang merusak demokrasi. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis, di mana legitimasi pemimpin terpilih akan semakin kuat karena mereka dipilih melalui proses yang adil. Pada akhirnya, model ini adalah investasi dalam masa depan demokrasi Indonesia. Dengan adaptasi yang tepat, ia dapat menjadi cetak biru bagi KPU/Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk membangun pemilih yang cerdas dan berdaulat di setiap sudut negeri, dari perkotaan hingga pulau terluar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulai, A.-G., & Crawford, G. (Eds.). (2021). *Research handbook on democracy and development*. Edward Elgar Publishing.
- Agustri & Sijaya, A. (2021). *Menyongsong pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia*.
- Albintani, M. (2016). *Berburu rente di Pulau Batam Provinsi istimewa Singapura dan Kepulauan Riau*.
- Altman, M. (2017). *Handbook of behavioural economics and smart decision-making: Rationality, heuristics, bias and governance*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Andoh, D. (1989). Democratic Transitions in Africa. In *Unesco Adult Education Information Notes*.
- Antlov, H., & Cederroth, S. (2021). *Elections in Indonesia: The New Order and beyond*. London: Routledge.
- Aspinall, E. (2003). *Local power & politics in Indonesia*. Pasir Panjang, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2020). *Democracy for sale: pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Austin, R. (2009). Democracy and Education. *Yearbook of the National Society for the Study of Education*, 108(1).
- Bailey, C., McCree, R., Lazarus, L., & Dietrich Jones, N. (Eds.). (2025). *The Routledge companion to applied qualitative research in the Caribbean*. Routledge.
- Baldacchino, G., & Wivel, A. (Eds.). (2020). *Handbook on the politics of small states*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Bergan, S. (2025). *European higher education, social responsibility, and the local democratic mission*. Temple University Press.
- Briguglio, L., Byron, J., & Moncada, S. (Eds.). (2020). *Handbook of governance in small states*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Caplan, B. (2011). *The myth of the rational voter: Why democracies choose bad policies*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Castells, M. (2011). *The rise of the network society*. Wiley.
- Caverley, J. D. (2014). *Democratic militarism: Voting, wealth, and war*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

- Congleton, R. D., Grofman, B., & Voigt, S. (Eds.). (2019). *The Oxford handbook of public choice (Vol. 1)*. Oxford: Oxford University Press.
- Corbett, J. (2015). *Being political: Leadership and democracy in the Pacific Islands*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- DeLuca, T. (1995). *The two faces of political apathy*. New York, NY: New York University Press.
- Denny JA. (2020). *Creating a political legacy: Introducing the 10 P model*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. New York, NY: Addison-Wesley.
- Dzenis, S. (2025). *Political correctness in academia: A public choice analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Erb, M. (2003). *Deepening democracy in Indonesia? Direct elections for local leaders and the paradox of decentralisation*. Adelaide, SA: University of Adelaide.
- Escobar, O., & Elstub, S. (Eds.). (2019). *Handbook of democratic innovation and governance*. Edward Elgar Publishing.
- Farinuddin, H., Ilwafa, A. R., & Al Ghiffari, A. A. (2024). *Meninjau kembali demokrasi di Indonesia*.

- GBP Editorial. (2023). *DIGI SMART BOOKS Understanding NCERT Democratic Politics - I*. Meerut, India: Gautam Book Point.
- Gendźwiłł, A., Kjaer, U., & Steyvers, K. (Eds.). (2022). *The Routledge handbook of local elections and voting in Europe*. London: Routledge.
- Graves, P. E. (2013). *Environmental economics: An integrated approach*. London: Routledge.
- Green, R. (2004). *The Commonwealth yearbook 2006. Commonwealth Secretariat*.
- Hamzah, B., Liliweri, A., & Pustaka, D. (2025). *Pemilu di daerah kepulauan, antara mekanisme administratif & partisipasi masyarakat*.
- Hargens, B. (2021). *Oligarchic cartelization in post-Suharto Indonesia*. London: Routledge.
- Harward, B. M., & Ainsworth, S. H. (Eds.). (2019). *Political groups, parties, and organizations that shaped America: An encyclopedia and document collection (Vols. 1-3)*. ABC-CLIO.
- Hassall, G. (2020). *Government and public policy in the Pacific Islands*. London: Routledge.
- Hatherell, M. (2019). *Political representation in Indonesia: The emergence of the new elite*. London: Routledge.

- Héritier, A., & Lehmkuhl, D. (2008). Introduction: the shadow of hierarchy and new modes of governance. *Journal of Public Policy*, 28.
- Holler, M. J., & Nurmi, H. (Eds.). (2013). *Power, voting, and voting power: 30 years after*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Internet Society. (2017). *Small Island Developing States - Discussion Draft 2017: A Global Reveiw of Internet Infrastructure Issues*.
- Jones, B. D. (2001). *Politics and the architecture of choice: Bounded rationality and governance*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Katsikas, S., & Zorkadis, V. (2019). *E-democracy – Safeguarding democracy and human rights in the 21st century*. Cham, Switzerland: Springer.
- Klöck, C., & Fink, M. (2019). *Dealing with climate change on small islands: Towards a just adaptation*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Krieger, J. (2001). *The Oxford companion to politics of the world*. Oxford: Oxford University Press.
- Krimmer, R., Volkamer, M., & Beckert, B. (Eds.). (2020). *Electronic voting: 5th International Joint Conference, E-Vote-ID 2020, virtual event, October 5–8, 2020, proceedings*. Cham, Switzerland: Springer.

- Kronsell, A., & Bäckstrand, K. (Eds.). (2015). *Rethinking the green state: Environmental governance towards climate and sustainability transitions*. Taylor & Francis.
- Kumar, L. A., Jayashree, L. S., & Manimegalai, R. (Eds.). (2020). *Proceedings of International Conference on Artificial Intelligence and Smart Systems (ICAIS 2020)*. Piscataway, NJ: IEEE.
- Lilleker, D., & Scullion, R. (2009). *Voters or consumers: Imagining the contemporary electorate*. Manchester, UK: Manchester University Press.
- Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*.
- Massey, A. (Ed.). (2019). *A research agenda for public administration*. Edward Elgar Publishing.
- Massey, A. (Ed.). (2019). *A research agenda for public administration*. Edward Elgar Publishing.
- McDonough, K., & Feinberg, W. (Eds.). (2003). *Citizenship and education in liberal-democratic societies: Teaching for cosmopolitan values and collective identities*. OUP Oxford.
- Meeks, B. (2014). *Critical interventions in Caribbean politics and theory*. Kingston: University of the West Indies Press.

- Menggo, S., Lon, Y. S., & Widyawati, F. (2021). The dynamic of local democracy in Indonesia: A study of law number 32/2004 toward number 23/2014. In *ICEHHA 2021: Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Humanities, and Health Advancement* (pp. 18-22). London: Routledge.
- Minnite, L. C. (2011). *The myth of voter fraud*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Montebello, M. (Ed.). (2019). *Handbook of research on digital learning*. IGI Global.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). *Voting behaviour in Indonesia since democratization: Examining the role of personality, ideology, and party image*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Niemi, R. G., & Weisberg, H. F. (Eds.). (1993). *Classics in voting behavior*. Washington, DC: CQ Press.
- OECD. (2004). *Promise and problems of e-democracy: Challenges of online citizen engagement*. OECD Publishing.
- Patel, D., Nandi, S., & Mishra, B. K. (Eds.). (2020). *IC-BCT 2019: Proceedings of the International Conference on Blockchain Technology*. Cham, Switzerland: Springer.
- Payne, A. (2022). *The International Crisis in the Caribbean*.

- Potter, R. B., Barker, D., & Klak, T. (2015). *The contemporary Caribbean*. London: Routledge.
- Project Vote Smart. (2014). *Voter's Self-Defense Manual: A manual on congressional elections*. Philipsburg, MT: Project Vote Smart.
- Robinson, C. (2010). *Electoral systems and voting in the United Kingdom*. London: Routledge.
- Ryan, P. Y. A., & Schoenmakers, B. (Eds.). (2009). *E-voting and identity: Second International Conference, Vote-ID 2009, Luxembourg, September 24-25, 2009, proceedings*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Sardini, N. H. (2017). *Mengeluarkan pemilu dari lorong gelap: Mengenang Husni Kamil Manik*.
- Satapathy, S. C., Bhateja, V., & Das, S. (Eds.). (2017). *Smart computing and informatics: Proceedings of the First International Conference on SCI 2017*. Singapore: Springer.
- Sidhu, R. K., Chong, H. K., & Yeoh, B. S. A. (2019). *Student Mobilities and International Education in Asia:*
- Smyth, R. (2020). *Elections, protest, and authoritarian regime stability: Russia, 2000–2020*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Sonius, D. (2020). *Divided we fall: The social and economic roots of political polarization in America*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

- Spring, J. (2012). *Education networks: Power, wealth, cyberspace, and the digital mind*. Taylor & Francis.
- Tambouris, E., & Macintosh, A. (Eds.). (2010). *Electronic participation: Second International Conference, ePart 2010, Lausanne, Switzerland, August 29–September 3, 2010, proceedings*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Taylor, M. (2006). *Rationality and the ideology of disconnection*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Thomas, M. A. M., Schweisfurth, M., Shields, R., & Jules, T. D. (Eds.). (2025). *The Bloomsbury handbook of method in comparative and international education*. Bloomsbury Publishing.
- Tien, H. M. (2016). *Taiwan's electoral politics and democratic transition: Riding the waves*. Abingdon-on-Thames, UK: Routledge.
- Triatmodjo, M., Merdekawati, A., & Pratama, N. A. (2022). *Pulau, kepulauan, dan negara kepulauan*.
- UNESCO. (1989). *Unesco Adult Education Information Notes*.
- Van Klinken, G., & Barker, J. (2018). *State of authority: State in society in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Wiseman, A. W., & Wolhuter, C. C. (Eds.). (2022). *World education patterns in the Global South: The ebb of global*

forces and the flow of contextual imperatives. Emerald Publishing Limited.

Yang, Z., & Krejci, C. (2024). Rational voter theory: An agent-based model. In *Proceedings of the 2023 International Conference of The International Society for the Study of Systems Science* (pp. 258–265). New York, NY: International Society for the Study of Systems Science.

Ziegenhain, P. (2016). *Institutional engineering and political accountability in Indonesia: Decentralisation and local elections.* Leiden, Netherlands: Brill.

INDEKS

A

Abdul-Gafaru Abdulai · 39
Adaptif · iv, 93, 111
Adhur · 21
Adriati Umar · 20, 27, 32
Afektif · 49
Agama · 129
Agustri · 18, 130
Ainsworth · 48, 52, 132
Ajhar Kurung · 20, 21, 28
Aji Deni · ii, xiii, 128, 129, 130
Akses informasi · xiv, 33, 115
Aksesibilitas · 89, 102
Albintani · 19, 130
Altman · 50, 130
Ambardi · 57, 134
Analisis · iv, 82, 105, 107, 109, 112,
115, 116, 123, 127
Ancaman · iii, 23, 41, 46, 131
Ancaman abrasi pantai · 23
Andoh · 130
Anggaran · 73
Anthony Payne · 40
Anto Stuart · 29
Apatisme · 96
APBD · 73
Aplikasi · 59, 94, 118, 124, 125, 132
Aspinall · 42, 43, 45, 47, 130
Aspinall dan Berenschot · 42, 45,
47
Asumsi · iii, 56, 57
Austin · 37, 130

B

Bäckstrand · 133
Badan Ad Hoc Pemilu · 17
Bahita Kurung · 20, 21, 29
Bakri La Suhu · ii, xiii, 130
Baldacchino · 40, 131
Barker · 134, 135
Bawaslu · 30, 47, 54, 79, 81, 92, 97,
115, 118, 121, 124, 125, 126, 128
Bawean · 17
Berenschot · 130
Berhala · 18
Berry Schoenmakers · 50, 51
Birokrasi · 132
Blockchain · 134
Boni Hargens · 44
Brian M. Harward · 48, 52
Brian Meeks · 46
Bryan Caplan · 56, 58, 60
Budi Anto · 20

C

C. Wolhuter · 37
Calon · 100, 104, 105, 132
Caribbean Politics and Theory · 46
Caroline Krejci · 59
Caverley · 60, 131
Cederroth · 45, 130
Cerdas · iii, iv, vi, xiv, xvi, 48, 49,
50, 51, 53, 95, 102, 104, 108,
117, 128
Cermin Demokrasi · iii, xiii, 33
Chong · 38, 135

Congleton · 59, 131

Corbett · 37, 131

Crawford · 130

Critical Interventions · 46

D

Daftar Pemilih Tetap (DPT) · 77

Darren Lilleker · 51

David Sonius · 56

Dealing · 46, 133

Definisi pemilih cerdas · 48

DeLuca · 56, 131

Demokrasi · iii, iv, xiii, xvi, 33, 36,

39, 41, 43, 44, 46, 60, 62, 81, 97,

114, 115, 116, 117, 118, 119,

120, 123, 129, 130

Denny JA · 42, 45, 131

Desa Kolorai · iii, 20, 21, 23, 25

Desentralisasi · 73

Detak Pustaka · 17

Dinamika · iii, 19, 43

Dinamika politik · 19

Disabilitas · 87, 88

Disinformasi · 83

Distribusi · 103, 106, 125

Downs · 56, 57, 58, 131

DPTb · 77

E

Edukasi pemilih cerdas · 96, 97, 98

Edward Aspinall · 44

Efektif · 103, 106

Efektivitas · iv, 74, 107, 131

Efthimios Tambouris · 52

Elections in Indonesia · 45, 130

Elit · 131

Elstub · 37, 131

Erb · 43, 131

Escobar · 37, 131

Etika · 95

Evaluasi · 75, 115, 127

E-voting · 134

F

Fadli Umar · 21, 22, 30

Farinuddin · 18, 131

Fasilitator · iv, 93, 94

Feinberg · 39, 133

Fiji Women's · 37

Fink · 46, 133

Forum · 37, 90, 117

G

GBP Editorial · 48, 132

Gendźwiłł · 46, 132

Gerry Van Klinken · 44

Google Earth · 21, 22

Googlemap · 25

Gordon Crawford · 39

Governance in Small States · 45

Graham Hassall · 45

Graves · 58, 132

Grofman · 59, 131

H

Halmahera Utara · 20, 128

Hamdani Resort · 30

Hamzah · 17, 132

Handbook of Local Elections · 46

Hans Antlov · 45

Hargens · 132

Hartati La Ida · 20, 29

Hashtag · 106

Hassall · 132

Hatherell · 44, 132

Héritier · 38, 132

Hoaks · 83, 104

Holler · 59, 132

Hung-Mao Tien · 43

I

Identitas · iii, 27, 28, 31, 32, 33, 41,
116

Ikatan · 129

Ikfan Peleger · 20, 28

Ilwafa · 18, 131

Indonesia · xi, 17, 19, 36, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 51, 57, 61, 80, 106,
128, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 129

Infografis · 71, 104, 105, 124

Informasi · ii, iv, xiv, 29, 33, 39, 55,
70, 71, 72, 76, 82, 100, 102, 115,
118, 126

Infrastruktur · 115, 117, 119

Inklusif · iv, 25, 86, 90, 118, 119

Inovasi · 132

Integritas · 55, 118

Internet · 132

J

Jack Corbett · 47

Jamain Labuha · 21, 22, 30

Janji · 83, 102, 105, 108

Jaringan · 36, 39, 68, 90, 94, 109,
110, 124

Jaringan internet · 36, 124

Joel Krieger · 46

Joel Spring · 37

Joshua Barker · 44

K

Kabupaten · 18, 20, 21, 128, 129,
130, 131

Kabupaten Kepulauan Aru · 18

Kampanye · 30, 75, 105, 111, 116,
118, 123

Kampanye negatif · 116

Kandidat · iv, 33, 55, 78, 83, 122

Karin Bäckstrand · 38

Kebijakan · 120, 131

Kecurangan · 104, 108

Kedekatan · 42

Kekuasaan · 31

Kepemimpinan · 89, 119, 120

Kepulauan · iii, iv, xiii, xvi, 18, 19,
23, 33, 41, 42, 44, 46, 64, 95,
130, 131, 132

Kepulauan Aru · 18

Kepulauan Riau · 18, 19, 130

Kesehatan · 23, 119

Kesejahteraan · iii, 23, 55

Kesenjangan · 23, 26, 33, 115

Keterampilan · iv, 82

Keterbatasan · iii, 19, 20, 29, 38, 87,
109, 115

Keterbukaan · 123

Keterikatan · 33

Ketimpangan · 130

Kewarganegaraan · iv, 80, 96

Khadijah · 23, 24, 25, 32

Klinken · 135

Klöck · 46, 133

Kognitif · 49

Kolaborasi · iv, xvi, 92, 95, 106, 108

Kolorai · iii, vii, xiv, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 30, 31, 33, 110, 111,
115, 127
Komisi Pemilihan Umum (KPU) ·
124, 129
Kompetensi · 55
Komunikasi · iv, 74
Komunitas · 68, 93, 94, 104
Konektivitas · 37, 38
Konflik · iv, 96, 97, 129, 131
Konsolidasi · 133, 129
Konvensional · 126
Korupsi · iii, 44, 81
KPPS · 94
KPU · 28, 29, 30, 33, 54, 81, 92, 93,
94, 115, 118, 121, 125, 126, 128
Kritik · iii, 58
Kualitas · iii, iv, 31, 32, 33, 60, 95,
96, 129
Kudrat Hamdani · 21, 22
Kutub Utara · 38

L

Laporan · 72
Legislatif · 81
Legitimasi · iii, 60, 98
Lehmkul · 38, 132
Lembaga · iv, 80, 81, 93, 115
Liddle · 134
Liliwari · 17, 132
Lilleker · 133
Lingkungan · xi, 108
Listrik · 23
Literasi · iv, 33, 37, 38, 40, 80, 82,
96, 117, 122
Literasi media · 40
Literasi politik · 82

Lokal · iii, iv, 43, 67, 68, 92, 93, 94,
102, 126, 129, 130

M

Mahkamah Konstitusi · 18, 81
Maimuna Moloku · 21, 22
Maitara · iii, vi, vii, ix, x, xiii, xiv,
20, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 109,
110, 111, 115, 127, 145
Majelis Diktilitbang · vii, x
Maluku Barat Daya · 18
Maluku Utara · v, vi, vii, ix, xi, xiii,
xvi, 18, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33,
36, 114, 115, 116, 117, 118, 120,
121, 128, 130, 131, 145
Marginal · iv, 87, 88
Marijan · 19, 133
Materi · iv, 66, 67, 71, 72, 74, 77, 78,
80, 87, 88, 89, 93, 94, 100, 110,
120, 124, 125
Merdekawati · 18, 135
Model Edukasi Pemilih Cerdas ·
vi, xiv, 128
Modern · 59
Morotai · 21, 110
Mukhlis Leki · 21, 31
Multikultural · 129
Musifiin Barapa · 20, 21, 29

N

Nafsia Keper · 21, 23, 31
Nasional · 93, 130
Nelayan · 100, 131
Niemi · 57, 134
Nilai · iv, 49, 81, 82
Novitasari Rahim · 20, 28
Nurmi · 60, 132

Nurul · ii, xiii, 23, 24, 25, 32, 33

Nurul Sintia Kahar · ii, xiii

O

OECD · 40, 134

Otonomi · iii, 44, 131

P

Partisipasi · iii, iv, 48, 54, 55, 61,
89, 90, 95, 102, 116, 118, 119,
131, 132

Partisipasi rasional · 54, 61

Partisipatif · 68, 131

Pembangunan · 25, 26, 117, 119,
120, 129, 131

Pemberdayaan · 25, 89, 131, 132

Pemerintah · iv, 73, 80, 81, 92, 117,
119, 120, 131

Pemilih · iii, iv, vi, xiv, xv, 30, 36,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67,
77, 78, 79, 81, 82, 83, 95, 98,
102, 103, 104, 105, 108, 116,
128, 131

Pemilih cerdas · 48, 49, 50, 52, 53,
54, 61, 79, 103

Pemilih rasional · 55

Pemilihan · 17, 18, 46, 92, 131, 132

Pemilu · iii, iv, 17, 19, 54, 60, 76,
78, 79, 92, 94, 96, 98, 100, 101,
104, 108, 118, 124, 132, 129

Pendapatan · 73

Pendekatan · iv, 64, 66, 68, 78, 86,
87, 88, 101, 108, 111, 126, 131

Pendidikan · iv, x, 37, 80, 82, 96,
119, 120, 123, 128, 130, 131

Pendidikan dasar · 128

Pengaduan · iv, 79

Pengawasan · 118, 131

Pengembangan · x, 119, 124

Pengetahuan · 49, 77

Perempuan · iv, 87, 88, 89, 116, 118

Perilaku · 50

Perpustakaan · 23

Perselisihan · 18

Pilar · xv, 62, 63, 64, 70, 76, 79, 80,
83, 86, 96, 97, 103, 106, 107,
122, 123

Pilkada · 27, 31, 33, 42, 44, 47, 78

Pilkada serentak · 27

Pilkada serentak 2024 · 27

Polarisasi · 32

Politik · iii, iv, vii, ix, xi, 30, 32, 33,
41, 43, 45, 46, 53, 54, 73, 80, 82,
96, 98, 104, 105, 108, 116, 117,
118, 123, 128, 129, 130, 131,
132, 145

Politik identitas · 41, 116

Politik uang · 43, 45, 46

Potensi pariwisata · 23

Pragmatisme · 27, 116

Pratama · 18, 135

Program · iv, vii, ix, xi, 72, 78, 83,
94, 116, 117, 118, 119, 128, 130,
131, 145

Prosedur · iv, 77, 79

Provinsi Kepri · 19

Pulau Berhala · 18

Pulau Kolorai · iii, vi, x, xiii, 22, 30,
109, 110

Pulau Maitara · iii, vi, vii, ix, x,
xiii, 20, 23, 25, 31, 32, 109, 110,
111, 145

Pulau Morotai · 21, 110
Pulau Tolonuo · iii, vi, x, xiii, 20,
21, 25, 27, 109, 111
Puskesmas · 21

Q

R

Radio komunitas · 67, 93
Rasional · iii, xv, 48, 54, 55, 56, 58,
59
Rasionalitas · iii, 27
Reformasi · 117, 130
Regulasi · 118, 120
Rekam jejak · 73
Relawan · 101, 102, 105, 110, 145
Representasi · 116
Riau · 18, 19, 130
Riset · x, 65

S

Safiril · 22, 23, 30
Sardini · 18, 134
Sarti · 23, 25
Segmentasi · 65
Sekolah · 23, 100, 118, 128
Sentimen · 28, 32, 33, 107
SIDS · 39
Sijaya · 18, 130
Simulasi · 101
Sistem · iv, 80, 133
Sistem politik · 133
Solusi · iii, 36, 117
Suara · iv, xiii, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 71, 76, 77, 95, 96, 97, 105,
106, 108, 118, 130
Suara dari Jantung Kepulauan ·
xiii

Suhaimi Robo · 23, 25, 32

T

Tantangan · iii, 28, 32, 33, 36, 43,
50, 51, 66, 121
Tantangan geografis · 121
Teknologi · iv, 51, 93, 110
Tenaga pengajar · 23
Teori Pemilih Rasional · iii, xv, 55,
56, 58, 59
Ternate · 110, 115, 128, 129, 130,
131
Tidore Kepulauan · 23, 131
Tobelo · 20, 21, 109, 128
Tobelo Utara · 20, 109
Toleransi · 82
Tolonuo · iii, vi, vii, x, xiii, xiv, 20,
21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
109, 110, 111, 115, 127, 128
Transparansi · 33, 118, 120, 122
Transportasi · iii, 17, 21
Triatmodjo · 18, 135

U

Uang · iii, 30, 32, 33, 41, 43, 73, 105,
118, 123
UMMU · iii, v, vii, xi, 128, 129
Undang-undang · 43
Undang-Undang No. 32/2004 · 43
UNESCO · 39, 135
Universitas · v, ix, xi, 128, 130, 145

V

Video · 71, 103, 104, 105, 107, 109,
124
Visi · 78, 104
Vote Smart's Voter's Self-Defense
Manual · 48

Voting · 52, 58, 131, 134

W

W · 37, 94, 130, 133, 134, 135

Ward Berenschot · 44

Wawancara · 20, 23, 74

William Liddle · 57

X

Y

Yahya · 23, 24, 25, 32, 33

Yapen · 18

Z

Z · 135

Zulfikar Ladjame · 22, 30, 31

Zulfikar Ladjame XE "Zulfikar

Ladjame" XE "Zulfikar

Ladjame" K Kelompok

marginal, 125 Z Zulfikar

Ladjame, 5, 14, 15, 129 · 22, 30,

31

BIODATA PENULIS



Dr. Aji Deni, S.Pd., M.Si. adalah seorang akademisi dan tokoh masyarakat yang lahir di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada 15 Desember 1975. Perjalanan hidupnya menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap pendidikan dan pengabdian, mengukir jejak signifikan baik di ranah akademik maupun sosial.

Pendidikan dasar hingga menengahnya ditempuh di kampung halaman, dimulai dari SD Inpres Tolonuo pada tahun 1987, lalu SMPN 1 Tobelo pada tahun 1990, dan SMA Muhammadiyah Tobelo pada tahun 1993. Minat awal Dr. Aji Deni pada bahasa membawanya melanjutkan studi Pendidikan Bahasa Jerman di IKIP Manado pada tahun 1993. Meskipun tidak diselesaikannya, ia kemudian beralih ke Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata 1 di FKIP Universitas Khairun Ternate dan berhasil lulus pada tahun 2003. Semangat belajarnya tidak berhenti sampai di situ; ia melanjutkan studi magister di Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2005, menyelesaikannya pada tahun 2007. Puncak pendidikannya adalah program

doktoral di bidang Politik Islam-Ilm Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di mana ia berhasil meraih gelar doktor pada September 2020.

Saat ini, Dr. Aji Deni mengabdikan sebagai Dosen Pascasarjana S2 Ilmu Administrasi dan Program Studi S1 Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Sejak tahun 2022, ia juga dipercaya menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara hingga tahun 2026, menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya dalam memimpin institusi akademik. Di luar dunia akademik, ia memiliki rekam jejak yang kaya dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa FKIP Unkhair (1998-1999) dan Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Maluku Utara (1999-2000), yang menegaskan jiwa kepemimpinannya sejak muda. Keterlibatannya dalam ranah publik semakin terlihat saat ia menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara dari tahun 2008 hingga 2014, sebuah posisi krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi di daerahnya. Hingga kini, ia masih aktif dalam berbagai organisasi penting, termasuk sebagai Pengurus AIPI Cabang Maluku Utara (2020-2023) dan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara (2022-2027), menegaskan

komitmennya yang berkelanjutan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan organisasi keagamaan.

Sebagai seorang akademisi, Dr. Aji Deni sangat produktif dalam menulis dan berkontribusi pada khazanah ilmiah, terutama di bidang politik dan administrasi. Karyanya telah diterbitkan dalam berbagai bentuk, baik sebagai penulis tunggal maupun kolaborasi, dengan rentang waktu publikasi dari tahun 2004 hingga 2023. Dr. Aji Deni memulai kontribusi literasinya yang tercatat dengan buku *Membangun Ternate menuju Kota Peradaban: Refleksi atas Agama, Demokrasi, dan Pembangunan di Era Multikulturalisme* (UMMU Press dan PSPK) pada tahun 2004. Dua tahun kemudian, di tahun 2006, ia menerbitkan *Konsolidasi Demokrasi: Menuju Keberlanjutan Politik Pasca Runtuhnya Rezim Soeharto* (Kibar Press, PSPK Publishing dan UMMU Press). Berlanjut ke tahun 2014, ia menulis *Politik Elite Lokal: Pemilu, Konflik dan Multikulturalisme* (Naufan Pustaka). Setahun kemudian, pada tahun 2016, Dr. Aji Deni menghasilkan *Buku Konsolidasi Demokrasi: Perbaikan Kualitas Demokrasi di Indonesia* (Naufan Pustaka). Kontribusinya juga merambah jurnal internasional, dengan publikasi di *International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)* pada tahun 2018, dan *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)* pada tahun 2020. Di tahun yang sama, 2020, ia menerbitkan buku

SIBUALAMO dalam Bingkai Persatuan dan Keragaman Budaya (Gramasurya).

Pada tahun 2021, ia turut terlibat dalam proyek penerjemahan buku teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yaitu *Public Administration Theories: Instrumental and Value Rationalities* (karya Lisheng Dong, diterbitkan oleh Gramasurya). Tahun 2022 menjadi tahun yang produktif dengan beberapa karya, di antaranya *Dikotomi Politik dan Administrasi* (bersama Saiful Deni, Gramasurya), *Institusionalisasi Partai Politik: Sebuah Kajian Politik Partai Amanat Nasional Maluku Utara di Awal Reformasi* (Gramasurya), dan *Faksionalisme Partai Politik Islam: Penyebab, Implikasi Dan Dampaknya Di Tengah Pusaran Politik Lokal* (Gramasurya). Pada tahun 2023, Dr. Aji Deni menerbitkan *Genealogis Gerakan Politik Majelis Mujahidin Indonesia* (bersama Agusmandha, penerbit Suara Muhammadiyah). Tahun 2024, sebagai penulis tunggal buku *“Elite Politik, Demokrasi, dan Ketimpangan* (Eureka). Dan saat ini, buku yang ada di tangan anda adalah karya buku terbaru *“Model Edukasi Pemilih Cerdas Untuk Pemilu di Pulau-Pulau Terpencil”*. Melalui berbagai buku dan artikel jurnal ini, Dr. Aji Deni terus memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan diskursus publik, khususnya di Maluku Utara.



Bakri La Suhu, S.IP., M.A., Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana (PPs) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak (Muhammad Fadlan B. La Suhu, Citria Vidia Putri Hi. La Suhu dan Muhammad Zhafran Hi. La Suhu).

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus yakni; Elite

Conflict on Power Contestation of Internal Political Party (2018), Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018). Sedangkan pada jurnal nasional yakni; Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara (2019), Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan, (2019), Refugee And Land Dispute (A Case Study at Gamsungi and Toso Village, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015) (2019), Social Conflicts In Church Development In Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village) (2019), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara (2021), Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano) (2021), Efektivitas Kerja Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Program Beras Bagi Masyarakat Miskin (RASKIN) TAHUN 2016 (Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu) (2021), Kebijakan Pendidikan Pancasila

dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017 DI Pulau Ternate (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara) (2022), Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan (2022), dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan (2022). Article tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID QZOnpycAAAAJ, Sinta ID 6096386 dan Scopus ID 57205478258 serta Garuda 1029082. Buku yang pernah penulis tulis yakni “Konflik Perebutan Ruang Hidup (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021”, “Konspirasi Elit Dibalik Pemekaran Daerah” Tahun 2022, “Sengketa Tapal Batas Di Tanah Kesultanan” Tahun 2022, “Batas Daerah Dalam Pusaran Konflik” Tahun 2022, Grand Design Pelayanan Kepolisian Di Wilayah Kepulauan” Tahun 2022 Dan “Potret Buram Pemerintahan : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022, serta “Konflik Sengketa Tanah Bandara Di Wilayah Tarakani” tahun 2022. Pada tahun 2023, beberapa Buku yang pernah penulis tulis antara lain “Pemimpin Ideal Catatan Untuk Calon Kepala Daerah”, “Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Wilayah Kepulauan”; “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Konsep Dan Aplikasi”; Kebijakan Publik.

Tahun 2024 Buku Yang Pernah Penulis Tulis Yaitu “Kebijakan Penanganan Illegal Fishing Di Wilayah Kepulauan”; “Partisipasi Politik Masyarakat & Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Pendekatan Konsep Dan Aplikasi)”.



Nurul Sintia Kahar adalah seorang Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UMMU yang berdedikasi, berasal dari Tidore, Maluku Utara. Lahir pada 19 Agustus 2002, Nurul Saat ini, Nurul di kampus, ia dikenal tidak hanya sebagai penggiat literasi mahasiswa yang tekun dan aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FISIP UMMU dan perannya sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Politik FISIP UMMU telah mengasah kemampuan analisis dan kepemimpinannya. Proyek buku ini menandai debutnya sebagai bagian dari tim peneliti Dosen dan Mahasiswa dalam publikasi, sebuah langkah penting dalam kontribusinya terhadap wacana keilmuan.

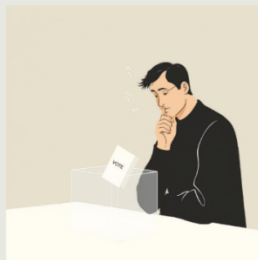
Sebagai bagian dari tim peneliti dan publikasi untuk karya ini, Nurul Sintia Kahar telah menunjukkan komitmen mendalam terhadap riset dan penulisan yang bermakna. Kontribusinya dalam proyek ini merupakan perwujudan dari semangatnya untuk memahami dan mengartikulasikan isu-isu kompleks yang relevan bagi masyarakat. Tinggal di Soasio, Nurul terus menemukan inspirasi dari lingkungannya, menyalurkan wawasan akademis dan pengalaman lapangannya ke dalam karya tulis yang informatif dan relevan.

BAHAN PRESENTASI FGD

DEFINISI PEMILIH CERDAS DAN PARTISIPASI RASIONAL

Pemilih Cerdas adalah individu yang memahami hak suara, proses pemilu, dan isu-isu politik yang relevan.

Partisipasi Rasional berarti memilih berdasarkan informasi akurat dan pertimbangan matang, bukan emosi atau desas-desus. Hal ini meningkatkan kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu.



Made with **drawkit**



KERANGKA MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS: PILAR-PILAR MENUJU PARTISIPASI RASIONAL

Demokrasi yang berkualitas membutuhkan pemilih yang cerdas dan berpartisipasi rasional. Model ini dirancang untuk memperkuat kesadaran dan kemampuan pemilih, memastikan setiap suara didasari informasi dan pertimbangan matang.

Made with **drawkit**

KESIMPULAN: MENUJU DEMOKRASI BERKUALITAS DENGAN PEMILIH CERDAS

Edukasi pemilih adalah fondasi krusial bagi terwujudnya partisipasi rasional dan demokrasi yang berkualitas.

Pilar-pilar dalam kerangka model ini saling melengkapi, menciptakan ekosistem edukasi yang komprehensif.

Komitmen dan kolaborasi dari seluruh pihak adalah kunci utama keberhasilan implementasi model ini.

Made with **drawkit**

DAMPAK DAN MANFAAT EDUKASI PEMILIH CERDAS

1....

Partisipasi pemilih yang aktif dan kualitas suara yang lebih baik, mencerminkan pilihan informatif.

2....

Kesalahan administratif dan potensi konflik pasca-pemilu, menjaga stabilitas.

3....

Kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi proses demokrasi.

Made with Canva

STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL EDUKASI PEMILIH CERDAS

- Kolaborasi kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.
- Pemanfaatan maksimal teknologi digital, media sosial, dan platform daring untuk jangkauan luas.
- Program pelatihan komprehensif bagi petugas pemilu, fasilitator edukasi, dan relawan.



Made with Canva

PILAR 5: PENDEKATAN INKLUSIF DAN SENSITIF GENDER

MENJANGKAU KELOMPOK RENTAN

Memastikan edukasi mencapai pemilih disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya.

AKSESIBILITAS MATERI

Materi edukasi yang relevan, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh perempuan dan kelompok marginal.

MENDORONG PARTISIPASI

Inisiatif khusus untuk meningkatkan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat.

Made with Canva

PILAR 4: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN LITERASI POLITIK



SISTEM POLITIK

Memahami struktur pemerintahan dan peran lembaga negara dalam sistem demokrasi.



NILAI DEMOKRASI

Internalisasi nilai-nilai seperti kesetaraan, kebebasan, dan tanggung jawab warga negara.



BERPIKIR KRITIS

Mengembangkan kemampuan menganalisis informasi politik secara objektif dan menghindari disinformasi.

Made with **Canva**

PILAR 3: EDUKASI HAK DAN PROSES PEMILU



- Informasi lengkap tentang hak suara, cara registrasi, dan mekanisme pemungutan suara.
- Penjelasan jenis pemilu, peran kandidat, dan pentingnya setiap suara.
- Prosedur pengaduan dan perlindungan hak pemilih untuk memastikan keadilan.

Made with **Canva**

PILAR 2: PENYAMPAIAN INFORMASI YANG JELAS DAN TERSTRUKTUR

KERANGKA "BITE"

Informasi ringkas dan mudah dicerna untuk menarik perhatian awal.

KERANGKA "SNACK"

Detail lebih lanjut yang memancing rasa ingin tahu dan pemahaman lebih dalam.

KERANGKA "MEAL"

Informasi komprehensif untuk pemahaman mendalam dan pengambilan keputusan.

Gunakan bahasa sederhana, visual menarik, dan uji materi dengan audiens untuk efektivitas komunikasi.

Made with **Canva**

PILAR 1: PUSATKAN PENGALAMAN PEMILIH

1

MEMAHAMI PEMILIH

Mengidentifikasi kemampuan, sikap, dan kecenderungan unik dari berbagai kelompok pemilih.



SEGMENTASI

Membagi pemilih menjadi kelompok seperti pemilih baru, jarang, dan reguler untuk pendekatan yang tepat.



MATERI FLEKSIBEL

Menyesuaikan materi edukasi agar relevan dengan kebutuhan dan konteks setiap segmen pemilih.

Makalah 000000

DOKUMENTASI WAWANCARA
DENGAN INFORMAN









Spanduk



Pelibatan Relawan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dalam Interview
dengan Informan di Pulau Maitara



Sumber:

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=12212435663059387_3&set=pb.61567816206236.-2207520000&type=3&locale=id_ID

DOKUMENTASI SAAT RISET DI PULAU KOLORAI KABUPATEN PULAU MOROTAI



